

Upah Layak Jurnalis

SURVEY UPAH LAYAK AJI DI 16 KOTA DI INDONESIA

Upah Layak Jurnalis

SURVEY UPAH LAYAK AJI DI 16 KOTA DI INDONESIA

Penulis: **Abdul Manan**

Editor: **Nugroho Dewanto**

Koordinator Survei dan Riset: **Winuranto Adhi**

Tim Survei dan Riset:

- Aji Batam: **Muhammad Nur**
- Aji Denpasar: **Ali Mustofa**
- Aji Jakarta: **Agustinus Dakosta, Riky Ferdianto**
- Aji Jayapura: **Victor Mambor, Cuding Levi**
- Aji Kediri: **Danu Sukendro, Asmaul Chusna, Nanang Masyhari**
- Aji Kendari: **Ishak Junaedi, Siti Harlina**
- Aji Kupang: **Adi Ryan Rianghrpat, Thoni Johanis**
- Aji Bandar Lampung: **Ridwan Hardiansyah**
- Aji Makassar: **Andre Mardian**
- Aji Medan: **Herman Saleh, Siti Habsah**
- Aji Palu: **Muhammad Ridwan, Subarkah, Rizki Maruto, Putra Yosvindar**
- Aji Pekanbaru: **Dina Febriastuti, Ilham M Yasir, Fakhurrodzi, M. Basri, Khairul Amri**
- Aji Pontianak: **Aris Munandar, Andi Fachrizal**
- Aji Semarang: **Triono Wahyu Sudiby, Imung Yuliardi, Muhammad Rofiudin, Heri Chandra Santoso**
- Aji Surabaya: **Yudi Thirzano**
- Aji Yogyakarta: **Rochimawati**

Desain Sampul dan Tata Letak: **J!DSG**

Cetakan:

Penerbit:

Aliansi Jurnalis Independen

Jl Kembang Raya No. 6 kwitang Senen Jakarta Pusat 10420

Email: sekretariatnya_aji@yahoo.com

Website: www.ajiindonesia.org

Daftar Isi

Pengantar	7
-----------------	---

BAB I Fakta dan Statistik Tentang Upah Jurnalis..... 11

I.1 Upah Jurnalis dalam Sejumlah Hasil Survei (2000-2008)	13
I.2 Standar Pengupahan di Sejumlah Sektor Industri.....	18
I.3 Upah Jurnalis di Sejumlah Negara.....	20

BAB II Upah Layak dan Upah Nyata 27

II.1 Upah Layak Jurnalis Tahun 2011	29
II.2 Upah Jurnalis: Masih Jauh dari "Ideal"	32
II.3 Kota Batam	37
II.4 Kota Denpasar.....	44
II.5 Kota Jakarta	49
II.6 Kota Jayapura.....	56
II.7 Kota Kediri	61
II.8 Kota Kendari	68
II.9 Kota Kupang	73
II.10 Kota Bandar Lampung	77
II.11 Kota Makassar	83
II.12 Kota Medan	88
II.13 Kota Palu	93
II.14 Kota Pekanbaru.....	97
II.15 Kota Pontianak.....	103
II.16 Kota Semarang.....	111
II.17 Kota Surabaya	123
II.18 Kota Yogyakarta	129

Bab III AJI dan Isu Kesejahteraan Jurnalis..... 135

III.1 AJI dan Kampanye Serikat Pekerja.....	138
III.2 AJI dan Kampanye Upah Layak	143

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Hasil Survei AJI Surabaya Soal Gaji Jurnalis Jawa Timur, 2000.....	15
Tabel 1.2	Hasil Survei Thomas Hanitzsch Soal Upah Jurnalis, 2001	16
Tabel 1.3	Hasil Survei AJI-IFJ tentang Upah Jurnalis, 2005	17
Tabel 1.4	Hasil Survei Dewan Pers tentang Upah Jurnalis, 2008	18
Tabel 1.7	Standar Gaji Karyawan di Sejumlah Sektor Tahun 2010.....	19
Tabel 1.8	Gaji Staf sampai Manajer di Berbagai Sektor, 2010	20
Tabel 1.9	Enam Kota yang Gaji Jurnalisnya Secara Rata-rata Tinggi di Amerika Serikat, 2010	22
Tabel 1.10	Kenaikan Upah Jurnalis Amerika Serikat dari Tahun 1970 sampai 2001	23
Tabel 1.11	Gaji Lulusan Sekolah Jurnalistik di Amerika Serikat (1997-2004)....	24
Tabel II.1	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Versi AJI Tahun 2011	30
Tabel II.2	Perbandingan Gaji Jurnalis Baru, UMP, dan Upah Layak AJI.....	34
Tabel II.3	Upah Riil Jurnalis di 15 Kota di Indonesia Tahun 2011	36
Tabel II.4	Tabel Oplah Surat kabar di Kepulauan Riau Tahun 2008-2010	39
Tabel II.5	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Batam Tahun 2011.....	42
Tabel II.6	Upah Jurnalis Baru di Kota Batam Tahun 2011	43
Tabel II.7	Oplah Surat kabar di Bali Tahun 2010.....	46
Tabel II.8	Pertumbuhan Media dan Oplah Surat kabar di Bali Tahun 2008-2010	46
Tabel II.9	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Denpasar Tahun 2011	47
Tabel II.10	Upah dan Fasilitas Pendukung Kerja Jurnalis di Kota Denpasar Tahun 2011	48
Tabel II.11	Jumlah Surat kabar dan Oplahnya di Jakarta Tahun 2010.....	51
Tabel II.12	Perbandingan Jumlah Surat kabar di Jakarta Tahun 2008 - 2010....	51
Tabel II.13	Kebutuhan Layak Jurnalis Kota Jakarta Tahun 2011	54
Tabel II.14	Upah Riil Jurnalis Baru di Kota Jakarta, 2010.....	55
Tabel II.15	Jumlah Surat kabar dan Oplahnya di Provinsi Papua Tahun 2010 ...	57
Tabel II.16	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Jayapura Tahun 2011	60

Tabel II.17	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Kediri Tahun 2011	64
Tabel II.18	Upah Riil Jurnalis di Kota Kediri Tahun 2011	67
Tabel II.19	Jumlah Media dan Oplahnya di Sulawesi Tenggara 2010	70
Tabel II.20	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Kendari Tahun 2011	72
Tabel II.21	Jumlah dan Oplah Surat kabar di Nusa Tenggara Timur 2010	75
Tabel II.22	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Kupang Tahun 2011	76
Tabel II.23	Upah Riil Jurnalis di Kota Kupang Tahun 2011	77
Tabel II.24	Tabel: Media dan Oplah Surat kabar di Lampung Tahun 2010	79
Tabel II.25	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Bandar Lampung Tahun 2011	80
Tabel II.26	Upah Riil Jurnalis di Kota Bandar Lampung Tahun 2011	83
Tabel II.27	Media dan Oplah di Sulawesi Selatan, 2010	84
Tabel II.28	Kebutuhan Layak Jurnalis Makassar 2011.....	86
Tabel II.29	Jumlah Media dan Oplahnya di Sumatera Utara Tahun 2010.....	90
Tabel II.30	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis di Kota Medan 2011.....	92
Tabel II.31	Upah Riil Jurnalis di Kota Medan Tahun 2011	92
Tabel II.32	Jumlah Media dan Oplahnya di Sulawesi Tengah 2010	94
Tabel II.33	Pertumbuhan Media dan Oplahnya di Sulawesi Tengah 2008-2009	94
Tabel II.34	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Palu Tahun 2011	96
Tabel II.35	Jumlah Media dan Oplah Surat kabar di Riau, 2010.....	99
Tabel II.36	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Pekanbaru tahun 2011	100
Tabel II.37	Jumlah Media dan Oplah Surat kabar di Kalimantan Barat Tahun 2010	104
Tabel II.38	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Pontianak Tahun 2011	109
Tabel II.39	Upah Riil Jurnalis di Kota Pontianak 2011.....	110
Tabel II.40	Jumlah dan Oplah Surat kabar di Jawa Tengah Tahun 2010.....	112
Tabel II.41	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Semarang Tahun 2011	122
Tabel II.42	Upah Riil Jurnalis Kota Semarang Tahun 2011	123
Tabel II.43	Media dan Oplah di Jawa Timur Tahun 2010.....	126
Tabel II.44	Kebutuhan Layak Jurnalis Kota Surabaya Tahun 2011.....	127
Tabel II.45	Jumlah Media dan Oplah Surat kabar di DI Yogyakarta Tahun 2010	131
Tabel II.46	Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Yogyakarta Tahun 2011	133

PENGANTAR

Investasi Jangka Panjang dari Kampanye Upah Layak

DALAM 10 tahun ini, perkembangan industri media di Indonesia menunjukkan gejala yang menggembirakan. Sebagai sebuah industri, media tumbuh cukup pesat, yang itu bisa dilihat melalui penambahan jumlah medianya . Jika di tahun 1997 baru ada 289, dua tahun berikutnya jumlahnya bukan hanya bertambah, tapi meledak: menjadi 1.687 media. Jumlah itu tiap tahun memang mengalami penyusutan, dan menjadi 1.076 di tahun 2010. Namun, jumlah itu tentu saja masih empat kali lebih banyak dari semasa Orde Baru. Dari segi oplah, tren yang statistiknya bisa dibaca di data Serikat Perbit Surat kabar tiap tahun menunjukkan pertumbuhan.

Pertumbuhan radio, TV, dan belakangan media berita online, juga menunjukkan pertumbuhan yang sama. Pada 1998, hanya terdapat 850 stasiun radio. Setelah 10 tahun berselang, Departemen Komunikasi dan Informatika mencatat 2.425 permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Hanya saja, pertumbuhan di bidang industri ini kurang diikuti oleh aspek kesejahteraan bagi pekerjanya. Jika jumlah media dan oplah dalam kurun waktu 10 tahun ini ada peningkatan signifikan, tapi tidak demikian halnya dengan kesejahteraan jurnalisnya. Setidaknya, itulah yang bisa dibaca dari hasil survei AJI pada akhir

Desember 2010 sampai Januari 2011. Survei itu menemukan bahwa jurnalis diupah rendah itu masih sangat banyak, bahkan ini terjadi di kota besar, seperti Medan, Bandar Lampung, dan Kupang. Di Palu, ibukota Sulawesi Tengah, malah ada yang mendapatkan gaji Rp 300 ribu sebulan.

Fakta-fakta ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Sebab, penelitian yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, baik yang diselenggarakan AJI Surabaya di tahun 2000, AJI Indonesia di tahun 2005, dan Dewan Pers di tahun 2008, memberikan gambaran lebih kurang serupa. Semua itu hanya memperkuat fakta bahwa kesejahteraan jurnalis, secara rata-rata, masih kurang menggembarakan. Bukannya tak ada jurnalis yang mendapat upah yang pantas, sesuai standar AJI, di mana jurnalis baru bisa mendapatkan upah layak seperti jurnalis di Jakarta Globe, Bisnis Indonesia dan Kompas. Tapi, media yang lebih kecil jumlahnya lebih banyak daripada yang memiliki modal kuat.

Ini tentu saja sangat ironis. Sebab, sebagai pilar penting dari industri media, nasib jurnalis harusnya mendapat perhatian yang pantas dari pelaku industri media. Apalagi jika mengingat beban yang dipikulkan undang-undang kepada pekerja media, yaitu menjadikan alat kontrol sosial, selain menjalankan fungsi pendidikan dan hiburan. Dengan beban tanggungjawab yang besar, sangatlah pantas jika ada tuntutan bahwa kesejahteraannya diberi bobot yang sepadan.

Bagi AJI, perjuangan soal upah layak untuk jurnalis ini merupakan bagian dari kampanye kesejahteraan jurnalis. Sebab, AJI punya keyakinan yang sangat kuat bahwa kesejahteraan jurnalis punya korelasi langsung dan signifikan dengan profesionalisme. Kesejahteraan yang layak memang bukan jaminan bahwa wartawan bisa bersikap profesional. Tapi, kesejahteraan yang memadai memiliki peluang besar untuk jurnalis agar lebih bersikap profesional, dan menjalankan amanahnya seperti disebutkan sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bagi AJI, program yang terkait soal kesejahteraan jurnalis tak kalah dalam soal prioritas dengan isu kebebasan pers dan profesional-

isme. Sebab, ketiganya saling berkelindan. Sikap mengabaikan salah satu dari ketiga sisi itu bukan hanya ahistoris, tapi juga tak bijak. Sebab, keterkaitan antara ketiganya cukup erat. Bisakah kebebasan pers didapat, dan dipertahankan, jika jurnalis yang bekerja di media tak mendapatkan kesejahteraan? Bisakah jurnalis bersikap profesional jika kebutuhan hidupnya tak terpenuhi secara layak?

Ada sejumlah cara yang dilakukan AJI untuk menaikkan isu ini ke permukaan, dan diharapkan dapat menyedot perhatian lebih serius bagi media. Salah satunya adalah melalui dorongan kepada media untuk membentuk serikat pekerja. Dengan berserikat, ada harapan bahwa kesejahteraan yang mereka dapat bisa lebih baik. Sebab, ada lembaga khusus yang bisa menjadi wadah untuk menuntut dan memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja.

Cara lain yang juga dilakukan AJI adalah dengan menggelar survei upah layak, yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk menentukan upah layak. AJI mulai melakukan strategi ini sejak 2006, dengan *tagline* “Upah Layak Jurnalis”. Sebab, AJI menilai standar upah yang ditentukan pemerintah melalui Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota, sangat tak memadai untuk memenuhi kebutuhan riil dan standar jurnalis.

Sikap AJI ini memang mengundang kritik dan tanda tanya. Tapi, yang mendukung juga sangat besar. Sebab, ini masalah riil yang dihadapi jurnalis di Indonesia. Sebab, regulasi yang longgar dalam pendirian media, membuat siapa saja bisa masuk ke bisnis ini, meski dengan modal yang sangat pas-pasan. Media yang bermodal cekak biasanya meminta permakluman dengan tak memberi kesejahteraan yang layak pada pekerjanya, termasuk jurnalis.

Tujuan dari kampanye AJI soal upah layak, memang tak hanya kepada pemilik media, tapi juga kepada jurnalis. Harapannya, agar jurnalis juga menyadari hak-haknya yang bisa mereka tuntut kepada pemilik media—terutama soal upah layak. Kampanye upah layak ini juga merupakan salah satu perlawanan opini terhadap keinginan sebagian besar media yang menjadikan upah minimum provinsi, upah minimum kota dan upah minimum kabupaten sebagai referensi dalam pengupahan.

Dengan kalkulasi paling sederhana sekalipun, upah minimum tak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan standar jurnalis, apalagi untuk yang ideal. Kampanye ini, termasuk buku yang Anda baca ini, memang tak bisa dinikmati langsung dampaknya bagi kesejahteraan media. Ini seperti bibit yang kami tanam sekarang, dan tak bisa berharap bisa memetik hasilnya besok pagi. Kami menganggap ini merupakan investasi jangka panjang agar media, juga publik, memberi penghargaan yang pantas kepada jurnalis atas amanah yang diembannya, yang salah satunya bisa ditunjukkan dengan pemberian upah dan tunjangan yang layak.

Jakarta, Oktober 2011

BAB I

Fakta dan Statistik Tentang Upah Jurnalis

“KITA merasa besar di luar, tapi sebenarnya kecil di perusahaan”. Pernyataan bernada satiris dan tentu saja jauh dari kesan bangga ini disampaikan seorang redaktur sebuah harian di Medan, Sumatera Utara, dalam diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tahun 2005 silam. Acara itu merupakan satu dari sekian diskusi maraton yang digelar AJI dan International Federations of Journalist (IFJ) untuk menyusun potret jurnalis Indonesia, mulai dari soal kesejahteraan sampai persepsinya tentang etika dan hukum.

Meski tak cukup eksplisit, kita tahu apa yang dimaksud dari pernyataan itu. Di muka publik, profesi jurnalis cukup disegani --meski dalam kenyataan kerap dikotori oleh praktik-praktik tak terpuji oleh mereka yang menjadikan profesi ini sebagai kedok untuk mencari uang semata. Sangat banyak pengakuan yang diberikan tentang peran penting jurnalis dan media massa, dari aspek mendidik publik sampai mengontrol

kekuasaan. Bukti soal ini cukup banyak yang bisa disajikan¹.

Hanya saja, pengakuan atas peran penting jurnalis itu memang tak selalu diikuti dengan “penghargaan” yang pantas, termasuk dari perusahaan. Mereka yang bergelut dengan profesi ini seringkali tak mendapatkan penghargaan yang memadai dan “imbalan” yang selayaknya -- yang salah satunya bisa ditunjukkan dengan upah yang layak. Rangkaian diskusi AJI di tahun 2005 itu, dan sejumlah fakta yang dapat ditemui dalam survei yang lain sebelum dan sesudahnya, menunjukkan bahwa “penghargaan” itu memang masih jauh dari proporsional.

Di tahun 2000, dari temuan survei AJI Surabaya, ada jurnalis yang masih mendapatkan upah kurang dari Rp 100 ribu. Menyedihkan! Tapi itulah faktanya. Dengan gaji yang jelas sangat jauh dari layak itu, tentu tak terbayang akan seperti apa “kualitas” pekerjaannya serta tak terbayang juga bagaimana jurnalis itu akan berakrobat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Temuan serupa berulang saat AJI Indonesia melakukan survei tahun 2005. Hasil survei AJI kembali mencatat ada jurnalis--bahkan dengan jabatan redaktur--yang masih digaji kurang dari Rp 200 ribu.

Ini merupakan sisi buruk yang sangat memprihatinkan dari wajah pers Indonesia dan menjadi kepedulian lama Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Sebagai organisasi jurnalis yang berdiri tahun 1994 dan lahir dari semangat untuk melawan represi negara terhadap pers, AJI memang menjadikan isu kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis sebagai kampanye penting sepanjang sejarahnya. Tapi, isu kesejahteraan juga mendapatkan perhatian tak kalah serius. Dalam kongres tahun 1997, saat organisasi ini masih bergerak di bawah tanah karena teka-

1 Salah satu kajian cukup menarik tentang pers dan pembangunan ekonomi dapat dilihat dalam *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Development*, yang diterbitkan World bank tahun 2002.

nan rezim Orde Baru, AJI resmi menjadikan isu kesejahteraan sebagai satu dari tiga prioritas program kerjanya—selain kebebasan pers dan profesionalisme.

Alasan mengapa soal kesejahteraan jurnalis sangat penting diperjuangkan, jawabannya cukup terang. Kebebasan pers dan profesionalisme adalah prasyarat penting bagi tumbuh dan berkembangnya iklim pers yang sehat dan demokratis. Tapi, dua soal itu saja tak cukup. Kondisi itu juga harus ditopang oleh lingkungan yang baik dan memadai, baik politik maupun ekonomi. Dalam sistem politik yang represif, umumnya kebebasan pers—dan juga profesionalisme jurnalisnya—juga dalam tekanan seperti layaknya partai oposisi yang dibatasi dan dibungkam gerakannya.

Profesionalisme jurnalis dan media massa akan susah ditegakkan jika para pekerjanya tak bisa fokus pada pekerjaannya. Termasuk oleh kesibukan “urusan lain” untuk menutupi kebutuhan hidupnya karena upahnya yang tak layak. Hal lainnya, dan ini tak kalah penting, jurnalis juga akan mudah berkompromi dengan sejumlah hal yang sebenarnya melanggar etik—seperti kasus menerima pemberian dari narasumber—jika kesejahteraannya tak memadai. Tentu saja, alasan yang disebut terakhir ini bukan penyebab tunggal dari tumbuh dan berkembangnya praktik “wartawan amplop”.

1.1 Upah Jurnalis dalam Sejumlah Hasil Survei (2000-2008)

Dalam sepuluh tahun ini, setidaknya ada empat penelitian yang berbicara tentang kondisi kesejahteraan jurnalis di Indonesia. Ada yang secara khusus meneliti aspek ekonomi kehidupan para pekerja media, ada pula yang menyorot wajah umum jurnalis dan isu kesejahteraan menjadi bagian di

dalamnya. Pertama, penelitian AJI Surabaya di tahun 2000². Kedua, penelitian Thomas Hanitzsch dari Ilmenau University of Technology, Jerman, tahun 2001³. Ketiga, penelitian AJI Indonesia tahun 2005⁴. Keempat, penelitian Dewan Pers di tahun 2008⁵.

Ada sejumlah hal dari penelitian itu yang berbeda satu sama lain. Utamanya soal jumlah serta lokasi dari para responden, poin-poin pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner kepada wartawan. Namun, hasil akhir dari empat penelitian dalam kurun waktu yang berbeda itu mengungkapkan fakta yang bisa dibilang sama: kesejahteraan jurnalis masih memprihatinkan—kalau tak bisa dibilang masih buruk.

Ini pula yang setidaknya bisa menjelaskan mengapa, setidaknya dalam temuan hasil survei yang dilakukan oleh AJI, Thomas Hanitzsch dan Dewan Pers, banyak jurnalis memiliki pekerjaan sampingan. Jenis usaha sampingannya juga sangat beragam, mulai dari makelar surat izin mengemudi (SIM) sampai pegawai swasta⁶. Selain itu, rendahnya kesejahteraan

2 Rochman Budiyo dan Mabroer MS, *Kesejahteraan Jurnalis, Antara Mitos dan Kenyataan: Potret Sosial Ekonomi Jurnalis Jawa Timur*, AJI Surabaya dan The Asia Foundation, Juli 2000.

3 Hasil studi Thomas Hanitzsch dipublikan dalam *Journalism Studies*, Volume 6, Number 4, 2005, dengan judul *Journalists in Indonesia: Educated but Timid Watchdogs*.

4 AJI Indonesia dan IFJ, *Potret Jurnalis Indonesia*; Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota, Jakarta, Agustus 2006.

5 Wina Armada, *Menakar Kesejahteraan Wartawan*, Dewan Pers, Jakarta, 2009.

6 Dalam survei yang dilakukan AJI Surabaya, sebanyak 26,8 % yang mengaku memiliki pekerjaan sampingan, dan 19,6% mengatakan kadang-kadang melakukan pekerjaan sampingan. Jenis pekerjaan sampingannya, antara lain menjadi calo SIM, pengusaha wartel, dan pegawai negeri. Dalam temuan survei AJI-IFJ, sebanyak 20 persen yang menjawab “ya” saat ditanya apakah mereka memiliki pekerjaan sampingan atau tidak. Pekerjaan sampingan yang paling banyak dilakukan (11,6%) adalah berdagang aneka kebutuhan, seperti elektronik, oli, motor dan sebagainya. Ada juga (9,5%) yang mengaku memiliki kios atau toko handphone, sembako, dan sebagainya. Dalam temuan survei Dewan Pers, ada beberapa cara yang dilakukan jurnalis untuk bisa tetap hidup meski gajinya tak memadai. Di antaranya: pindah-pindah pekerjaan; menjadi wartawan spesialis; menulis di media lain dengan menggunakan nama samaran; menjadi konsultan secara tidak resmi; menjadi pelobi; promosi khusus; menghadiri sebanyak mungkin konferensi pers untuk mencari uang tambahan; sebanyak mungkin meng-

ini juga yang sering menjadi alasan pembenar—atau tepatnya digunakan sebagai dalih bagi sebagian jurnalis—mengapa “tradisi” menerima amplop dari sumber berita masih merupakan fenomena jamak di kalangan wartawan Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukan AJI Surabaya tahun 2000, jurnalis yang jadi responden adalah 300 wartawan dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Penelitian yang menggabungkan metode wawancara dan investigasi itu menemukan hasil yang tergolong menyedihkan: ada jurnalis yang mengaku hanya diberi gaji kurang dari Rp 100 ribu, meski persentasenya sangat kecil (0,7%). Mayoritas (sekitar 75%) jurnalis bergaji kurang dari Rp 750 ribu per bulan. Hanya 13,8 % yang mendapatkan upah di atas Rp 1 juta.

Tabel 1.1 Hasil Survei AJI Surabaya Soal Gaji Jurnalis Jawa Timur, 2000

Kisaran Upah per Bulan	< Rp 100 Ribu	Rp 100 Ribu–Rp 250 Ribu	Rp 250 Ribu–Rp 500 Ribu	Rp 500 Ribu–Rp 750 Ribu	Rp 750 Ribu–Rp 1 juta	> Rp 1 juta
Prosentase	0,7 %	15,2 %	34,1 %	21,4 %	14,9 %	13,8 %

Hasil penelitian yang dilakukan Thomas Hanitzsch, setahun setelah penelitian AJI Surabaya, memberi hasil yang sedikit berbeda. Sampel penelitiannya sebanyak 385 jurnalis—dari 480 yang sudah dipilih—di tiga kota, yaitu Jakarta, Yogyakarta dan Medan, Sumatera Utara. Penelitian itu memberikan hasil yang lebih “menggembirakan” dibanding temuan AJI Surabaya.

Menurut temuan penelitian Thomas, sebagian besar (86%) jurnalis memiliki gaji berkisar antara Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Namun, jurnalis yang memiliki kurang dari Rp 500 ribu juga ada, yaitu sebesar 3,5 persen. Dengan skala gaji seperti itu, tak mengherankan jika sebanyak 77 persen jurnalis mengaku

hadiri acara; bekerja rangkap; dan melakukan pemerasan.

sudah puas dengan gaji yang diterima. Malah ada 22,6 persen yang mengaku sangat puas.

Temuan ini memang agak berbeda secara mencolok dibandingkan penelitian sebelumnya oleh AJI Surabaya. Hanya saja, pemilihan kota tentu saja menjadi faktor penting yang menentukan hasil penelitian. Dengan memilih sampel Jakarta, Yogyakarta dan Medan, maka mudah dimengerti mengapa gajinya relatif lebih baik dari temuan AJI Surabaya, yang penelitiannya dilakukan hanya berselang setahun sebelumnya. Tiga kota yang diteliti Hanitzsch itu, terutama Jakarta, termasuk kategori kota besar dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk media, yang tentu saja berbeda dengan kondisi ekonomi 12 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian AJI Surabaya.

Tabel 1.2 Hasil Survei Thomas Hanitzsch Soal Upah Jurnalis, 2001

Rentang Gaji	Lebih dari Rp 3 juta	Rp 1–Rp 3 juta	Rp 500 ribu–Rp 1 juta	Kurang dari Rp 500 ribu
Prosentase	9,0	68,5	19	3,5

Dengan memilih sampel kota besar, potensi untuk menemukan potret yang baik soal kesejahteraan wartawan, sangat mungkin terjadi. Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi langsung dengan sehat tidaknya media dan sejahtera tidaknya para pekerja. Penyumbang utama bagi kocek media adalah iklan, yang biasanya sangat dipengaruhi oleh aktivitas bisnis di sebuah daerah. Dengan logika sederhana seperti ini, kita bisa dengan mudah memberikan kesimpulan bahwa kota-kota besar pasti memberikan kesempatan lebih baik bagi media untuk tumbuh dan berkembang.

Ini pula yang bisa menjelaskan mengapa jumlah media, baik surat kabar, radio, TV dan online, banyak berada di Jakarta. Radio, TV dan media online yang besar, semua ada di Jakarta. Hanya ada beberapa surat kabar dan TV lokal yang salah satu pemain besarnya tak berada di ibu kota: grup Jawa Pos berkantor pusat di Surabaya, grup Bali Post berada di Denpasar, Bali.

Hasil penelitian yang dilakukan AJI dan IFJ di tahun 2005, “mengoreksi” kabar bagus dari hasil temuan Hanitzsch. Survei yang dilakukan AJI Indonesia bersama International Federation of Journalists (IFJ) dilakukan pada tahun 2005, dengan responden jurnalis yang tersebar di 17 kota di Indonesia. Sebanyak 1,5% jurnalis yang disurvei mengaku mendapatkan upah di bawah Rp 200 ribu alias kurang dari US\$ 25 sebulan. Ini bukan hanya rendah, tapi lebih buruk dari upah minimum yang dibuat oleh pemerintah.

Jumlah jurnalis yang mendapatkan upah kurang dari Rp 599 ribu juga cukup besar, yaitu sebanyak 22,5%. Padahal, saat survei AJI dilakukan, upah minimum provinsi tertinggi saat itu adalah DKI Jakarta dengan Rp 711.843. Upah minimum terendah adalah Jawa Tengah (Rp 390 ribu). Hasil survei juga menemukan, bahwa sebanyak lebih dari 50 persen jurnalis bergaji kurang dari Rp 1,4 juta. Di bawah ini adalah hasil lengkap survei AJI dan IFJ tahun 2005 itu:

Tabel 1.3 Hasil Survei AJI-IFJ tentang Upah Jurnalis, 2005

Gaji	Tidak Tahu/Tidak Menjawab	> Rp 5 juta	Rp 4,6 - Rp 4,9 juta	Rp 4,2 - Rp 4,5 juta	Rp 3,8 - Rp 4,1 juta	Rp 3,4 - Rp 3,79 juta	Rp 3 - Rp 3,39 juta	Rp 2,6 - Rp 2,99 juta	Rp 2,2 - Rp 2,59 juta	Rp 1,8 - Rp 2,19 juta	Rp 1,4 - Rp 1,79 juta	Rp 1 - Rp 1,39 juta	Rp 600 - Rp 999 ribu	Rp 200 - Rp 259 ribu	Lebih kecil dari Rp 200 ribu
%	2,3	1,3	0,5	1,3	1,3	1,0	2,5	3,0	5,8	5,5	16,5	25,3	22,5	10,0	1,5

Jurnalis yang mendapatkan upah mengenaskan--kurang dari Rp 200 ribu--itu berada di Jayapura, Papua (5%) dan—yang terbesar—di Palu, Sulawesi Tengah (25%). Ini kondisi yang sangat buruk dan memprihatinkan. Bahkan di Jakarta saja, sebagian besar (55%) jurnalis menerima upah kurang dari Rp 1 juta—hanya selisih Rp 280 ribu dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah ini pada tahun itu. Hanya 5% jurnalis yang bergaji Rp 3,8 juta hingga Rp 4,1 juta.

Semua gambaran muram ini diperkuat oleh temuan penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers di tahun 2008. Re-

sponden penelitian Dewan Pers ini sebanyak 600 wartawan. Temuan dari survei Dewan Pers ini menyebutkan, sebagian besar (39%) wartawan memiliki gaji kurang dari Rp 1 juta. Pada saat survei dilaksanakan, upah minimum provinsi terendah adalah Jawa Tengah dengan Rp 547.000, yang tertinggi adalah Papua dengan Rp 1.105.500. Artinya, mayoritas jurnalis Indonesia memiliki gaji kurang dari upah minimum Jakarta. Inilah hasil lengkap dari penelitian itu:

Tabel 1.4 Hasil Survei Dewan Pers tentang Upah Jurnalis, 2008

Besaran	>Rp 1 Juta	Rp 1 juta– Rp 1,5 juta	Rp 1,5 juta– Rp 2 juta	Rp 2 juta– Rp 2,5 juta	Rp 2,5 juta– Rp 3 juta	Rp 3 juta– Rp 4 juta	Rp 4 juta– Rp 5 juta
Prosentase	40	15 %	17%	8%	13%	>5%	>5%

Temuan survei Dewan Pers tentang upah layak memberikan konfirmasi dari fakta-fakta sebelumnya bahwa kesejahteraan jurnalis memang masih jauh dari layak. Bahkan, seperti temuan AJI Surabaya dan AJI-IFJ di mana ada jurnalis yang masih digaji kurang dari Rp 200 ribu, itu bukan hanya tak layak, tapi tak bisa diterima akal sehat. Dengan mendapat upah minimum provinsi saja itu masih dianggap “kurang pantas” untuk jurnalis—yang karena profesinya mengemban tanggungjawab besar, di antaranya “mendidik public” dan mengontrol kekuasaan.

I.2 Standar Pengupahan di Sejumlah Sektor Industri

Ide upah layak yang diusung AJI mengundang sejumlah kritik. Tuntutan adanya standar sendiri untuk sebuah profesi dianggap sebagai ego sektoral jurnalis. Namun, jika kita melihat pada sejumlah pekerja di sektor lain, ada banyak contoh untuk menentukan standar upah yang tak menjiplak upah minimum provinsi. Setidaknya, para pekerja di sektor jasa memberikan banyak contoh tentang bagaimana seharusnya perusahaan

memperlakukan upah minimum hanya sebagai patokan, bukan sebagai angka yang harus dilaksanakan dalam kenyataan.

Lihat saja misalnya standar penggajian yang dibuat oleh Kelly Service Inc., lembaga terkemuka di bidang manajemen pelayanan tenaga kerja dan solusi sumber daya manusia yang memiliki kantor pusat di Troy, Michigan, Amerika Serikat. Hampir setiap tahun lembaga yang memiliki perwakilan di sejumlah negara ini secara rutin menerbitkan standar tahunan untuk gaji di sejumlah sektor. Menurut standar yang dibuat Kelly untuk sejumlah sektor di Indonesia, bisa dilihat bahwa gaji untuk pekerja baru—baik itu di sektor perbankan, teknik dan mesin, serta teknologi informasi, rata-rata di atas upah minimum tertinggi di Indonesia di tahun 2010.

Tabel 1.7 Standar Gaji Karyawan di Sejumlah Sektor Tahun 2010

Sektor	Jabatan	Pendidikan	Masa Kerja	Gaji Terendah	Gaji Tertinggi
Bank	Bank Teller	D3 / S1	1-3	Rp 2.000.000	Rp 2.500.000
	Remittance /Settlement /Loans Clerk	D3 / S1	1-2	Rp 1.650.000	Rp 2.250.000
	Collection /Debt Recovery Officer	D3 / S1	1-3	Rp 1.750.000	Rp 3.500.000
	Bank Operation Officer	D3 / S1	0-1	Rp 1.750.000	Rp 2.500.000
	Trade Finance Officer	S1	1-2	Rp 2.500.000	Rp 4.500.000
	Dealer	S1	1-2	Rp 2.500.000	Rp 3.500.000
Engineering & Technical	Facilities Technician	D3 / S1	1-5	Rp 1.800.000	Rp 4.000.000
	Associate Engineer	S1	1-2	Rp 1.800.000	Rp 4.000.000
	Draughtsman	D3 / S1	1-2	Rp 2.000.000	Rp 3.500.000
Information Technology	Helpdesk Analyst	S1	1-3	Rp 3.000.000	Rp 6.500.000
	IT Administrator	S1	1-3	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000

* DIOLAH DARI EMPLOYMENT OUTLOOK AND SALARY GUIDE 2009/2010 OLEH KELLY SERVICES, INC.

Temuan yang sama juga bisa kita lihat dalam survei gaji yang dilakukan oleh Majalah SWA di tahun 2010, tentang penggajian untuk staf di sejumlah sektor, dari sektor perkebunan sampai telekomunikasi. Melihat hasil itu, sudah bisa dipastikan bahwa gaji standar untuk staf itu minimal Rp 2,5 juta—artinya dua kali lebih besar dari upah minimum paling tinggi sekalipun. Bahkan, di sektor teleko-

munikasi, teknologi informasi, perbankan dan migas, gaji untuk staf itu mulai dari Rp 5 juta.

Tabel 1.8 Gaji Staf sampai Manajer di Berbagai Sektor, 2010

Sektor	Staf	Manajer Junior	Manajer
Fast Moving Consumer Good (FMCG)	Rp 2,5 – Rp 6 juta	Rp 6 – Rp 15 juta	Rp 15 – Rp 30 juta
Telekomunikasi	Rp 5 – Rp 16 juta	Rp 16 – Rp 30 juta	Rp 30 – Rp 50 juta
Teknologi Informasi	Rp 5 – Rp 10 juta	Rp 10 – Rp 20 juta	Rp 20 – Rp 40 juta
Farmasi	Rp 2,5 – Rp 6 juta	Rp 6 – Rp 15 juta	Rp 15 – Rp 30 juta
Perbankan	Rp 5 – Rp 10 juta	Rp 10 – Rp 20 juta	Rp 20 – Rp 40 juta
Migas	Rp 5 – Rp 20 juta	Rp 15 – Rp 50 juta	Rp 30 – Rp 60 juta
Asuransi	Rp 3 – Rp 7 juta	Rp 9 – Rp 15 juta	Rp 15 – Rp 25 juta
Logistik	Rp 5 – Rp 10 juta	Rp 10 – Rp 20 juta	Rp 18 – Rp 22 juta
Perkebunan	Rp 3.6 – Rp 8 juta	Rp 6 – Rp 10 juta	Rp 10 – Rp 20 juta

* DISARIKAN DARI MAJALAH SWA EDISI 14/XXVI/5-14 JULI 2010

Dengan mendasarkan pada dua standar gaji, yang sering dijadikan rujukan oleh para pekerja, maka bisa dipastikan bahwa penentuan standar upah adalah hal yang lumrah untuk pekerja professional—dimana jurnalis merupakan bagian di dalamnya. Upah minimum benar-benar diperlakukan sebagai batas bawah, tidak untuk dijadikan sebagai upah yang diberikan kepada karyawan. Jika kita melihat standar penggajian dan realisasi dari gaji di sejumlah sektor, maka bisa dilihat bahwa sektor lain memiliki standar yang lebih tinggi.

Jika kita mengkomparasikan antara gaji terendah jurnalis di Medan (Rp 500 ribu), Jayapura (Rp 300 ribu), Yogyakarta (Rp 600 ribu), Kediri (Rp 300 ribu), Kendari (Rp 700 ribu), Bandar Lampung (Rp 500 ribu), Palu (Rp 300 ribu), Semarang (Rp 700 ribu), dan Surabaya (Rp 875 ribu), tentu saja masih berada di bawah upah terendah bagi IT Administrator. Dengan masa kerja yang berkisar 1 sampai 3 tahun, pendidikan Strata-1, ia bisa mendapat Rp 4 juta. Bahkan, gaji jurnalis masih kalah dari standar terendah dari Bank Operation Officer, dengan masa kerja 1 tahun, yang bisa mendapatkan Rp 1.750.000.

1.3 Upah Jurnalis di Sejumlah Negara

Bagaimana dengan upah jurnalis di luar negeri? Sebut saja Amerika Serikat, yang jurnalisnya menjadi kiblat utama

sejumlah negara. Apakah ada standar khusus yang diberikan kepada jurnalis? Dengan keterbatasan referensi yang tersedia soal ini⁷, sebagian besar bahan-bahan tentang masalah ini banyak mendasarkan pada riset internet dan wawancara.

Mesin pencari Google adalah tempat bertanya paling umum bagi jurnalis yang sangat akrab dengan internet, dalam soal apapun. Apa jawaban dari Google saat ditanya soal upah untuk jurnalis (dengan menggunakan kata kunci *salary for journalist*? Mesin pencari itu menemukan 7.640.000 hasil dalam 0,12 detik. Melalui mesin pencari Yahoo, hasilnya ditemukan 6.230.000 item. Dengan pencarian di bing (mesin pencari milik Microsoft), ditemukan 6.090.000 item soal ini. Dari tiga mesin pencari itu, salah satu yang dirujuk oleh ketiganya dalam urutan teratas adalah payscale (www.payscale.com), setelah itu www.indeed.com.

Menurut payscale.com, gaji jurnalis di Amerika Serikat berdasarkan data 24 Maret 2011, antara US\$ 25,542 (Rp 217.183.626) sampai US\$ 45,517 (Rp 387.031.051) per tahun atau antara Rp 18.098.635 sampai Rp 32.252.587 per bulan⁸. Ini sudah termasuk bonus, profit *sharing* dan *commision*. *Salary* ini merupakan perkiraan gaji, seperti disebut [payscale](http://payscale.com), berdasarkan jurnalis yang memiliki masa kerja yang bervariasi, dari kurang 1 tahun sampai yang sudah lebih dari 20 tahun. Data yang dirilis [payscale](http://payscale.com) ini diambil dari sampel upah jurnalis yang mayoritas memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun sampai 4 tahun, yang jumlahnya 67 persen.

7 Referensi soal kesejahteraan jurnalis tak mudah ditemui. Buku-buku tentang jurnalisisme yang banyak beredar lebih banyak berisi tema tentang isu profesionalisme dan bisnis media.

8 Data berdasarkan kurs tertanggal 11 Mei 2011, dengan menggunakan rate yang dibuat oleh Bank Indonesia. Lihat <http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/Kurs+Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/>, yang kodenya USD, pada tanggal 11 Mei 2011 adalah 1 US\$ sama dengan Rp 8.589.00 untuk jual, dan Rp 8,503.00 untuk beli. Menurut [Indeed.com](http://indeed.com), rata-rata gaji jurnalis di Amerika Serikat US\$ 45.000. Itu berdasarkan data yang di-*update* sampai April 2011. Seperti umumnya rata-rata, biasanya diambil dari rentang tengah antara gaji yang terendah dengan gaji tertinggi. Untuk reporter di Amerika Serikat, rata-rata gajinya adalah US\$ 33.000 setahun, video editor US\$ 49.000 setahun, dan penulis senior US\$ 63.000 setahun.

Tabel 1.9 Enam Kota yang Gaji Journalisnya Secara Rata-rata Tinggi di Amerika Serikat, 2010⁹

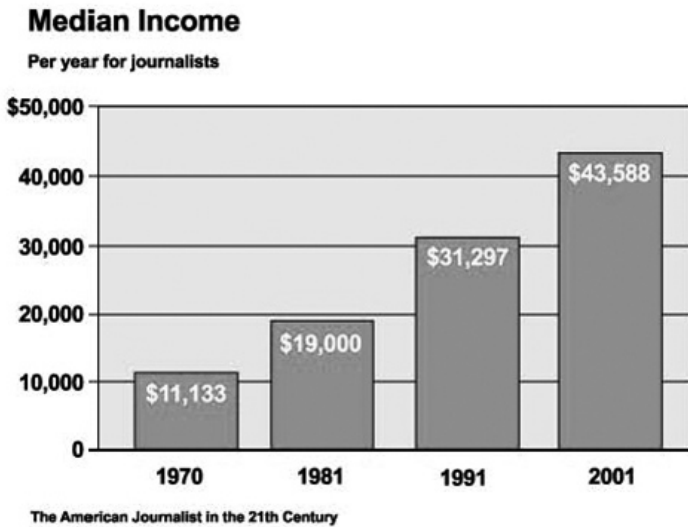
Ranking	Kota, Negara Bagian	Taksiran Gaji (dalam US\$)	Taksiran Gaji (dalam Rp.)
1	New York, New York	US\$ 31,131 - \$58,326	Rp 264.706.893 – Rp 495.945.978
2	Atlanta, Georgia	US\$ 27,514 - \$53,920	Rp 233.951.542 – Rp 458.481.760
3	San Francisco, California	US\$ 29,479 - \$55,000	Rp 250.770.476 – Rp 467.665.000
4	Washington, DC	US\$ 29,492 - \$45,000	Rp 250.770.476 – Rp 382.635.000
5	Los Angeles, California	US\$ 29,539 - \$47,596	Rp 251.170.117 – Rp 404.708.788
6	Chicago, Illinois	US\$ 20,347 - \$35,608	Rp 173.010.541 – Rp 302.774.824

* BERDASARKAN DATA YANG DIUNDUH PADA APRIL 2011

Universitas Indiana, Amerika Serikat, tahun 2002 pernah melakukan penelitian tentang upah jurnalis di Amerika Serikat. Dari survei itu diketahui bahwa jurnalis AS rata-rata memiliki pendapatan US\$ 43.600 per tahun. Jika dibuat rata-rata per bulan, maka nilainya sekitar US\$ 3.633. Temuan ini tak banyak berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Poynter Institute, yang menemukan bahwa upah jurnalis Amerika pada tahun itu berkisar di angka US\$ 43.000 per tahun. Poynter Institute menemukan bahwa dengan skala gaji seperti itu, ada peningkatan upah cukup signifikan bagi jurnalis Amerika Serikat dalam 30 tahun terakhir.

9 Data dalam rupiah berdasarkan kurs tertanggal 11 Mei 2011, dengan menggunakan

Tabel 1.10 Kenaikan Upah Jurnalis Amerika Serikat dari Tahun 1970 sampai 2001



Temuan senada juga bisa dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Dr. Lee B. Becker, seorang profesor di Grady College of Journalism and Mass Communication, University of Georgia, dan Direktur James M. Cox Jr. Center for International Mass Communication Training and Research di Grady College, yang hasilnya dipublikasikan dalam *The Annual Survey of Journalism & Mass Communication Graduates*.

Di tahun 1997, upah untuk lulusan jurnalistik yang bekerja di surat kabar sekitar US\$ 21.000 setahun, yang kemudian naik menjadi US\$ 26.000 di tahun 2004. Mahasiswa baru lulus jurnalistik yang masuk di media mingguan menerima upah sedikit lebih rendah yaitu US\$ 24 ribu di tahun 2004. Jurnalis yang bekerja di radio juga bergaji lebih rendah, termasuk dari

rate yang dibuat oleh Bank Indonesia. Lihat <http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/Kurs+Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/>, yang kodenya USD, pada tanggal 11 Mei 2011 adalah 1 US\$ sama dengan Rp 8.589.00 untuk jual, dan Rp 8.503.00 untuk beli.

mingguan, yaitu US\$ 23.000 per tahun. Mahasiswa baru lulus yang paling besar gajinya adalah yang masuk di TV kabel, yaitu mendapat US\$ 30 ribu. Hasil lengkapnya, ada di bawah ini:

Tabel 1.11 Gaji Lulusan Sekolah Jurnalistik di Amerika Serikat (1997-2004)

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Koran Harian								
Gaji nominal/minggu	\$404	\$434	\$480	\$500	\$498	\$481	\$490	\$500
Gaji nominal/tahun	\$21,000	\$22,560	\$24,960	\$26,000	\$25,896	\$25,000	\$25,480	\$26,000
Gaji riil	\$13,812	\$14,604	\$15,672	\$15,758	\$15,509	\$14,664	\$14,496	\$14,389
Mingguan								
Gaji nominal/bulan	\$378	\$389	\$404	\$440	\$462	\$423	\$462	\$462
Gaji nominal/tahun	\$19,630	\$20,250	\$21,000	\$22,880	\$24,000	\$22,000	\$24,000	\$24,000
Gaji riil	\$12,911	\$13,109	\$13,186	\$13,867	\$14,373	\$12,905	\$13,654	\$13,282
Radio								
Gaji nominal/bulan	\$385	\$399	\$433	\$450	\$481	\$462	\$462	\$442
Gaji nominal/tahun	\$20,000	\$20,750	\$22,500	\$23,400	\$25,000	\$24,000	\$24,000	\$23,000
Gaji riil	\$13,154	\$13,433	\$14,128	\$14,182	\$14,972	\$14,078	\$13,654	\$12,729
Televisi								
Gaji nominal/bulan	\$360	\$350	\$384	\$420	\$413	\$423	\$423	\$452
Gaji nominal/tahun	\$18,720	\$18,200	\$19,968	\$21,840	\$21,500	\$22,000	\$22,000	\$23,492
Gaji riil	\$12,312	\$11,782	\$12,538	\$13,237	\$12,876	\$12,905	\$12,517	\$13,001
Televisi Kabel								
Gaji nominal/bulan	\$404	\$442	\$450	\$481	\$538	\$548	\$538	\$577
Gaji nominal/tahun	\$21,000	\$23,000	\$23,400	\$25,012	\$28,000	\$28,500	\$28,000	\$30,000
Gaji riil	\$13,812	\$14,889	\$14,693	\$15,159	\$16,769	\$16,717	\$15,930	\$16,603

BAHAN: THE ANNUAL SURVEY OF JOURNALISM & MASS COMMUNICATION GRADUATES

Upah jurnalis Amerika Serikat memang tak sepadan untuk diperbandingkan dengan gaji jurnalis di Indonesia. Dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, tentu saja kurang proporsional membandingkan keduanya. Tanpa melihat secara detail kita bisa memastikan bahwa gaji rata-rata jurnalis Amerika Serikat pasti lebih besar dari upah para koleganya di negara-negara berkembang.

Di Filipina, situasinya hampir sama dengan Indonesia. Di negara itu juga tidak ada standar upah untuk jurnalis. Pengupahannya merujuk pada standar upah minimum yang masing-masing wilayah berbeda satu dengan yang lainnya. Stan-

dar upah minimum yang terbesar adalah untuk pekerja yang berada di kota besar seperti Manila, yang besarnya P 404 per hari—sekitar US\$ 9. Upah terendah adalah di daerah otonomi Mindanao, dengan P 222. Standar itu tentu saja jauh berbeda dengan standar hidup di masing-masing daerah itu¹⁰. Di Manila, kebutuhan hidupnya P 917, Mindanao P 1.322.

Upah jurnalisnya, seperti juga halnya di Indonesia, juga tergantung pada statusnya. Mereka yang menjadi karyawan tetap, berbeda dengan yang berstatus koresponden. Di MindaNews, jurnalis yang menjadi karyawan tetap mendapat upah bulanan P 10.000 per bulan (sekitar US\$ 238¹¹). Untuk yang bekerja di SunStar, upah per bulannya rata-rata P 8.000 per bulan (US\$190). Untuk yang bekerja di koran komunitas Iloilo, gaji bulannya berkisar antara P 6.000 (US\$142) sampai P 8.000 per bulan (US\$190)¹².

Di Malaysia, standar pengupahan terhadap jurnalisnya lebih baik. Ini mungkin salah satunya dipengaruhi oleh sistem pers negeri itu yang cukup ketat sehingga hanya beberapa perusahaan surat kabar saja yang bisa eksis¹³. Menurut data

10 Situasinya hampir sama dengan Indonesia. Masing-masing daerah memiliki upah minimum yang berbeda dengan daerah lainnya. Inilah upah minimum regional dan kebutuhan hidup di Filipina. Ini merupakan salah satu materi yang dipresentasikan dalam workshop NUJP/IFJ bertema Developing a Module on Campaigning for Journalists and Workers' Welfare pada 4 Mei 2011, San Antonio, Zambales, Filipina.

Wilayah	Upah Minimum Regional (data April 2011)	Kebutuhan Hidup (data September 2008)
Kota Besar	P 404	P 917
Region IV-A	P 253-337	P 809
Region VII	P 240-285	P 910
Region X	P 254-269	P 818
Daerah Otonomi Mindanao	P 222	P 1.322

11 Berdasarkan kurs di Manila, Filipina, pada tanggal 7 Mei 2011.

12 Bahan-bahan workshop NUJP/IFJ bertema Developing a Module on Campaigning for Journalists and Workers' Welfare, 2-7 Mei 2011, di San Antonio, Zamboaga, Filipina.

13 Di Indonesia, lisensi untuk surat kabar tak lagi diperlukan sejak tahun 1999. Khusus untuk media penyiaran, harus ada izin frekuensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari Komisi Penyiaran

www.pressreference.com, jumlahnya hanya 32 surat kabar—1 di antaranya bukan surat kabar harian. Jurnalis di sana rata-rata mendapatkan upah 1.800 Ringgit atau sekitar Rp 5.124.600 per bulan.¹⁴

Indonesia. Di Filipina, lisensi untuk surat kabar juga tak diperlukan. Bedanya dengan di Indonesia adalah pada perizinan media penyiaran. Di sana, izin untuk stasiun televisi dan radio tak datang dari pemerintah, melainkan dari Kongres. Menurut Ketua Umum NUJP Nestor P. Burgos Jr., inilah yang membuat surat kabar bisa lebih berani atau bersikap keras terhadap politisi di Filipina. Di Malaysia, surat kabar dan media penyiaran harus memiliki lisensi dari Kementerian Dalam Negeri yang harus diperbarui setiap tahun.

- 14 Data berdasarkan kurs tertanggal 11 Mei 2011, dengan menggunakan rate yang dibuat oleh Bank Indonesia. Lihat <http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/Kurs+Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/>. Kurs Dolar Singapura, yang kodenya SGD, pada tanggal 11 Mei 2011 adalah 1 Dolar Singapura sama dengan Rp 6.981.79 untuk jual dan Rp 6.910.76 untuk beli. Menurut Payscale, kisaran gaji jurnalis di Malaysia adalah RM 21.225 (Rp 60.427.575) - RM 48.834 (Rp 139.030.398) per tahun. Kuala Lumpur, ibukota Malaysia, adalah tempat di mana jurnalis menerima upah paling tinggi di Malaysia, dengan kisaran RM 19.800 (Rp 56.370.600)-RM 68.240 (Rp 194.279.280). Sedangkan gaji jurnalis Singapura, menurut payscale, berkisar antara S\$ 23.797 (Rp 164.437.270)-S\$36,386 (Rp 251.427.260). Data kurs S\$ berdasarkan kurs tertanggal 11 Mei 2011, dengan menggunakan rate yang dibuat oleh Bank Indonesia. Lihat <http://www.bi.go.id/web/en/Moneter/Kurs+Bank+Indonesia/Kurs+Transaksi/>. Kurs Dolar Singapura, yang kodenya SGD, pada tanggal 11 Mei 2011 adalah 1 Dolar Singapura sama dengan Rp 6.981.79 untuk jual dan Rp 6.910.76 untuk beli.

BAB II

Upah Layak dan Upah Nyata

SURVEI yang dilakukan sejumlah lembaga sejak tahun 2000 dan sesudahnya memberikan gambaran cukup terang bagaimana tingkat kesejahteraan jurnalis Indonesia. Dari empat survei yang pernah dilakukan, hanya hasil temuan Thomas Hanitzsch yang memberi gambaran cukup menggembirakan tentang postur ekonomi jurnalis. Dua penelitian lainnya, yang dilakukan AJI Surabaya dan AJI bersama IFJ, memberikan kesan yang sebaliknya.

Dalam temuan hasil survei AJI dan IFJ, sebagian kecil jurnalis (25%) di Palu, Sulawesi Tengah memperoleh upah kurang dari Rp 200 ribu. Sebagian besar jurnalis (55%) di daerah itu menerima upah berkisar antara Rp 200 ribu sampai Rp 599 ribu. Padahal, upah minimum di provinsi tersebut di tahun 2005 sebesar Rp 450 ribu¹. Artinya, sekitar 75 persen upah jurnalis di wilayah itu berada di kisaran upah minimum, kalau bukan berada di bawahnya.

Contoh lainnya adalah gaji jurnalis di Bali. Menurut survei AJI dan IFJ, sekitar 25% jurnalis di daerah itu menerima upah

1 AJI Indonesia dan IFJ, Potret Jurnalis Indonesia.: Survey AJI Tahun 2005 tentang Media dan Jurnalis Indonesia di 17 Kota, Jakarta, Agustus 2006, hal12.

antara Rp 200 ribu sampai Rp 599 ribu. Prosentase terbesar (40%) adalah jurnalis yang menerima upah sebesar Rp 600 sampai Rp 999 ribu. Pada tahun 2005, upah minimum di daerah yang menjadi tujuan wisata favorit turis mancanegara itu sebesar Rp 447.500. Artinya, seperlima jurnalis di daerah itu menerima upah di sekitar angka rata-rata upah minimum—kalau bukan berada di bawahnya.

Melihat sejumlah fakta hasil penelitian, bisa ditarik benang merah yang cukup kuat bahwa banyak pengusaha media benar-benar menjadikan upah minimum di daerah itu sebagai rujukan penggajian. Secara hukum, tindakan seperti ini tidak melanggar regulasi apapun. Namun, menerapkan standar rendah (karena menggunakan patokan upah minimum) jelas tak proporsional dengan tanggungjawab besar terhadap mereka yang memilih profesi ini².

Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup minimum, besaran upah minimum yang disahkan pemerintah memang dekat dengan kebutuhan hidup minimum. Ambil contoh Bali. Di tahun 2005, upah minimum daerah itu sama persis dengan kebutuhan hidup minimum: Rp 447.500. Hanya saja, standar kebutuhan hidup minimum yang dibuat pemerintah dinilai terlalu rendah dan tak memadai untuk hidup layak—termasuk untuk jurnalis. Inilah yang menjadi salah satu pemicu bagi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) untuk memperkenalkan standar upah tersendiri—yang dikenal dengan upah layak un-

2 Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menyebut tentang peran pers, yaitu a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asas Manusia, serta menghormati kebhinekaan; c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Soal tanggungjawab jurnalis terhadap profesinya, lihat prinsip-prinsip yang diuraikan dengan sangat baik oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam Sembilan Elemen Jurnalisme, yang diterbitkan dalam edisi Indonesia oleh Yayasan Pantau, Jakarta, Oktober 2003.

tuk jurnalis³.

II.1 Upah Layak Jurnalis Tahun 2011

Upaya rintisan untuk menggagas upah layak ini sudah dimulai sekitar 4 tahun lalu. Awalnya dimulai dari Jakarta pada tahun 2006. Model perumusan upah layak, secara prinsip tak jauh beda dengan yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan saat menghitung komponen upah minimum. Bedanya adalah pada item-item kebutuhan yang dimasukkan dalam komponen standar kebutuhan hidup layak. Saat hasil upah layak ini diumumkan, reaksinya cukup beragam. Sebagian jurnalis menganggap perumusan standar upah layak ini sebagai upaya positif untuk “menandingi” standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Komponen yang diperhitungkan adalah semua kebutuhan hidup sehari-hari. Selain kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, perumahan, serta sandang, AJI juga memasukkan sejumlah komponen yang dianggap sangat penting untuk menunjang jurnalis dalam menjalankan profesinya. Antara lain, pengadaan alat seperti komputer dan bahan bacaan berupa langganan koran, majalah, internet serta membeli buku.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, survei upah layak tahun 2011 melibatkan 17 kota secara serentak. Survei dilakukan dalam kurun waktu Desember 2010 sampai Januari 2011. Untuk survei kebutuhan hidup layak, yang kemudian dijadikan sebagai ukuran upah layak minimum untuk jurnalis, menggunakan patokan harga barang di pasar tradisional dan modern. Inilah hasil lengkap survei kebutuhan hidup layak

3 Selain upah minimum, ada juga standar untuk upah yang lebih spesifik untuk pekerjaan tertentu. Hanya saja, menurut Koordinator Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia Winuranto Adhi, perbedaan antara upah minimum dengan sektoral itu masih terbilang kecil dan kurang signifikan. Menurut taksiran Winuranto Adhi, upah sektoral hanya lebih besar sekitar 7 persen dari upah minimum.

jurnalis di 16 kota itu:

Tabel II.1 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Versi AJI Tahun 2011

	Makanan & Minuman	Perumahan & Fasilitas	Sandang	Kebutuhan Lain	Tabungan	Total
Batam	Rp 1.528.500	Rp 400.000	Rp 209.100	Rp 1.402.930	Rp 354.053	Rp 3.894.583
Medan	Rp 1.528.500	Rp 400.000	Rp 209.100	Rp 1.402.930	Rp 354.053	Rp 3.894.583
Denpasar	Rp 1.528.500	Rp 400.000	Rp 209.100	Rp 1.402.930	Rp 354.053	Rp 3.894.583
Jayapura	Rp 2,964,900	Rp 650.000	Rp 199.833	Rp 2.016,467	Rp 583.120	Rp 6.414.320
Yogyakarta	Rp 1.140.200	Rp 200.000	Rp 435.000	Rp 1.086.600	Rp 286.180	Rp 3.147.980
Kediri	Rp 980.000	Rp. 250.000	Rp. 221.800	Rp 1.126.000	Rp 257.869	Rp 2.836.557
Kendari	Rp 1.115000	Rp 250.000	Rp 505.000	Rp 1.102,000	Tidak ada	Rp 2.972.000
Kupang	Rp 1.454.975	Rp 250.000	Rp 657.300	Rp 1.209.750	Rp 357.203	Rp 3.929.228
Bandar Lampung	Rp 1.070.050	Rp 250.000	Rp 147.465	Rp 867.450	Rp 233.497	Rp 2.568.462
Palu	Rp 921.400	Rp 300.000	Rp 213.083	Rp 715.583	Tidak ada	Rp 2.150.066
Pekanbaru	Rp 1.384.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 1.193.000	Rp 327.700	Rp 3.604.700
Pontianak	Rp 2.740.000	Rp 250.000	-	Rp 216.000	Rp 320.600	Rp 3.526.600
Semarang	Rp 1.260.800	Rp 250.000	Rp 186.528	Rp 1.248.200	Rp 294.553	Rp 3.240.081
Surabaya	Rp 1.324.000	Rp 300.000	Rp 798.000	Rp 1.091.500	Rp 351.350	Rp 3.864.850
Jakarta	Rp 1.698.730	Rp 700.000	Rp 300.062	Rp 1.477.435 (+cicilan laptop Rp 140.972)	Rp 431.720	Rp 4.748.919

BAHAN: HASIL SURVEI AJI DI 16 KOTA, 2011

Melihat lebih detail ke dalam item kebutuhan upah layak yang disusun AJI, bisa dipastikan bahwa itu merupakan kebutuhan yang sangat standar. Untuk makanan dan minuman, misalnya, menggunakan asumsi tiga kali makan dalam sehari, untuk 90 hari dalam sebulan. Dari survei di 15 kota yang dilakukan pada Desember 2010 dan Januari 2011, angka untuk kebutuhan makan itu bervariasi, dari Rp 921 ribu sampai tertinggi Rp 2,9 juta. Kebutuhan minuman ekstra selama bekerja, buah-buahan, kopi, gula pasir, teh dan susu, adalah jenis kebutuhan yang masuk dalam komponen “makanan dan minuman”.

Untuk komponen perumahan, dananya dipakai untuk biaya sewa kamar non-ac, yang harganya berkisar antara Rp 250 ribu sampai yang tertinggi Rp 700 ribu. Angka ini merupakan standar tempat kos dengan tanpa AC. Jika itu diberikan untuk jurnalis di Jakarta, harga Rp 700 ribu itu merupakan garis tengah antara harga terendah dengan harga yang lebih tinggi. Itu pun juga sangat tergan-

tung dari lokasi tempat kosnya. Semakin dekat ke pusat kota, atau kawasan bisnis, harganya jauh berbeda dengan tempat kos serupa di lokasi yang lebih di pinggiran kota.

Mengenai kebutuhan untuk kategori sandang, jumlahnya juga bervariasi. Nilai yang terendah adalah Rp 147 ribu, tertinggi Rp 798 ribu. Komponen dalam kebutuhan ini meliputi pembelian celana panjang, kemeja, kaus dalam atau bra, celana dalam, sepatu kerja, handuk mandi dan kaus kaki. Kebutuhannya juga tak bisa dibilang banyak. Untuk celana panjang, hanya membeli sekali untuk enam bulan⁴. Begitu juga dengan kemeja atau blus serta sepatu kerja. Dalam standar upah layak AJI, jurnalis setidaknya mendapat jatah untuk membeli celana panjang/rok, kemeja/blus “hanya” dua kali dalam setahun. Untuk kaus dalam dan bra, jatahnya membeli satu buah dalam tiap bulan.

Kebutuhan yang jauh lebih bervariasi jumlahnya adalah pada item “aneka kebutuhan lain”. Besarnya berkisar antara Rp 216 ribu sampai Rp 1,4 juta. Komponen dalam item ini adalah: transportasi kerja, komunikasi, internet, kesehatan & kebersihan, potong rambut, dana sosial kemasyarakatan, rekreasi dan bacaan. Kalau kita teliti lebih rinci, apa yang disebut dalam daftar ini memang merupakan kebutuhan yang sangat jamak bagi jurnalis.

Ambil contoh wartawan di Jakarta. Salah satu komponen yang ada di dalam komponen “aneka kebutuhan lain” adalah dana sosial masyarakat yang besarnya Rp 100 ribu, dana rekreasi Rp 150 ribu dan untuk dana bacaan sebesar Rp 200 ribu. Dalam survei AJI Jakarta, komponen “dana sosial” itu dimaksudkan sebagai dana bantuan untuk kolega atau teman yang tertimpa musibah atau yang sedang menikmati saat bahagia –misalnya, menikah. Dalam kenyataan, nominal seperti itu sudah tergolong angka rata-rata –meski cenderung ke jumlah minimal, untuk sumbangan kepada kolega.

4 Dengan kalkulasi seperti itu, maka biayanya adalah membagi harga itu menjadi enam komponen. Misalnya, seperti AJI Batam ada komponen celana panjang atau rok merek Nevada. Dengan harga barang itu sekitar Rp 236 per buah, maka dalam komponen kebutuhan layak bulanan dibagi sebesar Rp 39.300 untuk selama enam bulan itu. Begitu pula dengan komponen harga lainnya.

Yang disebut dalam komponen dana rekreasi juga beragam besarnya. Beberapa di antaranya adalah digunakan untuk hiburan menonton bioskop, membeli kaset, VCD dan DVD. Dalam sekali nonton bioskop, biaya yang dibutuhkan bisa lebih dari Rp 50 ribu. Tiketnya mungkin murah, dari Rp 15 ribu sampai Rp 30 ribu. Tapi biaya lain-lainnya, makanan atau minuman, malah kerap lebih besar dari harga tiket itu. Begitu juga dengan kebutuhan membeli CD dan DVD. Rata-rata CD lagu Indonesia, harganya berkisar dari Rp 25 sampai 75 ribu. Hanya saat diskon saja harganya bisa kurang dari itu. Untuk CD lagu luar negeri, harga rata-ratanya sudah di atas Rp 75 ribu.

Begitu juga dengan kebutuhan untuk bacaan. Dalam komponen upah disebutkan bahwa anggaran untuk item ini digunakan untuk untuk membeli buku, majalah, atau koran. Dengan dana Rp 200 ribu, nominal itu sebenarnya sangat pas-pasan: untuk langganan satu koran (yang harganya sekitar Rp 70 ribu sampai Rp 100 ribu), 1 majalah Rp 30 ribu, dan 1 sampai 2 buku terbitan dalam negeri⁵.

Dengan meneliti komponen-komponen kebutuhan dari upah layak itu, kita bisa melihat bahwa itu merupakan kebutuhan riil yang pantas untuk diminta jurnalis. Jika selama ini besaran standar upah layak AJI memiliki besar jauh di atas upah minimum kota atau provinsi yang ditetapkan pemerintah, itu semata karena sejumlah komponen dan nominal sejumlah item kebutuhan yang dimasukkan di dalam struktur pengupahannya berbeda.

II.2 Upah Jurnalis: Masih Jauh dari “Ideal”

Apakah ada standar pengupahan untuk jurnalis di Indonesia? Jawabannya jelas: tidak ada. Dengan situasi seperti itu, maka yang dijadikan rujukan utama adalah upah minimal yang ditetapkan pemerintah yang berbeda di masing-masing provinsi. Perusahaan media, seperti halnya sejumlah perusa-

5 Untuk buku impor, alokasi dana sebesar Rp 70 ribu tentu saja tak memadai, kecuali sedang ada obral atau diskon besar. Sebab, harga buku impor berkisar dari Rp 150 sampai Rp 500 ribu.

haan di sektor lain, umumnya dengan senang hati menjadikan upah minimum ini sebagai rujukan. Ada yang memang benar-benar “patuh” menerapkannya, tapi tak sedikit yang menjadikannya sebagai batas bawah sekadar untuk perkiraan dalam penggajian, yang dalam kenyataan biasanya memberi gaji lebih besar dari itu.

Realitas di lapangan memang menunjukkan hal yang seringkali berbeda dengan harapan dalam soal upah jurnalis. Setidaknya, itulah yang bisa kita lihat dari hasil survei yang dilakukan AJI di tahun 2000 dan 2005 serta Dewan Pers di tahun 2008. Masih adanya jurnalis yang digaji di bawah Rp 200 ribu per bulan, memperlihatkan bahwa sejumlah media menggaji dengan upah jauh dari layak. Menilik pada hasil penelitian yang dilakukan AJI, jurnalis yang diupah sangat rendah itu bekerja di media yang sebenarnya secara ekonomi memang tak layak tapi masih tetap bertahan hidup. Bisa dipastikan, jurnalis yang bergaji buruk—di bawah upah minimum—itu umumnya bekerja di media yang bukan *mainstream*⁶.

Coba lihat survei upah jurnalis yang baru diangkat yang dibuat oleh AJI Jakarta dalam peluncuran upah layak tahun 2010. Semua media yang disurvei memberi gaji melebihi upah minimum provinsi. Tapi, apakah sesuai dengan standar upah layak versi AJI Jakarta di tahun 2010 yaitu Rp 4,6 juta sebagai standar upah yang pantas? Sayangnya, hanya sebagian kecil saja yang bisa dianggap memenuhi standar upah itu.

6 Media *mainstream* merupakan kosakata jamak bagi Indonesia pasca Orde Baru. Media *mainstream* merujuk pada media yang eksis, bertahan dan terus bertumbuh, yang biasanya dimiliki oleh perusahaan atau korporasi yang bermodal besar. Media yang tak disebut *mainstream* merujuk pada media yang dikelola oleh individu atau sejumlah pengusaha yang secara permodalan sebenarnya pas-pasan untuk bisa benar-benar bergelut di bidang media. Malah, ada media yang didirikan dengan modal nekat, yang masih tetap eksis karena longgarnya regulasi di bidang persuratkabaran—yang ini relatif berbeda dengan bidang teve dan radio.

Tabel II.2 Perbandingan Gaji Jurnalis Baru, UMP, dan Upah Layak AJI

Media	Jenis Media	UMP 2010	Upah Riil 2010	Upah Layak AJI 2010
Harian Bisnis Indonesia	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 4.979.280	Rp 4,6 juta
Harian Kompas	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 5.500.000	Rp 4,6 juta
Tabloid Kontan	Mingguan	Rp 1.118.009	Rp. 3.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Republika	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.300.000	Rp 4,6 juta
Harian Jurnal Nasional	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.500.000	Rp 4,6 juta
LKBN Antara	Kantor Berita	Rp 1.118.009	Rp. 2.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Seputar Indonesia	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.250.000	Rp 4,6 juta
Koran Tempo	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Indopos	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 3.300.000	Rp 4,6 juta
Harian Pos Kota	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 1.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Berita Kota	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.800.000	Rp 4,6 juta
Harian Warta Kota	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Jakarta Globe	Harian (berbahasa Inggris)	Rp 1.118.009	Rp. 5.500.000	Rp 4,6 juta
Harian Rakyat Merdeka	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.000.000	Rp 4,6 juta
Harian Sinar Harapan	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.000.000	Rp 4,6 juta
Majalah Swa	Bulanan	Rp 1.118.009	Rp. 2.696.990	Rp 4,6 juta
Majalah Gatra	Mingguan	Rp 1.118.009	Rp. 2.500.000	Rp 4,6 juta
TPI/MNC TV	Televisi	Rp 1.118.009	Rp. 2.400.000	Rp 4,6 juta
Trans TV	Televisi	Rp 1.118.009	Rp. 2.500.000	Rp 4,6 juta
SCTV	Televisi	Rp 1.118.009	Rp. 2.500.000	Rp 4,6 juta
DAAI TV	Televisi	Rp 1.118.009	Rp. 2.480.000	Rp 4,6 juta
Radio KBR 68H	Radio	Rp 1.118.009	Rp. 3.300.000	Rp 4,6 juta
I Radio	Radio	Rp 1.118.009	Rp. 2.400.000	Rp 4,6 juta
Radio Sonora FM	Radio	Rp 1.118.009	Rp. 3.300.000	Rp 4,6 juta
Hukumonline.com	Online	Rp 1.118.009	Rp. 1.600.000	Rp 4,6 juta
Kompas.com	Online	Rp 1.118.009	Rp. 2.700.000	Rp 4,6 juta
Detik.com	Online	Rp 1.118.009	Rp 2.400.000	Rp 4,6 juta
Vivanews.com	Online	Rp 1.118.009	Rp. 2.600.000	Rp 4,6 juta
Okezone.com	Online	Rp 1.118.009	Rp 2.300.000	Rp 4,6 juta
TVOne	Televisi	Rp 1.118.009	Rp 3.500.000	Rp 4,6 juta

BAHAN: HASIL SURVEI AJI JAKARTA, 2010

Melihat hasil pendataan tersebut, jelas terlihat bahwa gaji jurnalis di media-media *mainstream* itu sudah berada di atas upah minimum provinsi di Jakarta tahun 2010 yaitu Rp 1.118.009. Namun yang perlu dicatat, upah itu diterima jurnalis yang bekerja di media yang modalnya sudah memadai. Survei itu belum menunjukkan kondisi kesejahteraan jurnalis yang bekerja di media dengan manajemen yang tak jelas atau malah asal-asalan. Jika kita melihat media di Jakarta, tentu

saja kita tak hanya bicara tentang media yang bentuk fisiknya bisa kita lihat di *outlet* media atau toko buku seperti Gramedia, Periplus, Gunung Agung, Kinokuniya, dan sebagainya. Ada sejumlah media yang justru hanya diedarkan terbatas dan oplah yang sedikit, yang namanya mungkin bagi sebagian orang masih sangat asing dan malah mungkin tak pernah dijumpai.

Biasanya, media-media yang “tak jelas” seperti ini menjadikan urusan kesejahteraan jurnalisnya sebagai urusan kesekian. Seringkali, gaji jurnalisnya tak diberikan secara reguler, yang umumnya bulanan, tapi sangat tergantung kepada berapa oplah dari medianya yang terjual atau. Dan yang lebih parah, malah ada media yang meminta jurnalisnya mencari gaji sendiri—umumnya dengan meminta uang dari narasumber— dengan kartu pers yang dimilikinya. Media-media semacam inilah yang seringkali dikritik sebagai perusak citra media di Indonesia. Tapi praktik ini tak mudah diselesaikan. Sebab, undang-undang kita tak melarang orang membuat media, bahkan bagi mereka yang bermodal pas-pasan. Hanya jika mereka tertangkap tangan melakukan tindak pidana, umumnya berupa pemerasan kepada narasumber, yang membuat medianya berakhir—atau bisa tetap hidup dengan menggunakan nama baru.

Lalu, bagaimana dengan kondisi pengupahan jurnalis di sejumlah daerah di tahun 2011? Inilah temuan AJI soal upah jurnalis di sejumlah daerah tersebut. Hasil pemetaan upah layak yang dilakukan pada periode Desember 2010 sampai Januari 2011 ini merupakan bagian dari hasil survei yang dilakukan untuk menentukan upah layak AJI tahun 2011. Hasilnya memang sangat bervariasi di tiap kota. Pola umumnya, jurnalis di kota besar memiliki peluang untuk mendapatkan upah yang lebih besar meski tak selalu dapat diartikan sebagai layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Tabel II.3 Upah Riil Jurnalis di 15 Kota di Indonesia Tahun 2011

	Suratkabar, TV & Radio	Upah Layak AJI 2011	Upah Minimum 2010	Upah Minimum 2011
Batam	Rp 1,1 juta – Rp 2,7 juta	Rp 4.243.030	Rp 925.000	Rp 1.180.000
Medan	Rp 500 ribu – Rp 1,8 juta	Rp 3.816.120	Rp 965.000	Rp 1.197.000
Denpasar	Rp 1 juta – Rp 2 juta	Rp 3.894.583	Rp 829.316	Rp 1.191.500
Jayapura	Rp 300 ribu – Rp 1,5 juta	Rp 6.414.320	Rp 1.316.500	Rp 1.316.500
Yogyakarta	Rp 600 ribu – Rp 1,7 juta	Rp 3.147.980	Rp 745.695	Rp 808.000
Kediri	Rp 300 ribu – Rp 1,7 juta	Rp 2, 84 juta	Rp 630.000	Rp 973.950
Kendari	Rp 70 ribu – Rp 900 ribu	Rp 2.972.000	Rp 860.000	Rp 970.000
Kupang	Rp 650 ribu – Rp 1,7 juta	Rp 3.929.228	Rp 800.000	Rp 850.000
Bandar Lampung	Rp 500 ribu – Rp 1,3 juta	Rp 2568.462	Rp 767.500	Rp 865.000
Palu	Rp 300 ribu – Rp 1,5 juta	Rp 2.150.066	Rp 777.500	Rp 827.500
Pekanbaru	Rp 1 juta – Rp 1,8 juta	Rp 3.604.700	Rp 1.016.000	Rp 1.135.000
Pontianak	Rp 1 juta – Rp 2 juta	Rp 3.526.600	Rp 741.000	Rp 895.000
Semarang	Rp 700 ribu – Rp 1,8 juta	Rp 3.240.081	Rp 660.000	Rp 961.323
Surabaya	Rp 875 ribu – Rp 2 juta	Rp 3.864.850	Rp 630.000	Rp 1.115.000
Makassar	Rp 875 ribu – Rp 2 juta	Rp 4.037.226	Rp 1.000.000	Rp 1.100.000
Jakarta		Rp 4.748.919	Rp 1.118.009	Rp 1.290.000

* BAHAN: KOMPILASI HASIL SURVEI UPAH RIIL JURNALIS 16 KOTA, 2011

Dengan melihat hasil itu, ada sejumlah pola yang masih bisa dilihat dalam struktur pengupahan jurnalis di Indonesia. Jika membandingkan dengan sejumlah survei sebelumnya, ada hal yang tak berubah dalam pola ini, yaitu masih ada sejumlah kota yang menggaji jurnalisnya di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Sebut saja Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Upah minimum di Sumatera Utara tahun 2010 adalah Rp 965 ribu. Tapi, di Medan masih ada jurnalis media cetak dan radio yang digaji Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu.

Kenyataan ini bukan hanya terjadi di Medan. Di Bandar Lampung, yang upah minimumnya di tahun 2010 sebesar Rp 767.500 ribu, masih ada jurnalis teve yang digaji Rp 500 ribu. Di Nusa Tenggara Timur, juga begitu. Upah minimum provinsi daerah ini adalah Rp 800 ribu. Tapi kenyataannya, masih ada jurnalis media cetak dan televisi yang diberi upah Rp 650 ribu. Kendati pendataan ini tak dilakukan secara me-

nyeluruh karena mengambil sampel sejumlah media, namun sudah cukup untuk melihat bahwa realitas tentang penggajian jurnalis di Indonesia bukan hanya tak memiliki standar, tapi juga masih jauh dari rata-rata ideal.

Dengan melihat hasil survei di 16 kota, masih ditemui perusahaan yang menggaji jurnalisnya dengan upah yang sangat minim. Di Palu, ibukota Sulawesi Tengah, malah ada yang menerima gaji Rp 300 ribu sebulan. Ini memperkuat temuan yang dulu pernah dilakukan AJI di tahun 2005 di mana sekitar 25 persen responden di daerah itu menerima gaji kurang dari Rp 200 ribu. Sesuai data 2010, terlihat ada jurnalis yang gajinya malah di bawah upah minimum tahun sebelumnya.

II.3 Kota Batam

Jumlah penduduk	: 949.775 jiwa (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 195 miliar (2010)
APBD	: Rp 1,439 triliun (2010)
Upah Minimum Kota	: Rp 1.180.000 (2011)
Upah layak versi AJI	: Rp 4.243.030 (2011)
Jumlah media cetak	: 10 media (2010)
Jumlah media penyiaran 2010	: 19 (radio), 5 (TV)



Batam merupakan kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Luas daratannya 715 km² atau 15 persen lebih luas dari Singapura. Jumlah penduduknya berdasar sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 sebanyak 949.775 jiwa—bertambah dua kali lipat dari jumlah penduduk tahun 2000. Ketika dibangun pada awal 1970, kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk. Dalam kurun waktu 40 tahun saja, jumlah penduduk Batam tumbuh lebih dari 100 kali lipat.

Letak kota ini sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura dan Malaysia—dua negara yang menjadi

batas utara dari pulau yang pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah. Untuk menghormati jasanya, nama Hang Nadim diabadikan menjadi nama bandara di kota ini.

Pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, pulau ini ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam—atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam. Penetapan ini berdasar Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.

Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, wilayah kecamatan yang merupakan bagian dari kabupaten Kepulauan Riau ini lantas ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif di tahun 1980-an. Setelah itu, statusnya dinaikkan lagi menjadi daerah otonomi melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

Pemetaan Industri Media

Menurut data Serikat Penerbit Surat kabar (SPS)⁷ tahun 2010, di Kepulauan Riau setidaknya terdapat 12 media cetak⁸. Sebanyak 8 berupa surat kabar harian dan 4 surat kabar mingguan. Koran harian meliputi *Batam News*, *Batam Pos*, *Investigasi*, *Posmetro Batam*, *Sijori Mandiri*, *Tribun Batam*, *Posmetro Bintan* dan *Pos Metro Karimun*. Semua surat kabar harian berada di Batam. Untuk media yang berbentuk surat kabar mingguan, terdiri dari *Kepri Pos* dan *Radar Kepri* yang berada di Batam. Dua surat kabar mingguan lainnya, yaitu *Natuna Pos* terbit di Kabupaten Natuna, dan mingguan *Komunitas* berada di Tanjungpinang, ibukota Kepulauan Riau.

7 SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010, hal. 42.

8 Menurut data Dewan Pers tahun 2010, tercatat ada 17 surat kabar, tujuh radio dan dua televisi lokal.

Berdasar data Serikat Penerbit Surat kabar, dalam tiga tahun ini ada tren kenaikan oplah surat kabar di Kepulauan Riau⁹. Di tahun 2008, oplah surat kabar harian dan mingguan tercatat 158.975 eksemplar. Jumlah ini menjadi 165.500 di tahun berikutnya. Kenaikan lebih besar terjadi pada tahun 2010. Di tahun ini, oplah surat kabar di daerah ini menjadi 181.000 alias naik 15.500 eksemplar dari tahun sebelumnya. Dalam tiga tahun, rata-rata pertumbuhannya adalah 9,75 persen. Secara rata-rata, pertumbuhan ini lebih baik dari pada sejumlah daerah yang malah minus pertumbuhan oplahnya seperti Nanggroe Aceh Darussalam (-19,07%), Bangka Belitung (-5,15%), Nusa Tenggara Barat (-25,71%), Sulawesi Tenggara (-25%), Sulawesi Barat (-35%), dan termasuk Jakarta (-2,36%).

Tabel II.4 Tabel Oplah Surat kabar di Kepulauan Riau Tahun 2008-2010

Surat Kabar Harian			Surat Kabar Mingguan			Jumlah Total			%
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	+ / -
154.475	159.500	175.000	4.500	6.000	6.000	158.975	165.500	181.000	+9.75

BAHAN: SPS DAN INFOMEDIA DALAM MEDIA DIRECTORY 2010

Untuk televisi lokal, setidaknya ada lima stasiun yang beroperasi yaitu: *Batam Televisi*, *Semenanjung Televisi*, *Urban TV*, *Barelang TV*, dan *Hang Tuah TV*. *Batam TV* merupakan bagian dari grup Jawa Pos. Awalnya, stasiun ini anak perusahaan *Batam Pos*. Saat ini, televisi lokal pertama di Batam itu sudah mandiri. Sedangkan *Semenanjung Televisi* milik perorangan yang operasionalnya bekerja sama dengan *TVOne*, salah satu stasiun TV milik Grup Bakrie di Jakarta. *Barelang TV* merupakan TV berlangganan, *Hang Tuah TV* merupakan TV komunitas yang dikelola Sekolah Hang Tuah.

Untuk radio, jumlahnya cukup banyak. Berdasar data Wiki-

SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010.

pedia, Batam memiliki setidaknya 19 stasiun radio. Ini daftar lengkapnya: *RRI Batam 105.1 FM*; *Radio Aljabar 91.7 FM*; *Radio Key 102.3 FM*; *Radio Be 107 FM*; *Radio Batam FM 100.7*; *Radio Zoo 101.6 FM*; *Radio Discovery Minang 87.6 FM*; *Radio Sheila 104.3 FM*; *Radio Bigs 104.7 FM*; *Radio Alfa Omega 107.7 FM*; *Radio Sing 105.5 FM*; *Radio Era Baru 106.5 FM*; *Radio Salam 102.7 FM*; *Radio Hang 106 FM*; *Radio Kita 107.9 FM*; *Radio Gress 88.0 FM*; *Radio M3 103.2 FM*; *Radio RRI Studio Prod. Batam 90.9 FM* dan *Radio G-Fan 105.1 FM*¹⁰.

Key FM merupakan radio yang sudah mengudara cukup lama dan berbasis di Tiban, Batam. Siarannya menjangkau negeri tetangga: Singapura dan Malaysia. Sedangkan *Sing FM* merupakan radio bisnis pertama. Kantornya di lantai 21 Hotel Planet Holiday, yang masih satu grup dengan *Sing FM*. Jangkauan siarannya juga sampai Singapura dan Malaysia. Yang cukup unik adalah *Radio Era Baru*. Siarannya menggunakan dua bahasa, Mandarin dan Indonesia. Segmen pendengarnya kalangan etnis Tionghoa, selain masyarakat umum.

Upah Minimum dan Upah Layak

Rujukan untuk pengupahan pekerja di Batam menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota. Untuk tahun 2010, upah minimum kota ini Rp 1.110.000, naik sekitar Rp 65 ribu dari tahun sebelumnya yang Rp 1.045.000. Ini merupakan akomodasi dari keinginan serikat pekerja yang meminta UMP Rp 1.128.000 agar mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditaksir sekitar Rp 1,2 juta, sedangkan kalangan pengusaha menghendaki upah minimum Rp 1.086.800.

Upah seperti ini jelas jauh dari memadai untuk standar

10 Daftar stasiun radio di Indonesia, *Wikipedia*.

hidup layak wartawan. Berdasar hasil survei AJI Batam terhadap komponen dan harga kebutuhan jurnalis di Batam pada Januari 2011, maka besaran upah layak yang mestinya didapat oleh jurnalis di kota ini adalah Rp 4.243.030—hampir empat kali lipat dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah.

Angka Rp 4,2 juta ini merupakan kalkulasi dari kebutuhan layak jurnalis yang meliputi: makanan dan minuman; perumahan dan fasilitas; sandang; aneka kebutuhan lain seperti biaya transportasi, komunikasi, kesehatan dan kebersihan, sosial kemasyarakatan dan organisasi, rekreasi, dan bacaan.

Angka Rp 4,2 juta merupakan jumlah keseluruhan dari komponen berikut: makanan dan minuman, biaya yang dianggap layak adalah Rp 1.572.000. Makanan di Batam terbilang mahal karena semua bahannya didatangkan dari luar Batam. “Itu sebabnya komponen ini paling banyak menelan biaya bagi jurnalis dan merupakan pengeluaran wajib yang tak bisa ditawar-tawar,” kata Ketua AJI Batam, Muhammad Nur.

Komponen perumahan dan fasilitas, juga tak bisa dibilang kecil. Sewa kamar di Batam, khususnya di wilayah perkotaan, rata-rata Rp 400 ribu per bulan. “Kalau sewa rumah, rata-rata jurnalis kesulitan, karena harga sewa rumah jauh lebih mahal. Belum lagi harus banyar listrik, air, keamanan, sampah dan lainnya. Jadi di komponen ini kita pakai sewa kamar karena survei ini untuk kebutuhan layak jurnalis lajang yang baru diangkat jadi karyawan tetap,” kata Muhammad Nur.

Komponen sandang secara total sekitar Rp 393.000 per bulan, sedangkan untuk kebutuhan lain seperti transportasi dan lain-lain sekitar Rp 1.492.300. AJI Batam juga memasukkan komponen pembelian laptop. Dengan asumsi harga Rp 6 juta ditambah bunga, jadi sekitar Rp 7,2 juta, maka angsuran per bulannya Rp 300 ribu. Dengan empat komponen utama yang disurvei itu, maka kebutuhan hidup layak jurnalis Kota Batam Rp 3.836.000. Jumlahnya menjadi Rp 4,2 juta karena AJI me-

nambahkan komponen tabungan, yang besarnya 10 persen dari total upah.

Tabel II.5 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Batam Tahun 2011

Kebutuhan	Besaran
Makanan dan Minuman	Rp 1.528.500
Perumahan dan Fasilitas	Rp 400.000
Sandang	Rp 209.100
Aneka Kebutuhan Lain	Rp 1.402.930
Tabungan (10 persen dari total upah)	Rp 354.053
Total	Rp 3.894.583

BAHAN: HASIL SURVEI UPAH LAYAK AJI BATAM, 2011

AJI Batam, seperti kata Muhammad Nur, berharap perusahaan media menjadikan standar upah layak ini sebagai acuan dalam menggaji karyawannya. Jika semua jurnalis digaji layak, jurnalis di masing-masing media akan lebih fokus dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dan memperkecil peluang untuk melakukan pelanggaran seperti pemerasan, menerima amplop dan sejumlah tindakan tak terpuji lainnya.

Upah Riil Jurnalis Batam

Hasil survei yang dilakukan AJI Batam tentang upah jurnalis menunjukkan bahwa rata-rata gaji jurnalis yang baru diangkat masih lebih dekat ke standar UMP daripada upah layak. Dari survei yang dilakukan terhadap jurnalis dari lima surat kabar berbeda, diperoleh informasi bahwa gaji tertinggi untuk level reporter yang baru diangkat adalah Rp 2,5 juta, yang paling rendah Rp 1,3 juta. Dengan rentang seperti itu, maka rata-rata upah jurnalis kota ini Rp 1,7 juta per bulan.

Kondisi hampir sama juga dialami jurnalis televisi lokal. Dari dua media televisi lokal yang disurvei, semuanya masih bergaji di bawah upah layak AJI, yaitu rata-rata Rp 2.350.000. Upah tertingginya Rp 2,7 juta, sedangkan yang terendah Rp 2

juta. Sedangkan untuk jurnalis radio, juga masih sama. Bahkan, ada yang sudah diangkat jadi karyawan tetap namun gajinya masih dibawah upah minimum kota (UMK) Batam. Secara rata-rata, gaji jurnalis radio sekitar Rp 1,9 juta.

Tabel II.6 Upah Jurnalis Baru di Kota Batam Tahun 2011

Media cetak	Harian Batam Pos	Rp 2.555.000
	Harian Tribun Batam	Rp 2.000.000
	Harian Haluan Kepri	Rp 1.300.000
	Harian Posmetro Batam	Rp 1.350.000
	Harian Tanjungpinang Pos	Rp 1.500.000
Media TV	Batam Televisi 53 UHF	Rp 2.700.000
	Semenanjung TV 39 UHF	Rp 2.000.000
Media radio	Radio Key FM 102.3 FM	Rp 1.100.000
	Radio Sing FM 105.5 FM	Rp 2.100.000
	Radio Era Baru 106.5 FM	Rp 2.500.000

Sebagai referensi tambahan, dalam survei yang dilakukan AJI tahun 2005, temuan soal kesejahteraan jurnalis di Batam sebagai berikut: 5% jurnalis mendapatkan upah Rp 200 sampai Rp 599 ribu; 10% mendapatkan upah Rp 600-Rp 999 ribu; 25% mendapatkan upah Rp 1-Rp 1,399 juta; 30% mendapatkan upah Rp 1,4 juta-Rp 1,799 juta; 10% mendapatkan upah Rp 1,8 juta-Rp 2,199 juta; 10% mendapatkan upah Rp 2,2 juta-Rp 2,59 juta. Hanya 5% yang mengaku memiliki upah Rp 3,4 juta-Rp 3,7 juta dan Rp 4,2 juta sampai Rp 4,599 juta.

Jadi, pada tahun itu, ada lima persen jurnalis yang gajinya bahkan di bawah upah minimum Provinsi Kepulauan Riau yang saat itu sudah Rp 557 ribu. Data hasil survei AJI tahun 2005 itu juga menunjukkan bahwa mayoritas jurnalis, sebanyak 50%, mendapat upah di bawah Rp 1,3 juta. Penilaian ini memang belum bisa menjadi ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan jurnalis Batam karena yang disurvei saat itu bukan hanya jurnalis baru, tapi juga termasuk yang sudah senior dan menduduki jabatan tinggi.

Dengan temuan hasil survei AJI Batam di tahun 2011 ini, tingkat kesejahteraan jurnalis bisa dicatat mengalami perkembangan, meski besarnya masih belum sampai pada standar upah yang bisa disebut layak seperti dilansir AJI Batam.

II.4 Kota Denpasar

Jumlah penduduk	: 788.445 (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 213 miliar (2010)
APBD	: Rp 975 miliar (2010)
Upah Minimum Kota	: Rp 1.191.500 (2011)
Upah layak versi AJI	: Rp 3.894.583 (2011)
Jumlah media cetak	: 26 (2010)
Jumlah media penyiaran	: 3 (radio), 4 (TV)



Sebelum menjadi ibukota Provinsi Bali tahun 1958, Denpasar mulanya merupakan pusat Kerajaan Badung—kerajaan yang sangat berpengaruh di daerah yang dijuluki Pulau Dewata ini. Tak mengherankan jika daerah ini menjadi pusat kegiatan bisnis, ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga pertumbuhan ekonominya lebih pesat dibanding daerah-daerah lainnya seperti Jembrana, Karangasem, Buleleng, dan Klungkung.

Pada 1992 Denpasar resmi naik status dari Kota Administratif Denpasar menjadi Kota Madya Denpasar. Dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar yang terbit pada 15 Januari 1992, yang kemudian diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Setelah itu, pertumbuhan kota ini terus beranjak naik.

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Denpasar tercatat 788.445 jiwa, yang terdiri atas 403.026 laki-laki dan 385.419 perempuan. Dibandingkan dengan data penduduk 10 tahun lalu, jumlah penduduk kota ini bertambah sekitar 200 ribu jiwa. Sensus penduduk ta-

hun 2000 mencatat jumlah penduduk 522.381 jiwa.

Luas wilayah Kota Denpasar 127,78 kilometer persegi dan didiami oleh 788.445 jiwa. Maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk kota ini sebanyak 6.170 orang per kilometer persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Denpasar Barat yakni 9.510 orang per kilometer persegi, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Denpasar Selatan yakni sebanyak 4.900 orang per kilometer persegi.

Pemetaan Industri Media

Berdasar data Serikat Penerbit Surat kabar¹¹, setidaknya ada 26 media cetak di Bali di tahun 2010¹². Rinciannya, 8 berupa surat kabar harian, 8 surat kabar mingguan, 5 berbentuk tabloid, dan 5 lainnya berbentuk majalah. Sebagian besar media itu berada di Denpasar. Hanya dua saja yang berada di luar ibu kota Provinsi Bali itu.

Delapan harian itu masing-masing: *Bali Post*, *Bisnis Bali*, *Denpost*, *Fajar Bali*, *International Bali Post*, *Metro Bali*, *Nusa*, dan *Radar Bali*. Semua harian ini berkantor pusat di Denpasar. Untuk mingguan, terdiri dari *Bali Sun*, *Patriot*, *Sarad*, *Suara Rakyat*, *Teropong NTB*, *Tokoh*, dan *Warta Bali*. Satu lagi terbit dwi mingguan, yaitu *Wiyata Mandala*. Untuk tabloid, masing-masing *Bali Aga*, *Bali Travel News*, *Lintang*, *Bali Niskala*, dan

11 SPS dan Infomedia, *Media Directory 2010*, Jakarta 2010, hal. 42.

12 Menurut data Dewan Pers, dalam buku *Data Pers Nasional 2010*, setidaknya ada 28 surat kabar yang bisa didata di Bali. Jumlah ini melebihi jumlah pendataan yang dilakukan SPS di Bali, yang menemukan ada 22 media. Rincian media cetak versi Dewan Pers seperti ini: 8 harian, 16 mingguan, dan 4 terbit bulanan. Untuk harian, ada *Bali Express*, *Bali Post*, *Bisnis Bali*, *Denpost*, *Fajar Bali*, *International Bali Post*, *Nusa Bali*, *Metro Bali*, dan *Radar Bali*. Untuk mingguan ada *Bali Aga*, *Bali Niskala*, *Bali Travel News*, *Suara Rakyat*, *Tokoh*, *Wiyata Mandala*, *Lintang*, *Bali Sun*, *Patroli*, *Sarad*, *Suara Rakyat*, *Teropong NTB*, *Tokoh*, *Warta Bali*, *Wiyata Mandala*, dan *Pelita Spiritual*. Untuk bulanan ada *Latitude*, *Usadha*, *Kamasutra*, *Taksu*, *Bali & Beyond Magazine* dan *Hello Bali*. Dua yang disebut terakhir tidak berkantor di Denpasar. *Bali & Beyond Magazine* dan *Hello Bali* ada di Kuta, yang secara administratif masuk Kabupaten Badung.

Pelita Spiritual. Dua media yang disebut belakangan itu terbit bulanan. Untuk majalah ada *Latitudes*, *Taksu* dan *Usadha*. Dua majalah lainnya, *Bali & Beyond* dan *Hello Bali* berada di Kuta, yang secara administratif berada di dalam Kabupaten Badung.

Tabel II.7 Oplah Surat kabar di Bali Tahun 2010

SKH		SKM		Tabloid		Majalah		Jumlah	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
8	173.500	8	57.839	5	11.698	5	43.000	26	286.037

BAHAN: SPS DAN INFOMEDIA DALAM MEDIA DIRECTORY 2010

Tabel II.8 Pertumbuhan Media dan Oplah Surat kabar di Bali Tahun 2008-2010

2008		2009		2010	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
13	267.406	13	267.037	26	286.037

BAHAN: SPS DAN INFOMEDIA DALAM MEDIA DIRECTORY 2010

Di Bali, setidaknya ada tujuh stasiun radio. Masing-masing: *Radio Global FM*, *Radio Genta FM*, *Radio Yudha FM*, *Radio GSM Bali FM 93,2*, *Rado Mega Nada FM 10,4*, *RGS FM 100,1* dan *Radio Swara Negara FM 100,7*. Tiga radio yang disebut di awal, berkantor di Denpasar. Selebihnya, tersebar di luar kota: *GSM* dan *Swara Negara* di Negara, Jembrana; *Mega Nada* di Kediri, Tabanan; sedangkan *RGS FM* berada di Karangasem¹³.

Untuk televisi, tercatat ada empat TV lokal, yaitu PT Alam Bali Semesta TV (*ATV 23 UHF*), PT Bali Naradha Televisi (*Bali TV 39 UHF*), PT Dunia Bokasih Jaya; dan PT Median-tara Televisi Bali (*Dewata TV 49 UHF*)¹⁴. Dari empat televisi

13 Dewan Pers, *ibid*, hal, 271.

14 *Wikipedia* mencatat ada tiga stasiun TV lain selain *Bali TV* dan *Dewata TV*, yaitu *TVRI Bali 29 UHF*, *Bali Music Channel 53 UHF*, dan *Alam TV 39 UHF*. Namun tak ada keterangan lebih rinci tentang data ini.

itu, dua berkantor pusat di Denpasar, yaitu *Bali TV* dan *De-wata TV*. Selebihnya, di luar Denpasar: *ATV* di Kuta, Badung, sedangkan PT Dunia Bokasih di Klungkung.

Upah Minimum dan Upah Layak

Di Denpasar, Upah Minimum Kota tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp. 1.191.500, naik Rp 91.500 (9,23%) dibanding upah minimum kota tahun sebelumnya yaitu Rp 1.100.000. Jumlah ini masih lebih kecil dari upah minimum kabupaten Badung yang sebesar Rp 1.221.000 per bulan—naik sekitar 10 persen dari upah minimum tahun 2010.

Apakah upah minimum seperti itu memadai untuk memenuhi kebutuhan jurnalis? Rasanya tidak. Berdasarkan survei yang dilakukan AJI Denpasar, upah layak untuk jurnalis di daerah ini sekitar Rp 3,8 juta. Jumlah ini berdasar pada survei kebutuhan jurnalis pada awal 2011 dengan menggunakan tiga lokasi berbeda untuk pengecekan harganya, yakni di Pasar Kumbasari, Robinson Mall dan Tiara Dewata. Adapun komponen yang diteliti meliputi kebutuhan makanan, perumahan, fasilitas sandang, dan aneka kebutuhan lainnya.

Tabel II.9 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Denpasar Tahun 2011

Kebutuhan	Nilai
Makanan dan Minuman	Rp 1.528.500
Perumahan dan Fasilitas	Rp 400.000
Sandang	Rp 209.100
Aneka Kebutuhan Lain	Rp 1.402.930
Tabungan (10 persen dari total upah)	Rp 354.053
Total	Rp 3.894.583

BAHAN: HASIL SURVEI AJI DENPASAR, 2011

Apa yang terjadi dalam kenyataan memang jauh dari yang diharapkan. Gaji (*take home pay*) para jurnalis di Denpasar, angkanya bervariasi. Untuk jurnalis di media lokal Bali, besaran upahnya berkisar antara Rp 1 sampai Rp 2 juta. Pada beberapa

media, nilainya bahkan di bawah Rp 1 juta. Misalnya pada kasus media online *BeritaBali.Com*. Rata-rata per bulan jurnalis hanya mendapat upah Rp 450-800 ribu. Ini masih di bawah dari upah minimum kota ini yang ditetapkan Rp 1.191.500.

Gaji Rp 1 sampai Rp 2 juta itu adalah gaji di luar asuransi, tunjangan prestasi dan bonus tahunan. Namun, pada beberapa media, gaji yang mereka peroleh adalah gaji murni. Artinya, dalam setahun bekerja mereka hanya mendapatkan gaji pokok. Sementara untuk asuransi, tunjangan dan bonus tahunan yang seharusnya diperoleh, tidak mereka dapatkan.

Tabel II.10 Upah dan Fasilitas Pendukung Kerja Jurnalis di Kota Denpasar Tahun 2011

Media	Status	Asuransi	Cuti	Tunjangan	Pelatihan	Bonus	Gaji THP
Warta Bali	Kontrak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Rp 1-1,5 juta
	Tetap	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Ya	Rp 1-2 juta
BeritaBali.com	Kontrak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	NA
	Kontributor	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Rp 450-800 ribu
Radar Bali	Kontrak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Rp 1-1,5 juta
	Tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Rp 1,5-2 juta
Nusa Bali	Kontrak	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Rp 1,4 juta
	Tetap	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya	Rp 1,5-1,6 juta
Dewata TV	Kontrak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak ada	Rp 690 ribu
	Tetap	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Rp 1,3 juta
Fajar Bali	Kontrak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	<Rp 1,3 juta
	Tetap	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Rp 2 Juta
Jurnal Bali.com	Kontrak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Rp 1 juta
	Tetap	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	>Rp 1 juta
Bali Post	Kontrak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	NA
	Tetap	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Rp 2 juta
Radio Global FM	Kontrak	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Rp 1,6 juta
	Tetap	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Rp 2 juta
Bali TV	Kontrak	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Rp 1,5 juta
	Tetap	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Rp 2 juta

BAHAN: HASIL SURVEI UPAH LAYAK AJI DENPASAR, 2011

Selain tidak mendapat tunjangan dan bonus, ada beberapa

jurnalis yang tidak mendapatkan pelatihan secara regular untuk meningkatkan kemampuan jurnalistiknya. Bahkan, ini lebih parah, ada jurnalis yang tidak mendapatkan hak cuti 12 hari dalam setahun sebagaimana amanat Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

II.5 Kota Jakarta

Jumlah penduduk	: 9,59 juta (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 291,49 miliar (2010)
APBD	: Rp 24,67 triliun (2010)
Upah Minimum Provinsi	: Rp 1.290.000 (2011)
Upah layak versi AJI	: 4,748,919 (2011)
Jumlah media cetak	: 346 (2010)
Jumlah media penyiaran	: 26 (Radio), 16 (TV)



Pada abad ke-14, kota pelabuhan Kerajaan Pajajaran ini bernama Sunda Kelapa. Fatahilah menggantinya menjadi Jayakarta pada pada 22 Juni 1527. Setelah itu, namanya kerap berganti-ganti, dari Stad Batavia, Stad Gemeente Batavia, dan Jakarta Toko Betsu Shi. Baru pada tahun 1945 namanya menjadi Jakarta—

saat itu nama resminya adalah Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Ada perubahan di masa sesudahnya, sebelum akhirnya resmi menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya berdasarkan Undang Undang No. 10 Tahun 1964.

Sebagai ibukota negara, seperti layaknya kota-kota serupa di negara lainnya, Jakarta menjadi jantung pemerintahan. Semua lembaga pemerintahan ada di sini, mulai dari lembaga ekonomi sampai militer. Tak mengherankan jika kota ini menjadi pusat bisnis, yang ditandai dengan gedung jangkung dan modern di sepanjang Jalan Sudirman dan Jl. M.H. Thamrin saat ini. Sebagian besar uang beredar juga ada di sini, dan si-

sanya di daerah lainnya.

Jumlah penduduknya, tentu saja menjadi yang terbesar dari kota-kota lainnya. Berdasar hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk DKI Jakarta adalah 9.588.198 jiwa yang terdiri dari 4.859.272 laki-laki dan 4.728.926 perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut tampak terjadinya fenomena “kue donat” di DKI Jakarta di mana penduduk bertumpu di lingkaran luar, sementara di pusat DKI Jakarta relatif lebih kosong. Hanya sekitar 9,37 persen penduduk yang tinggal di Jakarta Pusat dan yang lainnya menyebar di Jakarta Selatan (2.687.027 jiwa), Jakarta Timur (2.278.825 jiwa), Jakarta Barat dan Jakarta Utara¹⁵.

Pemetaan Industri Media

Ibukota, seperti hampir di semua negara di dunia, juga merupakan pusat bisnis –selain pemerintahan. Hampir semua lini usaha ada di sini. Tak terkecuali media, baik surat kabar, radio, televisi dan online. Dalam peta media di Indonesia, grup besar media yang ada di luar Jakarta hanya *Jawa Pos News Network* (di Surabaya), dan *Group Bali Post* yang berada di Denpasar. Selebihnya, berkantor pusat di kota yang dulu bernama Jayakarta ini.

Untuk media cetak, data tahun 2010 menyebutkan, setidaknya ada 42 surat kabar harian, 17 mingguan, 70 tabloid dan 213 majalah, serta 4 buletin. Total oplah dari 346 media itu adalah 13 juta eksemplar. Dengan jumlah media sangat besar seperti itu, Jakarta menduduki peringkat pertama dalam hal oplah media. Beberapa media besar di Jakarta, antara lain:

Kelompok Kompas Gramedia, yang di tahun 2006¹⁶ saja sudah memiliki 81 anak perusahaan hanya di bidang media. Tak

15 Lihat <http://www.jakarta.go.id/>

16 Serikat Penerbit Surat kabar, Media Directory Pers Indonesia 2006, Jakarta.

termasuk dalam bisnis lain seperti pendidikan, perhotelan dan jasa. Sedangkan grup media cetak besar lainnya adalah Grup Femina yang punya sedikitnya 11 media, Grup Mugi Rekso Abadi 8 media, Grup Pinpoint dengan 14 media, Grup Bisnis Indonesia dengan 7 media, Grup Media Indonesia dengan 2 media, Grup Subentra Cipta Media dengan 3 media, Grup Info Kelapa Gading dengan 3 media, Grup Gatra 3 media, Grup Tempo Inti Media dengan 6 media, Grup Mahakka Media dengan 4 media, Grup Lippo dengan 6 media, dan Grup MNC dengan setidaknya 6 media.

Tabel II.11 Jumlah Surat kabar dan Oplahnya di Jakarta Tahun 2010

Harian		Mingguan		Tabloid		Majalah		Buletin	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
42	2.960.312	17	186.500	7	4.356.255	213	5.736.843	4	32.809

BAHAN: SPS DAN INFOMEDIA DALAM MEDIA DIRECTORY 2010

Melihat statistik di atas, pembaca di Jakarta lebih banyak dibombardir oleh majalah daripada harian. Dari segi jumlah, memang ada selisih lebih dari 100. Namun, dari segi oplah, jumlahnya lebih kurang dua kali lipat lebih banyak dari oplah harian, yaitu sebanyak 5.736.843 eksemplar.

Tabel II.12 Perbandingan Jumlah Surat kabar di Jakarta Tahun 2008 - 2010

SKH			SKM			Tabloid			Majalah			Bulletin		
2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
42	45	42	30	29	17	93	96	70	249	252	217	2	2	4

BAHAN: SPS DAN INFOMEDIA DALAM MEDIA DIRECTORY 2010

Jika melihat perbandingan per tahun dari pertumbuhan surat kabar harian, maka bisa dilihat bahwa dalam tiga tahun ini pertumbuhan surat kabar di Jakarta bisa dikatakan mengalami penurunan. Di surat kabar, penurunannya tak sedrastis ming-

guan, tabloid dan juga majalah. Satu-satunya yang bertambah adalah buletin.

Pada 2010, secara statistik terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2010, jumlah keseluruhan media ada 346 buah. Tahun sebelumnya ada 424 buah. Jumlah itu bahkan masih lebih sedikit ketimbang kondisi tahun 2008 yaitu 416 media.

Untuk televisi, semua yang memiliki jangkauan nasional berada di Jakarta, seperti *RCTI*, *SCTV*, *TPI*—kini *MNC TV*, *Indosiar*, *Metro TV*, *TV One*, *ANTV*, *Global TV*, *Trans TV*, *Trans7*. Di Jakarta, ada pula Biznet Multimedia (*Max3 TV*), PT Cakrawala Andalas Televisi (*ANTV*), PT Central TV Digital (*Central TV*), PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (*MNC TV*), PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (*Trans7*), PT Global Informasi bermutu (*Global TV*), PT I Television (*I TV*), PT Indonesia Media Televisi (*IMTV*), PT Indosiar Visual Mandiri (*Indosiar*), PT Lativi Mediakarya (*TVOne*), PT Media Televisi Indonesia (*Metro TV*), PT Mediatama Anugrah Citra (*NexMedia*), PT Mega Media Indonesia (*Megavision*), PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (*RCTI*), PT Surya Citra Televisi (*SCTV*) dan PT Televisi Transformasi Indonesia.

Berbeda dengan di media cetak, pemain di televisi memang tak banyak, meski tetap saja kepemilikannya adalah bagian dari korporasi besar. Dalam TV, *MNC* memiliki tiga stasiun TV, yaitu *RCTI*, *Global* dan *MNC TV*. Sedangkan Grup Bakrie, di bawah bendera Viva Group, memiliki *TV One* dan *ANTV*. Menurut Dewan Pers, di Jakarta terdapat 16 stasiun televisi.

Berdasar data Dewan Pers 2010, di Jakarta tercatat ada 26 stasiun radio. Pemain besar di industri radio adalah mereka yang bergabung dalam korporasi besar dan berjejaring. Contohnya *Trijaya* yang merupakan bagian dari *MNC Group*, yang memiliki televisi, surat kabar dan juga online. Lalu ada Grup *MRA*, yang kepemilikannya di radio juga tak sedikit. Untuk ra-

dio, jumlahnya memang cukup banyak –meski secara statistik kalah dari Kota Surabaya yang memiliki 31 stasiun radio.

Pertumbuhan media online di Jakarta juga menjadi yang paling banyak di banding kota lain. Beberapa media online yang memiliki jumlah pengunjung 10 terbanyak adalah *Detik.com*, *VIVAnews.com*, *KOMPAS.com*, *Okezone.com*, *Inilah.com*, *Tribunnews.com*, *Tempointeraktif.com*, *ANTARA News*, *Media Indonesia.com*, dan *metrotvnews.com*¹⁷. Selain itu juga ada *Mediaindependen.com*, yang memposisikan diri sebagai media alternatif untuk isu-isu kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi¹⁸.

Upah Minimum dan Upah Layak

Sebagai ibu kota negara, tak berarti standar upah layak di Jakarta merupakan yang tertinggi dibanding daerah lainnya. Di tahun 2011, upah minimum provinsi ini ditetapkan Rp 1.290.000. Upah minimum DKI Jakarta ini naik sebesar Rp 171,991 (sekitar 15.38%) dibanding upah minimum tahun sebelumnya yaitu Rp 1.118.009. Dengan upah sebesar itu, maka besaran upah minimumnya masih kalah dari Papua (Rp 1.403.000), Papua Barat (Rp 1.410.000), dan Nanggroe Aceh Darusalam (Rp 1.350.000).

Apakah itu sudah memadai untuk menjadi standar upah layak untuk jurnalis di Jakarta? Jawabannya jelas tidak. Upah minimum itu terlalu rendah untuk membuat jurnalis bisa hidup layak di Jakarta. Berdasar hasil survei yang dilakukan tim AJI Jakarta, besaran upah minimum kota ini bahkan tak

17 Ini adalah 10 portal berita yang ada di peringkat Alexa berada dari range 1 sampai 150.

18 Media yang digagas oleh AJI Jakarta ini berusaha menjadi *media watch* untuk media *mainstream* di Jakarta. Posisi ini penting, mengingat saat ini tidak ada lagi lembaga pemantau yang secara aktif mengawasi media-media.

cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman sehari-hari jurnalis. Inilah hasil survei upah layak jurnalis di Jakarta:

Tabel II.13 Kebutuhan Layak Jurnalis Kota Jakarta Tahun 2011

Kebutuhan	Jumlah
Makanan dan minuman	Rp 1.698.730
Perumahan dan fasilitas	Rp 700.000
Sandang	Rp 300.062
Aneka kebutuhan lain	Rp 1.477.435
Cicilan laptop (tiap bulan selama 12 bulan)	Rp 140.972
Tabungan sebesar 10 %	Rp 431.720
Total	Rp 4.748.919

BAHAN: HASIL SURVEI AJI JAKARTA, 2011

Dengan melihat rincian hasil survei itu kita bisa melihat bahwa besaran upah minimum itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan perumahan, sandang, dan cicilan laptop. Ambil contoh untuk perumahan. Untuk sebuah tempat tinggal yang cukup layak, nilai Rp 700.000 itu sebenarnya patokan harga yang rata-rata. Sebab, dengan kamar yang dilengkapi fasilitas AC, harga sewa per bulannya berkisar Rp 1 juta. Dengan contoh kecil itu saja bisa dilihat bahwa angka Rp 1,2 juta—yang menjadi patokan upah minimum—sangatlah tidak memadai untuk jurnalis yang bekerja di kota ini.

Upah Riil Jurnalis Jakarta

Apakah ada jurnalis yang diupah dengan standar AJI Jakarta? Ada, tapi tidak banyak jumlahnya. Kesimpulan ini merujuk pada hasil survei AJI Jakarta awal tahun 2011¹⁹, yang menemukan setidaknya ada 3 media yang gaji minimum per bulannya untuk jurnalis baru melebihi standar AJI Jakarta, yaitu *Bisnis Indonesia* (Rp 5 juta/bulan), *Jakarta Globe* (Rp 5 juta), dan

19 Hasil survei upah riil jurnalis di Jakarta, Januari 2011.

Harian Kompas (Rp 5,5 juta). Selebihnya, upah untuk jurnalis yang baru masuk dan diangkat menjadi karyawan berada di bawah kisaran itu, seperti *Koran Tempo* (Rp 3 juta), *Trans TV* (Rp 2,2 juta), *MNC TV* (Rp 2 juta), *TVOne* (Rp 3,5 juta), *Viva News* (Rp 2,5 juta), *Kompas.com* (Rp 2,5 juta).

Tabel II.14 Upah Riil Jurnalis Baru di Kota Jakarta, 2010

Media	Jenis Media	UMP 2010	Upah Riil 2010	Upah Layak AJI 2010
Harian Bisnis Indonesia	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 4.979.280	Rp 4,6 juta
Harian Kompas	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 5.500.000	Rp 4,6 juta
Tabloid Kontan	Mingguan	Rp 1.118.009	Rp. 3.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Republika	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.300.000	Rp 4,6 juta
Harian Jurnal Nasional	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.500.000	Rp 4,6 juta
LKBN Antara	Kantor Berita	Rp 1.118.009	Rp. 2.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Seputar Indonesia	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.250.000	Rp 4,6 juta
Koran Tempo	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Indopos	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 3.300.000	Rp 4,6 juta
Harian Pos Kota	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 1.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Berita Kota	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.800.000	Rp 4,6 juta
Harian Warta Kota	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.700.000	Rp 4,6 juta
Harian Jakarta Globe	Harian (berbahasa Inggris)	Rp 1.118.009	Rp. 5.500.000	Rp 4,6 juta
Harian Rakyat Merdeka	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.000.000	Rp 4,6 juta
Harian Sinar Harapan	Harian	Rp 1.118.009	Rp. 2.000.000	Rp 4,6 juta
Majalah Swa	Bulanan	Rp 1.118.009	Rp. 2.696.990	Rp 4,6 juta
Majalah Gatra	Mingguan	Rp 1.118.009	Rp. 2.500.000	Rp 4,6 juta
TPI/MNC TV	Televisi	Rp 1.118.009	Rp. 2.400.000	Rp 4,6 juta
Trans TV	Televisi	Rp 1.118.009	Rp. 2.500.000	Rp 4,6 juta
SCTV	Televisi	Rp 1.118.009	Rp. 2.500.000	Rp 4,6 juta
DAAI TV	Televisi	Rp 1.118.009	Rp. 2.480.000	Rp 4,6 juta
Radio KBR 68H	Radio	Rp 1.118.009	Rp. 3.300.000	Rp 4,6 juta
I Radio	Radio	Rp 1.118.009	Rp. 2.400.000	Rp 4,6 juta
Radio Sonora FM	Radio	Rp 1.118.009	Rp. 3.300.000	Rp 4,6 juta
Hukumonline.com	Online	Rp 1.118.009	Rp. 1.600.000	Rp 4,6 juta
Kompas.com	Online	Rp 1.118.009	Rp. 2.700.000	Rp 4,6 juta
Detik.com	Online	Rp 1.118.009	Rp 2.400.000	Rp 4,6 juta
Vivanews.com	Online	Rp 1.118.009	Rp. 2.600.000	Rp 4,6 juta
Okezone.com	Online	Rp 1.118.009	Rp 2.300.000	Rp 4,6 juta
TVOne	Televisi	Rp 1.118.009	Rp 3.500,000	Rp 4,6 juta

BAHAN: HASIL SURVEI AJI JAKARTA, 2010

Kondisi ini tak banyak berubah dengan hasil survei upah riil

jurnalis di Jakarta tahun 2010. Pada tahun itu, AJI Jakarta menetapkan upah layak jurnalis sebesar Rp 4,6 juta. Kenyataan di lapangan, masih ada jurnalis yang menerima kurang dari separo upah itu, seperti yang dialami oleh wartawan harian *Pos Kota* dan portal berita *Hukumonline.com*. Di tahun 2010, media-media yang memberi gaji kepada jurnalis di atas standar upah layak AJI Jakarta adalah *Harian Kompas*, *Jakarta Globe*, dan *Bisnis Indonesia*.

II.6 Kota Jayapura

Jumlah penduduk	: 261.776 jiwa (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 44 Miliar (2010)
APBD	: Rp 530.945.535 (2010)
Upah Minimum Provinsi	: Rp 1.316.500 (2011)
Upah layak versi AJI	: Rp 6.414.320 (2011)
Jumlah media cetak	: 11 surat kabar
Jumlah media penyiaran	: 19 (Radio), 4 (TV)



Sebelum menjadi Jayapura, nama awal kota ini adalah Numbay. Kapten Sachse, seorang Belanda, kemudian mengganti menjadi Hollandia pada 7 Maret 1910. Alasannya, kota ini menyerupai kota di negara asalnya, Belanda, yang berbentuk teluk. Setelah Irian Jaya berada di pangkuan Republik Indonesia pada 1 Mei 1963, nama Hollandia diganti menjadi Kota Baru. Namun, nama ini hanya bertahan enam tahun, kemudian diganti menjadi Soekarnopura di tahun 1969. Nama yang merujuk pada presiden pertama Republik Indonesia ini hanya dipakai enam tahun sebelum akhirnya menjadi Jayapura sejak 1975 hingga sekarang.

Jayapura, sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya, ditetapkan menjadi Kota Administratif Jayapura melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1979 tanggal 28 Agustus 1979. Secara resmi, kota itu menjadi kota administratif pada 14 September 1979. Peresmianya dilakukan oleh Menteri Dalam

Negeri H Amir Machmud, dengan Drs Florens Imbiri sebagai Wali Kota Jayapura yang pertama. Selang 13 tahun kemudian, barulah statusnya ditingkatkan menjadi kotamadya. Peresmianya sebagai kotamadya dilakukan oleh Mendagri Yogie S.M. di lapangan Mandala Jayapura, 21 September 1993.

Pemetaan Industri Media

Menurut data Serikat Penerbit Surat kabar²⁰, setidaknya ada 13 surat kabar di Provinsi Papua. Rinciannya, 8 berupa surat kabar harian, 5 surat kabar mingguan. Surat kabar harian terdiri dari Bisnis Papua, Cenderawasih Post, Papua Post, Pasific Post, Papua Pos, dan Timika Pos. Dua surat kabar lainnya ada di luar Jayapura, yaitu Papua Pos Nabire di Kabupaten Nabire dan Radar Timika di Kabupaten Timika. Untuk surat kabar mingguan, semua ada di Jayapura, yaitu Boda Post, Irian Express, Sarmi Post, Tabloid Jubi, dan Tipa Papua.

Tabel II.15 Jumlah Surat kabar dan Oplahnya di Provinsi Papua Tahun 2010

SKH	Oplah	SKM	Oplah	Media	Oplah
8	33.500	5	11.500	13	45.000

BAHAN: INFOMEDIA DAN SPS DALAM MEDIA DIRECTORY 2010

Harian Cenderawasih Pos didirikan di Jayapura sekitar 1995 dengan mengambil alih sebuah media lokal yaitu Harian Tjenderawasih milik pemerintah daerah. Selanjutnya Cenderawasih Pos yang merupakan salah satu jaringan dari Jawa Pos News Network Grup mengelola manajemen harian itu hingga berkembang pesat sampai sekarang ini. Untuk mengembangkan sayap bisnis pers di Papua, Cenderawasih Pos juga memiliki sejumlah media di berbagai daerah di Papua²¹.

20 SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010, hal. 42

21 Harian yang menjadi jaringan Cenderawasih Pos antara lain Radar Sorong dan Radar

Harian Pasific Post, meski tak sebesar Cenderawasih Post, oplahnya sekitar 3.000 eksemplar. Harian ini merupakan satu grup besar yang memiliki sejumlah jaringan media di daerah seperti Papua Post Nabire, Papua Post Merauke, Papua Selatan Pos, Papua Barat Pos, Warta Keerom, dan Sentani News-media-media ini terbit di luar Jayapura.

Lalu ada Tabloid Jujur Bicara (Jubi), yang mottonya "Saatnya Jujur Bicara". Tabloid Jubi berdiri pada September 1999 dan merupakan salah satu tabloid yang dianggap terbaik di Tanah Papua. Pimpinan Redaksi pertama adalah Mohammad Kholifan (1999-2003), setahun kemudian tabloid ini masih survive karena kepercayaan pembaca setianya. Pada 31 Juli 2000, Tabloid Jubi memperoleh penghargaan dari Institut Studi Arus Informasi Jakarta karena dinilai mampu menjadi media penyongkong demokrasi.

Lalu ada Tabloid Tifa Papua. Ini merupakan tabloid tertua di Papua, dan sudah berdiri sejak zaman Belanda dengan nama der Tifa. Sejak masuknya Papua ke dalam pangkuan Republik Indonesia, tabloid ini berganti nama menjadi Tifa Irian dan selanjutnya menjadi Tifa Papua.

Untuk media penyiaran, menurut data Dewan Pers 2010, tercatat ada 1 radio, yaitu PT Radio Swara Mimika (Swara Mimika FM) 94.5 Mhz. Menurut data Wikipedia, di daerah ini terdapat empat stasiun radio, yaitu Radio Saiber FM 101,2 MHz, Radio Gemah FM 103,6 MHz, Radio Suara Mimika FM 94,5 MHz, dan Radio One FM 90,2 MHz²². Untuk tele-

Timika. Saat Provinsi Papua Barat terbentuk, jaringan ini juga mendirikan Manokwari Pos. Pengembangan sayap bisnisnya kemudian menjalin kerja sama dengan hampir seluruh pemerintah kabupaten di Papua. Misalnya saja dengan mengontrak halaman sehingga ada halaman khusus untuk penyajian berita dari kabupaten yang bersangkutan, seperti yang dilakukan Radar Biak, Radar Supiori, Sarmi, dan Radar Keerom.

22 Daftar stasiun radio di Indonesia, Wikipedia.

visi, ada tiga²³: Televisi Mandiri Papua (TVMP), Televisinya Orang Papua (TOP), dan Lensa Papua Televisi Republik Indonesia (TVRI) siaran lokal Papua.

Top TV, yang memiliki motto "Pancaran Sinar Kasih" didirikan oleh PT Jayapura Televisi. Televisi yang alamat kantornya di Jalan Yos Sudarso, Kompleks PTC Entrop Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, memiliki visi "Membangun dan Mencerdaskan Papua". Televisi ini diluncurkan pertama kali pada 5 Februari 2007 bertepatan dengan hari masuknya Injil di Tanah Papua. Penayangan siaran perdana dimulai sekitar jam 2 pada pagi hari, dengan saluran kanal 26 UHF. Saat ini stasiun televisi ini sudah memiliki 12 jam siar yang diawali pada pukul 11.00 WIT dan berakhir pada pukul 23.00 WIT.

Adapun Televisi Mandiri Papua (TVMP) adalah milik PT Televisi Mandiri Papua. Pembentukan televisi swasta di Papua kini semakin marak terutama setelah televisi Metro Papua²⁴ mendapat banyak tanggapan dan protes dari berbagai kalangan perihal dana operasionalnya. TVMP saat ini menjadi televisi milik Pemerintah Provinsi Papua yang operasionalnya berada di bawah Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti. TVMP saat ini masih menggunakan kanal milik Metro TV²⁵.

Upah Minimum dan Upah Layak

Upah minimum di Jayapura tahun 2011, seperti ditetapkan pemerintah, sebesar Rp 1.403.000 alias naik sebesar Rp

23 Jumlah ini berdasarkan hasil pemetaan AJI Jayapura, 2011. Menurut pendataan Dewan Pers tahun 2010, jumlah televisi di sana ada tiga. Selain TOP TV dan Papua TV, juga ada Kemilau TV yang menempati kanal 44 UHF.

24 Televisi Metro Papua diluncurkan oleh Surya Paloh dan Wapres Jusuf Kalla pada Mei 2007 dan disiarkan langsung ke seluruh Indonesia. Banyak awak dan staf direkrut dengan memakai standar Metro TV serta memakai izin frekwensi milik Metro TV Jakarta.

25 Menurut Zainullah, kepala Balai Monitoring Frekuensi Papua, di Jayapura hanya ada 14 kanal televisi dan 20 kanal radio yang diizinkan. Sesuai keputusan Menteri Perhubungan No. 76 Tahun 2003 Jayapura mendapatkan alokasi 14 kanal televisi, dan yang sudah digunakan sebanyak 9 kanal sehingga masih tersisa 5 kanal yang belum dimanfaatkan.

266.500 (23,45%) dari tahun sebelumnya yang Rp 1.136.500. Dengan upah minimum sebesar itu, maka Papua—dengan Jayapura sebagai ibukotanya—menjadi provinsi yang paling tinggi upah minimumnya dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Besaran upah ini juga mengalahkan ibukota negara, Jakarta, yang upahnya sekitar Rp 1,3 juta.

Meskipun menjadi yang terbesar, namun jumlah itu masih dianggap jauh dari layak untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup jurnalis di kota tersebut. Angka sebesar Rp 1,4 juta itu, bahkan hanya mencukupi setengah dari kebutuhan makanan dan minuman yang layak untuk jurnalis di kota itu yang ditaksir sekitar Rp 2,9 juta. Belum lagi untuk kebutuhan lain seperti perumahan, kebutuhan sandang dan aneka kebutuhan lainnya. Rincian kebutuhan layak jurnalis ada di bawah ini:

Tabel II.16 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Jayapura Tahun 2011

Kebutuhan	Jumlah
Makanan dan minuman	Rp 2.964.900
Perumahan dan fasilitas	Rp 650.000
Sandang	Rp 199.833
Aneka kebutuhan lain	Rp 2.016.467
Tabungan (10% dari total upah)	Rp 583.120
Jumlah	Rp 6.414.320

BAHAN: HASIL SURVEI AJI JAYAPURA, 2011

Lalu, bagaimana kondisi upah riil jurnalisnya? Berdasarkan penelitian Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, lewat berbagai wawancara terhadap sejumlah jurnalis, ditemukan bahwa umumnya responden masih menyatakan rasa tidak puas atas sistem penggajian yang ada. Rasa tidak puas itu terungkap karena umumnya mereka belum pernah dilibatkan dalam penentuan besaran gaji atau honoronya. Selain itu, mereka juga merasa tidak tahu dasar perusahaan menentukan honor atau gaji mereka. Honor responden rata-rata masih berkisar

antara Rp 300 ribu-Rp 1,5 juta.

Upah riil jurnalis hampir tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi dengan adanya kenaikan harga barang. Asumsi lain bahwa rata-rata responden juga masih menyatakan belum/tidak puas dengan jumlah gaji atau honor yang diterima saat ini, mereka mengharapkan adanya perubahan/kenaikan honor atau gaji dengan pola mengikuti standar upah minimum regional (UMR).

Dengan kondisi seperti ini, sebagian besar media massa yang pernah terbit maupun yang masih terbit hingga saat ini belum mempunyai standar pengupahan yang layak. Masih banyak media yang mengupah wartawannya berdasarkan jumlah berita yang dimuat dengan harga antara Rp 10.000-Rp 25.000. Ini biasanya berlaku pada media-media yang bisa disebut sebagai media gurem di Papua. Honor sebesar itu juga diterima kontributor media nasional yang bekerja di Papua. Beberapa kontributor media nasional hanya diupah sekitar Rp. 50.000 hingga Rp 250.000 (khusus televisi).

II.7 Kota Kediri

Jumlah Penduduk	: 267.645 (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: NA
APBD	: NA
Upah Minimum Kota	: Rp 973.950 (2011)
Upah layak versi AJI	: Rp 2.836 (2011)
Jumlah media cetak:	3
Jumlah media penyiaran	: 5 (radio), 3 (TV)



Kota Kediri berada di sisi barat Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 63,40 kilometer persegi dan jaraknya \pm 128 km dari Surabaya, ibukota Provinsi Jawa Timur. Jika orang mendengar Kediri, biasanya ada dua asosiasi yang diingat: Kerajaan Kediri dan rokok kretek. Dua-duanya sama-sama benar. Kediri meru-

pakan kerajaan besar di masa lalu. Adapun rokok kretek muncul lantaran di kota ini terdapat pabrik rokok Gudang Garam.

Sejarah kota ini merujuk pada tahun 804 Masehi. Dalam prasasti Harinjing A tertanggal tanggal 25 Maret 804 Masehi—yang menjadi tanggal ditetapkan nama Kediri—tercatat Bagawantabhari memperoleh anugerah tanah perdikan dari Raja Rake Layang Dyah Tulodong. Kerajaan Kediri yang semula kecil lalu berkembang menjadi nama Kerajaan Panjalu yang besar. Dengan dasar itu keluar surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 22 Januari 1985 yang menyatakan 25 Maret 804 Masehi ditetapkan menjadi Hari Jadi Kediri²⁶.

Pemetaan Industri Media²⁷

Di Jawa Timur, kota Kediri memang tak bisa diperbandingkan dengan Surabaya yang menjadi sebagai ibukota provinsi. Pertumbuhan ekonomi kota ini, yang menjadi syarat mutlak untuk memberi tempat bagi tumbuhnya media, jelas berbeda dengan Surabaya. Namun, dibandingkan dengan kota-kota lainnya—selain Surabaya dan Malang, daerah ini relatif lebih baik dalam soal pertumbuhan media.

Menurut data Serikat Penerbit Surat kabar 2010²⁸, setidaknya ada tiga surat kabar yang ada di daerah ini, yaitu harian Radar Kediri, mingguan Optimis dan Suara Media. Radar Kediri, yang berkantor di Jalan Brawijaya 27D, merupakan bagian dari Grup Jawa Pos. Sedangkan kepemilikan surat kabar Optimis dan Suara Media tak diketahui. Optimis tercatat memiliki

26 Disarikan dari tulisan sejarah kota Kediri dari website pemerintah Kota Kediri (http://www.kediri.go.id/index.php?option=com_content&do_pdf=1&id=93).

27 Data soal media menggunakan bahan dari SPS dan Dewan Pers 2010. Data soal pertumbuhan media tak bisa disediakan karena memang tak ada. Data dari SPS berbasis provinsi, sehingga tak mudah untuk mem-breakdown-nya menjadi per kabupaten atau kota.

28 SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010.

kantor di Jalan Supersemar 3A Kediri, sedangkan Suara Media di Desa Plaosan, Wates, Kediri.

Untuk radio, setidaknya ada lima stasiun. Satu radio mengudara di frekuensi AM, empat lainnya di FM. Masing-masing: Radio Wijangsongko 99 FM, Radio Citra Airlangga 621 AM, Radio Sabdotomo Kediri 93,5 FM, Mahameru 92,3 FM, Swara Andhika Jaya 105,7 FM. Stasiun radio, seperti juga dijumpai di daerah lain di Jawa, jumlahnya memang lebih banyak dari surat kabar dan televisi lokal.

Untuk televisi, setidaknya ada tiga yang beroperasi di daerah ini—selain televisi yang selama ini memiliki jangkauan nasional: Kilisuci TV (KSTV), Dhoho TV dan Logis TV. Kilisuci merupakan stasiun televisi regional di Jawa Timur, yang jangkauan meliputi Kediri, Tulungagung, Blitar, dan Jombang. Stasiun televisi yang punya slogan “TV Kita Semua” ini dimiliki oleh PT Kediri Global Mediatama. Logis TV, seperti halnya Kilisuci TV, bisa menjangkau daerah sekitar. Televisi dengan slogan “Memang TV Kita” ini dapat diterima di Kediri, Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Jombang, dan Malang.

Upah Minimum dan Upah Layak

Upah Minimum Kota Kediri tahun 2011 adalah Rp 975 ribu. Jumlah ini meningkat sedikit dari tahun sebelumnya yang Rp 906 ribu. Upah sebesar itu masih lebih banyak ketimbang upah minimum provinsi yang Rp 705.000, apalagi ketimbang upah minimum provinsi tahun 2010 yang Rp 630.000. Namun, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri menilai upah minimum Rp 975 itu sangat tidak memadai dan jauh dari layak bagi jurnalis di daerah ini.

Berdasarkan kalkulasi AJI Kediri, upah layak jurnalis di daerah ini semestinya sekitar Rp 2.836.557. Dari mana munculnya angka yang nilainya hampir tiga kali dari upah minimum kota ini? Untuk menentukan standar upah layak itu, AJI

Kediri melakukan survei pada 23 Desember 2010 - 5 Januari 2011 untuk mengetahui kebutuhan hidup jurnalis. Patokan harganya merujuk pada harga yang tertera dalam mini market, toko, dan supermarket di daerah ini²⁹.

Survei meliputi empat komponen kebutuhan hidup layak seorang jurnalis lajang dan baru diangkat sebagai karyawan tetap. Rekapitulasi hasil survey: komponen makanan dan minuman; Rp. 980.000; kebutuhan tempat tinggal Rp 250.000, kebutuhan sandang Rp 221.800; dan aneka kebutuhan lain (transportasi, komunikasi, kesehatan, rekreasi, sosial kemasyarakatan, dan bacaan) Rp. 1.126.888. Penjumlahan empat komponen tersebut membuat kebutuhan hidup layak jurnalis adalah Rp. 2.578.688. Di luar empat kebutuhan di atas, AJI Kota Kediri memasukkan juga komponen tabungan 10 persen dari kebutuhan hidup layak untuk tabungan. Maka upah layak jurnalis kota Kediri Rp 2.578.688 + 257.869 = Rp 2.836.557.

Tabel II.17 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Kediri Tahun 2011

Kebutuhan makanan dan minuman	Rp. 980.000
Tempat tinggal	Rp. 250.000
Sandang	Rp. 221.800
Aneka kebutuhan lain	Rp. 1.126.000
Tabungan 10 persen	Rp. 257.869
Jumlah	Rp 2.836.557

BAHAN: HASIL SURVEI UPAH LAYAK AJI KEDIRI

Dengan kalkulasi itu, maka bisa didapat gambaran bahwa upah layak untuk jurnalis adalah Rp 2,8 juta, yang artinya sekitar tiga kali dari upah minimum kota dan hampir empat kali dari upah minimum provinsi. Hanya saja, kenyataan di lapan-

29 Lokasi survei antara lain di mini market Rini di Pasar Centhong, Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, mini market Alfamart, di Kelurahan Burengan, Kecamatan Kota Kediri, Toko Pracangan milik P Shoim, di Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, dan Supermarket Sri Ratu.

gan berkata lain. Berdasarkan survei pengupahan jurnalis di daerah ini, secara umum kondisinya masih jauh dari layak-kalau bukan bisa dikatakan memprihatinkan.

Upah Riil Jurnalis

Untuk mengetahui bagaimana potret gaji jurnalis, AJI Kota Kediri memberikan kuesioner dan melakukan interview terhadap 15 jurnalis di Kota Kediri³⁰. Hasil survei menyebutkan, upah yang diterima jurnalis lokal pada masa percobaan berkisar antara Rp 300 - Rp500 ribu. Setelah diangkat sebagai karyawan tetap, penambahan upahnya tak terlalu signifikan. Perusahaan KSTV memberikan upah jurnalis pada masa percobaan sebesar Rp 300 ribu. Setelah diangkat sebagai karyawan, hanya bertambah menjadi Rp 500 ribu. Upah jurnalis masa percobaan di Dhoho TV sama dengan setelah diangkat menjadi karyawan, yaitu berkisar Rp 400 ribu. Di Harian Memorandum, jurnalis pada masa percobaan diberi upah Rp 350 ribu. Upahnya naik Rp 100 ribu menjadi Rp 450 ribu saat diangkat menjadi karyawan.

Kenaikan cukup signifikan justru didapat oleh responden dari Radar Kediri dan Radio RWS. Di Radar Kediri, jurnalis menerima upah Rp 500 ribu di masa percobaan. Setelah diangkat menjadi karyawan, upahnya naik menjadi Rp 1,5 juta-Rp 2,5 juta. Namun, tinggi rendahnya angka itu tergantung dari nilai Tunjangan Prestasi yang diberikan berdasarkan kual-

30 Responden terdiri dari 5 jurnalis lokal dan 10 jurnalis regional dan nasional. Lima responden jurnalis lokal itu berasal dari media cetak: Radar Kediri (Jawa Pos Grup) dan Memorandum. Lalu, media elektronik masing-masing Radio Wijangsongko (RWS), 1 responden Kilisuci TV (KSTV), 1 responden dari Doho TV. Sementara, 10 responden dari jurnalis regional dan nasional antara lain; media cetak: Seputar Indonesia (Sindo), dan harian Duta Masyarakat. Sedangkan responden jurnalis media elektronika antara lain Radio Elshinta, JTV, TVRI, Trans TV, dan ANTV. Responden dari media portal terdiri dari jurnalis detiksurabaya.com, antarajatim.com, dan beritajatim.com.

itas dan kuantitas berita. Di Radio RWS, pada masa percobaan menerima Rp 500 ribu. Setelah diangkat sebagai karyawan, upahnya menjadi Rp 800 ribu.

Empat dari lima responden jurnalis lokal yang disurvei menerima upah rendah dan di bawah upah minimum kota Kediri. Upah yang diterima jurnalis lokal ini bahkan tak ada yang mendekati upah layak jurnalis kota Kediri yang dikeluarkan AJI Kediri.

Untuk jurnalis televisi, TVRI, misalnya memperoleh gaji tetap Rp 1 juta, dan mendapat uang tambahan Rp 100 ribu untuk tiap berita tayang. Kontributor TVRI rata-rata memperoleh pendapatan Rp 2 juta per bulan. Sedangkan sebagian besar jurnalis televisi swasta berstatus sebagai kontributor dan stringer (yang membantu kontributor) dengan tanggung jawab meng-cover sejumlah wilayah di sekitar eks Karesidenan Kediri. Mereka diupah per berita yang tayang, yaitu berkisar Rp 150 ribu - 250 ribu.

Penghasilan kontributor televisi swasta relatif lebih baik dibanding media lokal. Saat tak ada peristiwa menonjol, mereka bisa meraup penghasilan Rp 1,5 juta-Rp. 7 juta tiap bulan. Pendapatan itu melonjak dua hingga tiga kali lipat saat ada peristiwa menonjol. Namun, pendapatan sebesar itu belum dikurangi untuk upah stringer. Meski memperoleh pendapatan yang lebih baik, namun status kontributor televisi ini teramat rentan. Sebagian besar dikontrak dengan perpanjangan setiap tahun. Sebagian lagi malah tak pernah menandatangani kontrak.

Jurnalis cetak dan portal berita di level regional dan nasional juga memberikan upah lebih baik dibanding media lokal. Untuk koresponden di daerah, Harian Seputar Indonesia (Sindo), misalnya, menggaji korespondennya pada masa percobaan Rp 1,6 juta per bulan. Portal berita regional, seperti beritajatim.com memberikan gaji saat masa percobaan Rp 700 ribu, dan naik menjadi Rp 900 ribu per bulan setelah menjadi wartawan tetap. Antarajatim.com memberi upah Rp 1 juta pada masa

percobaan dan menjadi Rp 1,5 juta per bulan setelah berstatus karyawan tetap. Sedangkan untuk jurnalis portal berita detik-surabaya.com, upahnya dihitung per berita tayang yang besarnya Rp 25 ribu. Kontributor detiksurabaya.com mengaku bisa memperoleh pendapatan Rp 1 juta per bulan.

Tabel II.18 Upah Riil Jurnalis di Kota Kediri Tahun 2011

Media	Status	Upah (Masa Percobaan)	Upah (Karyawan)
Elshinta	Kontrak	-	-
RWS	Kontrak	300.000	800.000
KSTV	Tetap	300.000	500.000
Doho TV	Kontrak	400.000	400.000
TVRI	Kontrak	2.000.000	2.000.000
ANTV	Stringer	-	-
Antarajatim	Kontrak	1.000.000	1.500.000
Beritajatim	Kontributor	700.000	900.000
Detiksurabaya	Kontributor	-	1.000.000
JTV	Stringer	300.000	650.000
Trans TV	Stringer	700.000	-
Memo	Tetap	350.000	450.000
Radar Kediri	Tetap	500.000	1,5 -2,5 juta
Duta	Kontributor	500.000	500.000
Sindo	Percobaan	1.600.000	-

Hampir semua (93%) responden menyatakan upah yang mereka terima kurang layak. Dari 15 responden, hanya 1 responden yang mengaku upahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Minimnya upah, menurut responden, membuat jurnalis sulit bekerja profesional. Kondisi ini juga mengakibatkan jurnalis rentan menerima amplop yang sebenarnya sudah tegas dilarang perusahaan. Ironisnya, larangan menerima amplop ternyata tak diikuti pemberian kesejahteraan yang cukup.

Bagaimana menyalasi upah yang minim, agar tetap bertahan hidup layak? Sebagian besar responden menekuni peker-

jaan sampingan. Dari hasil survei, 86,7 persen responden, atau tepatnya 13 dari 15 responden, mengaku memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan ini ada yang terkait dengan jurnalistik, ada juga yang tidak. Salah seorang responden mengaku memiliki usaha penjualan bawang goreng kemasan. Penghasilan yang diterima mencapai Rp 2 juta per bulan, jauh di atas pendapatannya sebagai jurnalis yang hanya Rp 450 ribu per bulan. Ada juga responden yang menekuni usaha jual beli batu akik. Rata-rata penghasilan yang diperoleh Rp 1 juta, setara dengan upah yang diterima sebagai jurnalis.

Siasat berbeda dilakukan jurnalis televisi lokal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka memilih “rangkap jabatan” dengan ikut membantu kontributor atau stringer televisi nasional. Seorang responden jurnalis televisi lokal mengaku bisa memperoleh pendapatan tambahan Rp 750 ribu-Rp 1,5 juta dengan membantu kontributor televisi nasional.

II.8 Kota Kendari

Jumlah penduduk 2010	: 289 ribu (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 90 miliar (2010)
APBD	: Rp 600 miliar (2011)
Upah minimum kota	: Rp 860 ribu (2010)
Upah layak versi AJI	: Rp 2,9 juta (2011)
Jumlah media cetak dan online 2010	: 13 (2010)
Jumlah media penyiaran	: 12 (Radio), 1 (TV)



Penemu, penulis dan pembuat peta pertama tentang Kendari adalah Vosmaer (berkebangsaan Belanda) tahun 1831. Pada tanggal 9 Mei 1832 Vosmaer membangun istana raja Suku Tolaki bernama Tebau di sekitar pelabuhan Kendari, dan setiap tanggal 9 Mei pada waktu itu hingga sekarang dirayakan sebagai hari jadi Kota Kendari.

Pada zaman kolonial Belanda, Kendari adalah Ibukota

Kewedanan dan Ibukota Onder Afdeling Laiwoi. Kota Kendari pertama kali tumbuh sebagai ibukota kecamatan, dan selanjutnya berkembang menjadi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Dengan terbitnya Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Kota Kendari ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayahnya +/- 75,76 Km².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978, Kendari menjadi Kota Administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kendari, Mandonga dan Poasia dengan 26 kelurahan dan luas wilayah +/- 18.790 Ha. Mengingat pertumbuhan dan perkembangan Kota Kendari, maka dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 Kota Kendari ditetapkan menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari, dengan luas wilayah mengalami perubahan menjadi 295,89 Km².

Pemetaan Industri Media

Berdasarkan data Dewan Pers³¹ dan SPS³² tahun 2010, tercatat ada 14 surat kabar. Untuk harian, ada Kendari Ekspres, Kendari Pos, Media Sultra, Poskita, Radar Buton, Radar Sultra, Sultra Pos, Wuna Suara. Untuk mingguan: Sulawesi News, Harmonikel, Keraton News, Media Konawe, Nusantara Pos dan Suara Sultra. Dari 14 surat kabar, hanya Poskita dan Radar Buton yang kantornya tidak berada di Kendari. Untuk mingguan, semuanya berkantor di Kendari.

Pertumbuhan oplah surat kabar di Sulawesi Tenggara. Menurut data SPS, dalam tiga tahun ini ada tren penurunan bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Dalam data

31 Dewan Pers, Data Pers Nasional 2010, Jakarta 2010, hal. 215.

32 SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010.

SPS, oplah surat kabar di Sulawesi Tenggara tahun 2010 sebanyak 21.000 eksemplar. Rinciannya: surat kabar harian 16.500 eksemplar, 6.500 surat kabar mingguan. Bandingkan dengan dua tahun sebelumnya yang mencapai 28.000 eksemplar, dengan rincian: 21.500 oplah surat kabar harian, 6.500 surat kabar mingguan.

Tabel II.19 Jumlah Media dan Oplahnya di Sulawesi Tenggara 2010

SKH	Oplah	SKM	Oplah	Total Media	Oplah Total
8	14.500	5	6.500	13	21.000

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010 SPS DAN INFOMEDIA

Kendari Pos, koran pertama yang terbit di Sulawesi Tenggara. Berdiri 9 September 1999, harian ini dirintis oleh PP Bittikaka. Awalnya bernama Media Karya di bawah bendera Yayasan Pers Karya Nasional, lalu berganti menjadi Media Kita. Tanggal 4 September 1995 perusahaan ini bergabung dengan Jawa Pos Group dan Yayasan Karya Pers Nasional yang selama ini menerbitkan Media Kita dialihkan ke badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Bernaung di bawah bendera PT Media Kita Sejahtera, komposisi pemegang saham terdiri Dahlan Iskan, Fajar Group, H.M. Alwi Hamu dan P.P Bittikaka. Kendari Pos terbilang satu-satunya perusahaan media di Sultra yang sehat secara finansial, dengan oplah mencapai 8.000 eksemplar. Segmentasi pasarnya instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat umum.

Kendari Ekspres, didirikan tahun 1999 oleh Alwi Hamu, Direktur Pengembangan Anak Perusahaan Jawa Pos Grup. Secara struktural Kendari Ekspres di bawah asuhan Fajar Group Makassar, yang tidak lain bernaung di bawah bendera Jawa Pos Group. Mula-mula terbit mingguan lalu tahun 2003 secara resmi menjadi harian. Pemegang saham terdiri dari Alwi Hamu, Syamsu Nur dan Hanura. Oplah bermain antara 2.500-2.800

eksemplar. Segmen pasarnya instansi pemerintah dan swasta.

Media Kita, dibangun tahun 2005, merupakan perusahaan media milik perseorangan, tidak terkait dengan jaringan media tertentu. Pemegang saham, Lily, Benny Hidayat. Oplah sekitar 600-800 eksemplar, dengan segmen pasar instansi pemerintah dan swasta. Kondisi finansial media yang bernaung dibawah PT Nuansa Media Merdeka ini tidak sehat sehingga kesulitan mengangkat karyawan tetap dan melakukan pengembangan.

Pos Kita, terbilang baru seumur jagung. Muncul tahun 2008 lalu, perusahaan media ini awalnya berbentuk perseoran terbatas namun belakangan berubah menjadi yayasan. Pemegang sahamnya Bittikaka Family, yang juga pemegang saham di Kendari Pos. Segmen pasarnya instansi pemerintah dan swasta. Oplah sekitar 600 eksemplar. Kondisi finansialnya tidak sehat, kadang terbit kadang tidak. Besaran gaji karyawan tergantung pemasukan bulan berjalan.

Untuk radio, di daerah ini tercatat ada 12, dan 1 televisi. Radio terdiri dari Cakrawala FM 100,0 Mhz, Eks Radio FM 101,0 Mhz, Gema Kendari FM 92,4 Mhz, L Radio FM, Lawero FM 100,2 Mhz, M Radio Kendari, Radio Ozzon, Raudhah FM 101,8, Suara Kendari FM, BM Radio, Radio Syaikh Abdul Wahid FM 98,6 Mhz, dan Techno FM. Dari 12 radio itu, Eks Radio, Radio Gema, M Radio, Raudhah FM dan SK FM yang berkantor di Kendari. Selebihnya di Bau-bau dan Bombana.

Untuk televisi, tercatat hanya ada satu, yaitu Kendari TV. Ini merupakan televisi semata wayang di Sulawesi Tenggara. Televisi ini didirikan oleh Yayasan Pencinta Alam (Yascita), LSM yang memperjuangkan isu lingkungan. LSM ini juga membangun radio komunitas bernama Swara Alam. Selain itu, Yascita pernah mencoba mendirikan harian sore bernama Kiniwia, tapi umurnya tidak panjang. Di bawah bendera PT Swara Alam Media Group, tahun 2003 Kendari TV resmi mengudara.

Media online di Sulawesi Tenggara baru muncul medio 2010: Kendari News. Media online milik perusahaan media Kendari Pos itu resmi diluncurkan pada 2 Oktober 2010.

Upah Minimum dan Upah Layak. Upah minimum Kendari di tahun 2010 adalah Rp 860 ribu, lebih besar Rp 90 ribu dibanding tahun sebelumnya yang Rp 770 ribu. Jumlah itu, tentu saja masih sangat jauh dari kebutuhan layak seorang jurnalis di daerah tersebut yang menurut survei AJI Kendari sebesar Rp 2,9 juta di tahun 2011. Rincian kebutuhannya, ada di bawah ini:

Tabel II.20 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Kendari Tahun 2011

Kebutuhan	Jumlah
Makanan dan minuman	Rp 1.115.000
Perumahan dan fasilitas	Rp 250.000
Sandang	Rp 505.000
Aneka kebutuhan lain	Rp 1.102.000
Jumlah	Rp 2.972.000

Upah Riil Jurnalis Kendari

Ada empat media cetak yang eksis di Sultra, satu stasiun televisi lokal, Kendari TV, serta satu media online, Kendari News. Media cetak itu masing-masing Harian Kendari Pos, Harian Kendari Ekspres. Keduanya adalah anak perusahaan Jawa Pos Group. Dua lainnya adalah Harian Media Sultra dan Harian Pos Kita. Upah riil karyawan yang baru ditetapkan menjadi karyawan umumnya mengambil standar UMK (dewan pengupahan) Kota Kendari. Pada tahun 2010 Dewan Pengupahan menetapkan UMK Kota Kendari sebesar Rp 900.000.

Sekitar bulan November 2010 lalu, Kendari Pos menjadikan beberapa jurnalis menjadi karyawan tetap dengan gaji pokok Rp 900.000. Salah satunya masuk di Kendari Pos sejak

Februari 2006, yang artinya baru menjadi karyawan setelah bekerja selama empat tahun. Gaji sebesar itu dipotong Jamsostek sebesar Rp 18.500, sehingga gaji bersih yang diterima sebesar Rp 881.500.

Harian Kendari Ekspres, awal Desember 2010, mengangkat karyawan tetap dengan gaji Rp 900.000. Karena tidak memberikan Jamsostek pada karyawannya, maka tidak ada potongan sehingga gajinya diterima utuh. Di Media Sultra, kecuali level redaktur yang memang sejak awal ditetapkan sebagai karyawan tetap, belum pernah mengangkat karyawan tetap sejak berdiri tahun 2005. Wartawan yang bekerja di lapangan seluruhnya masih berstatus magang.

Pada Harian Pos Kita, gaji karyawan masih tergantung berapa besar penghasilan koran bulan berjalan. Media ini baru berdiri tahun 2008 lalu. Belum ada pekerja yang dijadikan karyawan tetap. Awalnya perusahaan itu berbentuk perseroan terbatas sebelum akhirnya diubah menjadi yayasan.

Untuk upah riil karyawan tetap di Kendari TV ditetapkan sebesar Rp 790.000. Kendari TV terakhir kali mengangkat karyawan tetap sekitar 3 tahun lalu, yakni tahun 2007, dengan upah yang didasarkan pada UMK tahun 2007 sebesar Rp 970.000.

II.9 Kota Kupang

Jumlah Penduduk	: 335.585 jiwa (2010).
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 58,083 miliar (2011)
APBD	: 602.688.588.833 (2010)
Upah minimum	: Rp 850.000 (2010)
Upah layak versi AJI	: Rp 3.929,228 (2011)
Jumlah media cetak 2010	: 18
Jumlah media penyiaran	: 13 (Radio), 5 (TV)



Nama Kupang sebenarnya berasal dari nama raja yang memerintah daerah ini sebelum datangnya bangsa Portugis di

Nusa Tenggara Timur, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan pada abad ke-15. VOC menyadari pentingnya kota ini dan mengambil dari tangan Portugis pada 1653. Nama Lai Kopan oleh Belanda disebut Koepan, dan dalam bahasa sehari-hari berkembang menjadi Kupang.

Untuk pengamanan Kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di sekitar Teluk Kupang. Pengamanannya ditingkatkan pada 23 April 1886 dengan ditetapkannya batas-batas Kota Kupang, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 171 Tahun 1886 dengan luas wilayah kurang lebih 2 km². Itulah sebabnya tanggal 23 April 1886 itu ditetapkan sebagai hari lahir Kota Kupang.

Status Kupang ditingkatkan menjadi Kota Administratif Kupang pada 18 September 1978. Sebelumnya, daerah ini disebut sebagai kecamatan Kota Kupang pada 12 Mei 1969. Setelah itu, statusnya naik lagi menjadi Kota Kupang dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, 20 Maret 1996³³.

Pertumbuhan Jumlah Media

Berdasarkan data Serikat Penerbit Surat kabar³⁴ tahun 2010, setidaknya ada 10 surat kabar di Nusa Tenggara Timur. Untuk radio ada 24, dan televisi berjumlah tujuh. Untuk harian, ada Erende Pos, Flores Pos, NTT Pos, Pos Kupang, Timor Express, Harian Cursor, Kupang Ekspres, mingguan ada Buser Timur, Spirit NTT, Surya Inside, Dian, dan bulanan Kunang-Kunang dan Warta. Semua terbit di Kupang, kecuali Flores Pos yang terbit di Flores dan KunangKunang yang terbit di Ende, Flores.

33 Sejarah Kota Kupang, yang diakses dari website Pemerintah Kota Kupang. <http://kotakupang.com/webkota/content/view/17/33/>

34 SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010, hal. 42.

Tabel II.21 Jumlah dan Oplah Surat kabar di Nusa Tenggara Timur 2010

SKH		SKM		Tabloid		Bulanan		Total	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
7	46.500	3	10.700	2	2.000	1	1.000	13	64.200

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010: SPS DAN INFOMEDIA

Dalam soal jumlah media, SPS mencatat ada pertumbuhan cukup besar di NTT. Di tahun 2008 dan 2009, media yang dicatat SPS hanya lima selama dua tahun itu, sebelum akhirnya naik menjadi 13 di tahun 2010. Pertumbuhan ini juga berdampak pada penambahan eksemplar di daerah ini. Di tahun 2008 dan 2009, 51.200 eksemplar. Bandingkan dengan tahun 2010, yang jumlahnya naik menjadi 64.200 eksemplar, alias naik 13 ribu eksemplar.

Dari 24 radio, ada beberapa yang mengudara di Kupang yaitu: Radio AFB 95,2 Mhz, Radio DMWS 103,5 Mhz, Radio Gema Inti 89,3 Mhz, Radio Kaesera Voice 97,6 Mhz, Radio Lizbeth 98,4 Mhz, Radio Madika 91,7 Mhz, Radio Swara HAM 88,5 Mhz, Radio Swara Kupang 96 Mhz, Radio Swara Timor 90,1 Mhz, Radio Tirilolok 101,1 Mhz, RRI Kupang 90,9 Mhz, RRI Kupang 94,4 Mhz, RRI Kupang 101,9 Mhz. Selebihnya tersebar di Sumba Timur, Belu, Timor Tengah Selatan, Belu, Rote Ndao dan Timor Tengah Utara.

Untuk televisi, ada tujuh stasiun yaitu: Belu TV 37 UHF, Binmafo TV 51 UHF, Madika TV 48 UHF, Timor TV 44 UHF, AFB TV 40 UHF, Trans TV 52 UHF dan TVRI Kupang. Lima stasiun yang disebut belakangan berada di Kupang. Selebihnya ada di luar Kupang, yaitu Belu TV di Belu, Binmafo di Timor Tengah Utara³⁵.

Upah Minimum dan Upah Layak. Di Nusa Tenggara Timur, upah minimum provinsi di tahun 2011 sebesar Rp 850.000 alias naik Rp 50.000 (6,25%) dari tahun sebelumnya: Rp

35 Dewan Pers, data Pers Nasional 2010, Jakarta 2010.

800.000. Jumlah itu tentu saja masih jauh dari layak untuk memenuhi kebutuhan jurnalis. Sebab, berdasarkan hasil survei kebutuhan layak yang dilakukan AJI Kupang, standar upah layak minimum sebesar Rp 3.929.228 per bulan. Standar upah layak minimum ini berdasarkan komponen dan harga kebutuhan hidup layak setelah dilakukan survei disertai analisa terhadap beberapa kebutuhan pokok jurnalis, meliputi: kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan hidup lainnya.

Tabel II.22 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Kupang Tahun 2011

Makanan dan Minuman	Rp 1.454.975
Perumahan dan fasilitas	Rp 250.000
Sandang	Rp 657.300
Aneka kebutuhan lain	Rp 1.209.750
Tabungan (10% dari total upah)	Rp 357.203
Jumlah	Rp 3.929.228

Upah Riil Jurnalis

Dalam survei yang dilakukan AJI Kota Kupang terhadap jurnalis lima media cetak masing-masing tiga koran harian dan dua tabloid, serta lima jurnalis media elektronik, masing-masing dua radio lokal, dua televisi lokal serta satu media online, membuktikan bahwa masih ada jurnalis yang bekerja di sejumlah media tersebut, yang tidak diberikan upah dari hasil kegiatannya sebagai jurnalis dan ada yang sudah diberi upah namun masih di bawah standar UMP NTT 2010 sebesar Rp 850.000.

Ada pula media yang telah menerapkan standar upah melampaui UMP, dengan upah Rp1.800.000 per bulan. Sebagian besar media di Kota Kupang belum memiliki serikat pekerja (SP) atau lembaga sejenis yang konsisten memperjuangkan hak jurnalis di masing-masing perusahaan media. Terhadap masalah ini, AJI Kota Kupang mendesak kepada jurnalis di masing-masing media untuk mendirikan serikat guna melakukan advokasi hak jurnalis yang diabaikan.

Tabel II.23 Upah Riil Jurnalis di Kota Kupang Tahun 2011

Media	Upah	Keterangan
Surat Kabar Harian Pos Kupang (Kompas Group)	Rp1.800.000/bulan (untuk yang memiliki masa kerja 10 tahun).	Upah ini masih ditambah dengan uang transportasi, jika jurnalis yang bersangkutan melakukan liputan dalam radius jarak tertentu/keluar kota sebesar Rp100.000. karyawan mendapatkan asuransi Jamsostek dan asuransi kesehatan.
Harian Pagi Timor Express (Jawa Pos Group)	Rp1.700.000/bulan (sudah termasuk uang transportasi dan uang makan sebesar Rp10.000/hari).	Wartawan mendapat asuransi kesehatan dan keselamatan kerja.
Harian Kota Kursor	Rp 650.000/bulan. (sudah termasuk uang transportasi dan uang konsumsi bulanan).	Karyawan mendapat asuransi Jamsostek.
Tabloit Vista	Jurnalisnya tidak diberikan upah karena kondisi perusahaan sedang tidak sehat akibat mismanajemen.	Di tahun 2008 silam, upah wartawan Vista Rp 1 juta/ bulan. Upah sudah termasuk tunjangan, uang transportasi dan uang konsumsi selama satu bulan.
Tabloid Aktualita-NTT	Rp 750.000/bulan.	Upah sudah termasuk tunjangan, uang transportasi dan uang konsumsi selama satu bulan. Tidak ada asuransi kesehatan maupun asuransi keselamatan kerja.
Radio Suara Timor	Belum memberikan upah.	Reporter hanya diberikan penghargaan berupa fee iklan yang diperolehnya sebesar 25 persen untuk setiap iklan. Di tahun 2008, jurnalisnya mendapatkan upah Rp 650.000/bulan.
Radio Tirilolok	Rp1.500.000/bulan.	
Madika TV	Belum memberikan upah kepada para karyawannya.	Di tahun 2008, wartawan mendapat upah Rp 650.000/bulan.
9. AFB (Anak Flo-bamora Broadcast) TV	Rp 750.000/bulan.	
10. NTT Online	Tidak ada gaji bulanan, mereka hanya dibayar per berita dengan tarif sekitar Rp 50.000/berita.	

BAHAN: HASIL SURVEI AJI KUPANG, 2011

II.10 Kota Bandar Lampung

Jumlah penduduk	: 879.651 (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp118 miliar (2011)
APBD	: Rp1,044 Triliun (2011)
Upah Minimum Kota	: Rp 865.000 (2011)
Upah layak versi AJI 2011	: Rp 2,568,462 (2011)
Jumlah media cetak 2010	: 19 (2010)
Jumlah media penyiaran	: 1 (radio), 4 (TV)



Kota Bandar Lampung, ibukota Provinsi Lampung, merupakan pintu gerbang utama Pulau Sumatera. Lokasinya kurang

lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat pendidikan dan kebudayaan serta perekonomian di Provinsi Lampung.

Sebelum 18 Maret 1964, Provinsi Lampung merupakan keresidenan. Statusnya ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukotanya Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983 Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung diganti menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung sejak 17 Juni 1983 dan tahun 1999 berubah menjadi kota Bandar Lampung³⁶.

Pertumbuhan media

Di Lampung, SPS³⁷ mencatat ada 12 harian dan 17 mingguan. *Koran Lampung, Kupas Tuntas, Lampung Ekspres Plus, Lampung Post, Radar Lambar, Radar Lampung, Radar Lambar, Radar Lamteng, Radar Tanggamus, Radar Tulangbawang, Rakyat Lampung, dan Tribun Lampung*. Mingguan: *Analisis, Bandarlampung News, Diva TV, Dinamika News, Faktual, Fokus, Handal Lampung, Jurnal Lampung, Koridor, Krakatau Pos, Media Ekonomi, Media Merdeka, Siger Post, Sumatera Post, Tabloid Perempuan, Trend Otomotif Lampung (TOL), dan Trans Lampung*.

Hampir separuh dari surat kabar itu berkantor di luar Bandar Lampung: *Kupas Tuntas* di Pagar Alam, *Radar Lambar* di Kalianda Lampung Selatan, *Radar Lamteng* di Lampung Tengah, *Radar Tanggamus* di Tanggamus, *Radar Lambar* di Liwa,

36 Sejarah Kota Bandar Lampung berasal dari Wikipedia. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung

37 SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010, hal 42.

Radar Tulang Bawang di Menggala, *Radar Lamteng* di Metro, media *Lampung Timur* di Purworejo, *Jurnal Lampung* di Lampung Tengah, dan *Media Ekonomi* di Tulang Bawang.

Tabel II.24 Tabel: Media dan Oplah Surat kabar di Lampung Tahun 2010

SKH		Mingguan		Tabloid		Majalah		Jumlah	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
11	219.800	14	186.520	2	81.300	1	2.000	28	489.620

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010, SPS DAN INFOMEDIA

Dari segi jumlah media, SPS tak mencatat ada penambahan cukup besar di Bandar Lampung. Di tahun 2009, SPS mencatat jumlah media di Lampung ada 29 buah, artinya ada satu media yang menghilang dari peredaran. Jumlah di tahun 2010 ini sama persis dengan jumlah media di tahun 2008, yaitu 28 buah. Namun, fakta yang cukup berbeda dalam hal pertumbuhan oplah. Meski di tahun 2010 ada penurunan jumlah media, tapi jumlah oplahnya justru lebih besar dari tahun 2009 yang mencapai 212.300 eksemplar. Jika dibandingkan dengan situasi tahun 2008, jumlahnya lebih besar lagi karena saat itu hanya 203.300 eksemplar.

Mengenai jumlah stasiun radio, Dewan Pers³⁸ mencatat ada 3 stasiun, yaitu *Tuba FM 92,3 Mhz*, *Ramosta FM* dan *Mix Female Radio*. Dari tiga stasiun radio, hanya *Mix Female Radio* yang tercatat berkantor pusat di Bandar Lampung. Selebihnya, di luar kota yaitu: *Tuba FM* di Kabupaten Tulang Bawang, *Ramosta FM* di Lampung Barat.

Untuk televisi, tak tersedia data di SPS. Namun menurut Wikipedia, setidaknya ada empat stasiun TV di daerah ini. Masing-masing: *Tegar TV 42 UHF*, *TVRI Lampung 40 UHF*, *Lampung Mega Televisi 42 UHF* dan *Siger TV 46 UHF*. Se-

38 Dewan Pers, Data Pers Nasional 2010, Jakarta 2010.

muanya berada di Bandar Lampung, ibukota Lampung.

Upah Minimum dan Upah Layak

Upah minimum Provinsi Lampung pada tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 855.000, naik sebesar Rp 87.500 (11.40%) dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 767.500. Dengan upah minimum seperti ini, maka upah minimum Lampung kalah besar dari Nanggroe Aceh Darusalam (Rp 1,3 juta), Sumatera Utara (Rp 1 juta), Sumatera Barat (Rp 1 juta), Riau (Rp 1,1 juta), Kepulauan Riau (Rp 975 ribu), Jambi (Rp 1 juta) dan Sumatera Selatan (Rp 927 ribu).

Besar upah minimum ini, tentu saja masih dianggap jauh dari layak. Menurut survei kebutuhan layak bagi jurnalis yang diselenggarakan AJI Bandar Lampung, upah layak jurnalis di kota ini seharusnya minimal Rp 2,5 juta. Adapun rincian kebutuhannya sebagai berikut:

Tabel II.25 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Kebutuhan	Jumlah
Makanan dan minuman	Rp 1.070.050
Perumahan dan fasilitas	Rp 250.000
Sandang	Rp 147.465
Aneka kebutuhan lain	Rp 867.450
Tabungan (10% dari total upah)	Rp 233.497
Jumlah	Rp 2.568.462

BAHAN: HASIL SURVEI UPAH LAYAK AJI BANDAR LAMPUNG 2011

Upah Riil Jurnalis

Hasil survei upah layak yang dilakukan AJI Bandar Lampung³⁹, mendapatkan ada tiga sistem perekrutan umum terhadap jurnalis,

39 Responden yang disurvei berasal dari delapan media (cetak dan elektronik) di Bandar Lampung

yakni melalui magang, kontrak, dan karyawan. Media yang menerapkan sistem magang adalah, *Lampung Post*, *Radar Lampung*, dan *Radar TV*. Penilaian pada saat magang menentukan apakah jurnalis tersebut layak untuk dikontrak atau tidak.

Sementara itu, media yang tidak menggunakan sistem magang adalah *Tribun Lampung*, *The Rakyat Lampung*, *Kupas Tuntas*, *Lampung TV*, dan *Siger TV*. Jurnalis yang bekerja pada media yang tidak menggunakan sistem magang ini langsung diberikan kontrak atau hanya dibayar berdasarkan berita yang tayang atau diterbitkan. Upah jurnalis tertinggi yang masih dalam status magang ini adalah yang bekerja di *Lampung Post* sebesar Rp 1.266.000, sedangkan terendah yang bekerja di *Radar TV* sebesar Rp 500.000.

Status kontrak diberikan kepada jurnalis yang dianggap telah lulus magang dilakukan oleh *Lampung Post*, *Radar Lampung*, dan *Radar TV*. Ada pula beberapa media yang langsung memberikan status kontrak kepada jurnalisnya seperti *Tribun Lampung*, *The Rakyat Lampung*, *Kupas Tuntas*, *Lampung TV*, dan *Siger TV*. Upah tertinggi jurnalis dalam status kontrak diberikan *Radar Lampung* sebesar Rp 2.110.000, sedangkan terendah yakni *Radar TV* sebesar Rp 710.000.

Status karyawan tetap umumnya diberikan setelah jurnalis melewati masa kontrak. Upah jurnalis tertinggi yang telah berstatus karyawan dinikmati oleh jurnalis *Radar Lampung*, yaitu sebesar Rp 2.310.000. Sedangkan upah paling rendah dialami jurnalis di *Radar TV* sebesar Rp 1.000.000. Media lainnya, seperti *The Rakyat Lampung*, *Kupas Tuntas*, dan *Siger TV*, belum mempunyai jurnalis yang diangkat menjadi karyawan tetap.

Bagaimana kondisi pengupahan jurnalis di daerah ini? Untuk media cetak yang menerapkan sistem magang, upah tertinggi untuk jurnalis diberikan *Lampung Post* sebesar Rp. 1.266.000, dan terendah *Radar TV* sebesar Rp 1.000.000. Sementara media cetak lainnya, *Tribun Lampung*, *The Rakyat*

Lampung, dan *Kupas Tuntas* tidak menerapkan sistem magang. Jurnalis langsung diberikan kontrak kerja selama satu tahun.

Untuk jurnalis media cetak berstatus kontrak, upah tertinggi diberikan *Radar Lampung* sebesar Rp 2.110.000. Sementara upah terendah bagi jurnalis berstatus kontrak diberikan *Kupas Tuntas* dengan penghasilan sebesar Rp 1.000.000.

Kemudian upah tertinggi bagi jurnalis yang sudah berstatus karyawan, diberikan *Radar Lampung* yakni sebesar Rp. 2.310.000. Dan upah terendah diberikan *Lampung Post* dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.726.000. Sementara itu, media cetak lain seperti *The Rakyat Lampung* dan *Kupas Tuntas*, hingga saat ini masih belum ada jurnalis yang berstatus karyawan.

Media elektronik di Lampung yang menerapkan sistem magang saat ini hanya *Radar TV* dengan memberikan upah per bulan Rp. 500.000. Sementara, *Lampung TV* dan *Siger TV* tidak menerapkan sistem magang. Jurnalis langsung dibayar per berita yang tayang.

Di Lampung umumnya media elektronik menerapkan sistem kontributor dengan pembayaran per berita yang tayang, seperti di *Lampung TV* dan *Siger TV*, sementara *Radar TV* menerapkan sistem kontrak.

Media elektronik yang memberi upah per bulan tertinggi dengan sistem kontributor (kontrak) adalah *Lampung TV*, dengan perhitungan jika rata-rata berita lokal yang tayang dalam satu bulan adalah 20 berita. Dan upah terendah jurnalis yang berstatus kontrak diberikan *Radar TV* sebesar Rp 710.000.

Kemudian, untuk jurnalis media elektronik yang sudah berstatus karyawan, upah tertinggi diberikan *Lampung TV* dengan *take home pay* sebesar Rp 1.150.000 dan upah terendah diberikan *Radar TV* sebesar Rp 1.000.000. Sementara *Siger TV*, untuk saat ini belum mempunyai jurnalis yang berstatus karyawan.

Tabel II.26 Upah Riil Jurnalis di Kota Bandar Lampung Tahun 2011

Media	Magang	Kontrak	Karyawan
Lampung Post	1.266.000	1.626.000	1.726.000
Radar Lampung	1.000.000	2.110.000	2.310.000
Tribun Lampung	-	1.799.000	2.199.000
The Rakyat Lampung	-	1.490.000	-
Kupas Tuntas	-	1.000.000	-
Radar TV	500.000	710.000	1.000.000
Lampung TV	-	2.000.000	1.150.000
Siger TV	-	750.000	-

*LAMPUNG TV DAN SIGER TV MENGGUNAKAN SISTEM KONTRIBUTOR, DIBAYAR PER BERITA YANG TAYANG.
BAHAN: HASIL SURVEI AJI BANDAR LAMPUNG, 2011

II.11 Kota Makassar

Jumlah Penduduk	: 1.339.374 jiwa (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 199,339 miliar (2010)
APBD	: Rp 1,1 triliun (2010)
Upah Minimum Kota	: Rp 1,1 juta (2011)
Upah Layak Versi AJI	: Rp 4.037.226 (2011)
Jumlah Media Cetak 2010	: 65 (Surat Kabar)
Jumlah Media TV dan Radio 2010	: 17 (Radio), 2 (TV)



Kota Makassar bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Tallo pada penghujung abad XV. Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI, Benteng Rotterdam di bagian utara mulai didirikan. Di bawah kekuasaan Kerajaan Gowa, pada masa itu terjadi peningkatan aktifitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan Internasional. Dalam tempo seabad, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka sampai akhirnya jatuh ke tangan Belanda, 1669, setelah melalui perang yang panjang.

Di masa penjajahan Belanda, ekonomi Makassar tumbuh, namun tak secepat setelah Indonesia merdeka. Pada akhir 1950-an, kota ini menjadi kota provinsi. Antara 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih

90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang, lebih dari setengahnya merupakan pendatang dari wilayah luar kota. Banyaknya pendatang ini tercermin dari penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang. Baru pada 1999 kota ini kembali dinamakan Makassar, tepatnya pada 13 Oktober 1999, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999⁴⁰.

Pertumbuhan Media

Menurut data Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) 2010⁴¹, di Sulawesi Selatan terdapat 40 Surat Kabar, dengan total oplah 177.000 eksemplar. Rinciannya, 6 harian, 19 surat kabar mingguan, 5 tabloid, 10 berupa majalah. Jika merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah surat kabar di Sulawesi Selatan bertambah cukup signifikan. Di tahun 2008, tercatat ada 31 buah. Tahun berikutnya, turun menjadi 28 buah, sebelum akhirnya bertambah sebanyak 12 surat kabar di tahun 2010.

Tabel II.27 Media dan Oplah di Sulawesi Selatan, 2010

SKH		SKM		Tabloid		Majalah		Total	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
6	120.000	19	23.000	5	5.000	10	29.000	40	177.000

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010, INFOMEDIA DAN SPS, 2010

Ada perbedaan antara data SPS dengan Dewan Pers tentang jumlah Surat Kabar di Sulawesi Selatan. Berdasar pendataan Dewan Pers tahun 2010⁴², jumlah surat kabar harian di provinsi ini sebanyak 8 buah, 33 buah mingguan dan 32 buah bulanan. Harian meliputi *Berita Kota Makassar, Fajar, Tribun*

40 Sejarah rinci Kota Makassar, silakan kunjungi <http://bahasa.makassarkota.go.id/index.php/sejarah-kota-makassar>

41 Media Directory 2010: The Power of Print Media, Infomedia dan Serikat Penerbit Surat kabar (2010), 2010.

42 Pendataan Pers Nasional 2010, Dewan Pers, Desember 2010, hal. 201.

Timur, Ujung Pandang Ekspres, Palopo Pos, Pare Pos, Radar Bone, dan Radar Bulukumba. Empat harian yang disebut lebih dulu, berada di Kota Makassar. Selebihnya tersebar di sejumlah kota lain di Sulawesi Selatan.

Adapun mingguan meliputi: *Aktualita, Bestari, Borgol, Bugis Pos, Demos, Eksis, Fajar Pendidikan, Global News, Indonesia Pos, Inti Berita, Kompak, Koran Rakyat, Kosong Satu, Lacak, Lensa Selatan, Lintas, Makassar Press, Manggala Express, Matahari Timur, Media Aktual, News Pratama, Pembela, Perintis Nusantara, Semangat Pagi, Sinergi, Solusi, Sukses Indonesia, Suara Cikas, Surya Pos, Tegas, Ujungpandang Pos, Utusan, dan Utusan Perempuan.* Semua surat kabar mingguan itu berada di Makassar, kecuali *Lacak* (di Sidrap) dan *Surya Pos* (di Wajo).

Untuk surat kabar yang terbit bulanan terdapat: *Akselerasi, Awas, Bias, Berita Anti Korupsi, Corong Rakyat, Global News, Info Indonesia, Karya, Kibar Indonesia, Komando Plus, Kontrol, Makassar Pena, Makassar Terkini, Media Nasional, Mitra Media, Metro Watampone, Mitra Plus Pendidikan, Nuansa Kota, Pecinan Terkini, Polemaju Pratama, Profils, Rajawali Pos, Suar Indonesia, Suara Reformasi, Surita Indonesia, Surya Timur, Target Tuntas, Transparansi, dan Waktoe.* Semua media ini berada di Makassar, kecuali *Rajawali Pos* (di Watampone) dan *Surlita Indonesia* (di Wajo, Sengkang).

Menurut data Dewan Pers, di Sulawesi Selatan terdapat 28 stasiun radio. Lebih dari separuhnya berlokasi di Makassar. Inilah daftarnya: *Gamasi FM, Prambors FM, Bharata FM, Madama FM, Mitra Bayu AM, Al Ikhwan FM, Cempaka Asri FM, Delta FM, Radio Fajar FM, Cristy AM, Smart FM, SP FM, Telstar FM, Venus FM, Top FM, Sonata FM dan EBS Unhas FM.*

Sedangkan jumlah stasiun TV di Sulawesi Selatan, menurut data Dewan Pers 2010, ada tiga buah yaitu *Fajar TV* (49 UHF), *Makassar TV* (23 UHF), dan *Mitra TV* (22 UHF).

Dari ketiganya, Mitra TV tak berlokasi di Makassar, tapi di Kabupaten Sidrap.

Upah Minimum dan Upah Layak

Upah Minimum Provinsi 2011 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Sulawesi Selatan adalah Rp 1. 100.000,- . UMP ini ditetapkan melalui SK Gubernur Desember Tahun 2010, setelah dibahas oleh Dewan Pengupahan Sulawesi Selatan. Namun ada catatan dibalik penetapan UMP ini, yakni jika ada perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai UMP, maka perusahaan tersebut harus membuktikan neraca keuntungan dengan legitimasi audit akuntan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan.

Upah minimum sebesar itu, masih jauh dari standar layak yang ditetapkan oleh AJI Makassar. Berdasarkan hasil survei upah layak yang dilakukan AJI Makassar pada 15 – 31 Desember 2010, ditemukan bahwa upah layak untuk jurnalis baru di daerah ini sebesar Rp 4.037.226. Jika dibandingkan dengan upah minimum provinsi, jumlah upah minimum provinsi hanya seperempat dari upah layak AJI Makassar.

Tabel II.28 Kebutuhan Layak Jurnalis Makassar 2011

Kebutuhan	Jumlah
Makanan dan Minuman	Rp 1.819.000
Perumahan dan Fasilitas	Rp 367.021
Sandang	Rp 559.167
Tabungan (10% dari total upah)	Rp 367.021
Jumlah	Rp 4.037.226

BAHAN: HASIL SURVEY AJI MAKASSAR, 2010

Upah dan Kesejahteraan Jurnalis

Berdasar hasil survey yang dilakukan AJI Makassar, tingkat kesejahteraan jurnalis di daerah ini sangat tergantung kepada jenis medianya. Ada yang mendapatkan upah bulanan, namun

ada pula yang mendapatkan upah sesuai berita yang dimuat. Dari sebagian besar responden yang disurvei diperoleh data bahwa upah jurnalis baru di daerah ini dekat dengan upah minim provinsi. Tapi jumlahnya sebagian besar masih jauh dari standar upah layak seperti ditetapkan AJI Makassar.

Jurnalis di Fajar Group, misalnya, dibagi menjadi tiga, yaitu organik, non-organik, dan magang. Untuk jurnalis yang berstatus organik, mereka mendapatkan gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi, tunjangan jabatan dan uang makan. Untuk kategori non-organik, upahnya berdasarkan pada nilai berita dan jumlah berita yang dimuat. Sedangkan jurnalis yang berstatus magang mendapatkan upah jika ada penugasan. Secara umum, nilai upah jurnalis di harian Fajar bisa dikategorikan menjadi dua kutub besar: jurnalis yang organik memperoleh upah di atas upah minimum provinsi, sedangkan upah untuk yang non-organik sangat fluktuatif.

Di Koran Tempo edisi Makassar, jurnalis yang belum berstatus karyawan, mendapatkan upah berdasarkan jumlah berita yang dimuat. Selain bisa menulis untuk Koran Tempo, karya jurnalistiknya juga bisa dimuat di Tempo Interaktif. Kepada tim suvey, jurnalisnya merasa puas dengan upah yang diterima karena hampir sama besar dengan hasil perhitungan upah layak AJI Makassar. Namun, jurnalisnya diperkerjakan tanpa ada kontrak dan karena itu tidak ada istilah gaji pokok atau tunjangan. Selain itu, kemungkinan terjadi pemecatan sepihak sangat mungkin terjadi.

Sedangkan jurnalis radio, seperti di Radio Barata dan Radio Suara Celebes, mendapatkan upah sesuai kategori: apakah dia bekerja full time atau part time. Pekerja penuh waktu mendapatkan gaji pokok dan tunjangan kesehatan, serta bisa mendapat tunjangan jabatan. Untuk pekerja paruh waktu, upahnya disesuaikan dengan jam kerja. Berdasar hasil survey AJI Makassar, pekerja full time mendapatkan upah sedikit lebih besar dari

upah minimum, meski masih jauh dari besaran upah layak jurnalis yang ditetapkan AJI Makassar.

Sebagian besar pekerja di kedua radio itu telah memiliki kontrak kerja yang jelas, sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi pemecatan sepihak oleh perusahaan. Kebijakan lain yang bisa menambah penghasilan pekerja radio tersebut adalah adanya kesempatan untuk mendapatkan fee dari penjualan iklan –besar rata-rata fee itu adalah 10 persen dari nilai nominal iklan.

Tak semua pekerja Makassar TV memperoleh upah sesuai dengan ketentuan di provinsi. Jurnalis yang menerima upah sesuai dengan upah minimum provinsi jumlahnya tak banyak, biasanya mereka adalah jurnalis yang memegang jabatan. Namun, seluruh pekerja di stasiun TV ini memiliki kontrak kerja. Jurnalis di Fajar TV juga masih ada yang mendapat upah setengah dari upah minimum provinsi. Lantaran ada yang tak memiliki kontrak, sangat terbuka peluang untuk terjadi pemecatan sepihak.

II.12 Kota Medan

Jumlah penduduk	: 2.109.339 (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 829 Miliar (2011)
APBD	: Rp 2,93 Triliun (2011)
Upah Minimum Kota	: Rp 1.197.000 (2011)
Upah layak versi AJI 2011	: Rp Rp 3.894.583 (2011)
Jumlah media	: 66 (cetak), 9 (online)
Jumlah media penyiaran	: 5 (radio), 2 (TV)



Medan didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi pada tahun 1590. John Anderson, orang Eropa pertama yang mengunjungi Deli pada tahun 1833 menemukan sebuah kampung yang bernama Medan. Kampung ini berpenduduk 200

orang dan seorang pemimpin bernama Tuanku Pulau Berayan sudah sejak beberapa tahun bermukim di sana. Pada tahun 1886, Medan secara resmi memperoleh status sebagai kota, dan tahun berikutnya residen Pesisir Timur serta Sultan Deli pindah ke Medan.

Tahun 1909, Medan menjadi kota yang penting di luar Jawa, terutama setelah pemerintah kolonial Belanda membuka perusahaan perkebunan secara besar-besaran. Pada tahun 1918 Kota Medan resmi menjadi Gemeente (Kota Praja). Seperti sejumlah kota besar lainnya, cengkeraman Belanda di kota ini berakhir setelah Jepang datang 1942. Saat Proklamasi 17 Agustus 1945, administrasi pemerintahan juga mengikuti sistem pemerintahan republik yang baru berdiri.

Awalnya hari jadi Kota Medan diperingati tiap tahun sejak 1970 pada 1 April, memperingati 1 April 1909 saat Belanda pertama kali membuka perkebunan. Penetapan tanggal ini ditentang keras. Wali kota pun membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan. Pada Maret 1975, pemerintah akhirnya menetapkan 1 Juli 1590 sebagai hari jadi kota Medan. Itu adalah hari didirikannya Si Sepuluh Dua Kuta di Areal Medan oleh Guru Patimpus⁴³.

Pemetaan Industri Media

Data SPS menyebut ada 66 surat kabar di Sumatera Utara⁴⁴. Dewan Pers mencatat ada 33 surat kabar harian, 45 mingguan. Radio tercatat ada 5 buah, stasiun TV ada 2 buah. Surat kabar yang ada di kota Medan, antara lain: *Analisa, Andalas, Berita Medan, Berita Sore, Garuda, Gaya Medan, Harian Bersama, Harian Global, Harian Mandiri, Koran Medan, Mandiri, Medan*

43 Bahan diolah dari Wikipedia dan website Pemerintah Kota Medan (www.pemkomedan.go.id)

44 SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010.

Bisnis, Medan Pos, Metro 24 Jam, Metro Asahan, Mimbar Umum, Orbit, Panji Demokrasi, Perjuangan Independen, Portibi, Poskota Sumatera, Pos Metro Medan, Promosi Indonesia, Realitas, Sinar Indonesia Baru, Sinar Keadilan, Skala Indonesia, Suara Sumut, Sumut Pos, Warta Kita, dan Waspada.

Untuk stasiun radio tercatat ada PT Radio Citra Bakti Globalindo, PT Radio Kasyfi Inti Indah Swara, PT Radio Media Indah Suara Handalan, PT Radio Star Serasi Swara, dan Radio Pedagang Galam. Dari lima radio itu, hanya 1 stasiun yang tercatat ada di Medan⁴⁵. Untuk televisi ada PT Daya Angkasa Andalas Indah dan PT Televisi Anak Medan (46 UHF)⁴⁶. Data berbeda soal jumlah TV dan radio disajikan Wikipedia, yang menyebut setidaknya ada empat TV di provinsi ini: *TVRI Medan, Deli TV, Space Toon* dan *DAAI TV*⁴⁷. Untuk radio, jumlahnya jauh lebih banyak. Jika data Dewan Pers menyebut lima radio, Wikipedia menyebut ada 85 radio FM, 37 AM⁴⁸.

Tabel II.29 Jumlah Media dan Oplahnya di Sumatera Utara Tahun 2010

SKH		SKM		Tabloid		Majalah		Jumlah	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
33	378.600	27	44.000	5	10.000	3	15.000	68	447.600

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010: SPS DAN INFOMEDIA

Dari segi jumlah media, dalam tiga tahun ini memang ada pertumbuhan cukup besar di tahun 2010 dibanding tahun 2009. Di tahun 2009, jumlah media tercatat ada 59 media. Jumlah ini sama persis dengan jumlah tahun 2008. Dari segi oplah, pertumbuhannya lebih besar lagi. Jika di tahun 2008

45 Dewan Pers, *Data Pers Nasional 2010*, Jakarta, 2010, hal. 254.

46 Ibid, hal 285.

47 http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan

48 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_stasiun_radio_di_Indonesia

jumlahnya 356.000 eksemplar. Tahun berikutnya menjadi 372.000, sebelum akhirnya menjadi 447.600 ribu.

Perkembangan baru yang bisa dicatat di Medan adalah munculnya media online. Kegagalan dalam merintis media cetak membuat sejumlah jurnalis memberanikan diri untuk mengelola portal berita. Rendahnya biaya menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah wartawan masuk ke bisnis ini. Sebab, mereka tak harus mempekerjakan jurnalis dalam jumlah besar. Mereka cukup memanfaatkan tenaga jurnalis yang tidak terikat, dengan membayarnya berdasarkan hitungan berita yang dimuat. Untuk mengatasi minimnya jumlah berita, yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pemuatan *press release*.

Setidaknya ada 9 media online yang ada di Medan. Masing-masing: *medanpunya.com*, *kabarsumut.com*, *liv1.com*, *inimedanbung.com*, *pphe.com*, *formatnews.com*, *Waspada On Line*, *starnews.com*, dan *DNA Online*.

Upah Minimum dan Upah Layak

Di tahun 2011, upah minimum Kota Medan Rp 1.197.000. Jumlah ini naik sebesar Rp 97 ribu jika dibandingkan tahun 2010 yang sebesar Rp 1,1 juta. Menurut Kepala Dewan Pengupahan Kota Medan, Robert Tambunan, nominal UMK Medan tersebut lebih besar dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berjumlah Rp 1.183.664⁴⁹.

Jumlah ini tentu saja sangat jauh dengan upah layak jurnalis yang disusun oleh AJI Medan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan tim AJI Medan, upah minimal yang seharusnya diterima jurnalis adalah Rp 3,8 juta. Nominal ini lebih dari tiga kali lipat dari upah minimum Kota Medan. Adapun rincian komponen upah layak jurnalis Medan adalah sebagai berikut:

49 Harian Sumut Pos, Berlaku Sejak Januari 2011 UMK Medan Rp1.197.000, 29 Desember 2010.

Tabel II.30 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis di Kota Medan 2011

Makanan dan minuman	Rp 1.528.500
Perumahan dan fasilitas	Rp 400.000
Sandang	Rp 209.100
Aneka kebutuhan lain	Rp 1.402.930
Tabungan (10 persen dari total upah)	Rp 354.053
Jumlah	Rp 3.894.583

Upah Riil Jurnalis

Secara umum, gaji riil jurnalis masih jauh dari upah layak. Dari jurnalis yang disurvei, tak satu pun yang menerima upah layak seperti dirumuskan AJI. Jurnalis baru di *Harian Analisa*, termasuk *Harian Waspada*, upahnya rata-rata Rp 800.000. Di *Waspada*, ada tambahan penghasilan kalau beritanya masuk halaman depan. Di empat media baru, yaitu *Harian Medan Bisnis*, *Sumut Pos*, *Global* dan *Tribun*, upahnya bervariasi. Untuk tiga yang disebut di depan, upah jurnalis baru berkisar Rp 700.000 sampai Rp 800.000. Berbeda dari tiga harian lainnya, *Harian Tribun* (Kompas Group) menggaji reporter baru Rp 1,8 juta.

Tabel II.31 Upah Riil Jurnalis di Kota Medan Tahun 2011

Media	Upah (per bulan)
Harian Analisa	Rp 800.000
Harian Waspada	Rp 800.000
Medan Bisnis	Rp 700-800 ribu
Sumut Pos	Rp 700-800 ribu
Tribun	Rp 1.800.000
DAAI TV	Rp 1.800.000
Metro TV	Rp 3.000.000 – 5.000.000
TV One	Rp 3.000.000 – 5.000.000
Radio Prapanca	Rp 1.500.000 – 2.000.000
Radio Kiss FM	Rp 1.500.000 – 2.000.000
Radio City FM	Rp 500.000 – 700.000
Star News (online)	Rp 500.000 – 700.000

BAHAN: HASIL SURVEI UPAH RIIL JURNALIS, AJI MEDAN

Gaji jurnalis radio bervariasi antara Rp 500 ribu sampai Rp 2 juta. Radio yang berdiri paska reformasi, seperti *Radio Prapanca*, *Radio Kiss FM*, dan *Radio Smart*, menggaji jurnalisnya antara antara Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta. Sedangkan jurnalis yang menerima upah di bawah standar upah minimum kota adalah mereka yang bekerja di radio *City FM*, yaitu berkisar antara Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu.

II.13 Kota Palu

Jumlah penduduk	: 335.297 (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 11 Miliar (2011)
APBD	: Rp 640 Miliar (2011)
Upah Minimum Kota	: 785.000 (2011)
Upah layak versi AJI	: Rp 2.150.066 (2011)
Jumlah media cetak	: 12
Jumlah media penyiaran	: 6 (radio), NA (TV)



Kota Palu awalnya adalah kota kecil yang menjadi pusat kerajaan Palu. Setelah penjajahan Belanda, kerajaan ini menjadi bagian dari wilayah Onder Afdeling Palu. Wilayah itu membawahi 3 Landschap, yaitu Landschap Palu yang terdiri dari Distrik Palu Timur, Distrik Palu Tengah dan Distrik Palu Barat. Dua landschap lainnya adalah Kulawi dan Sigi Dolo.

Di tahun 1950, Palu awalnya menjadi tempat kedudukan Kepala Pemerintahan Negeri (KPN), setingkat Wedana. Kota ini berkembang setelah dibentuknya Residen Koordinator Sulawesi Tengah di tahun 1957. Saat itu, status Kota Palu menjadi ibukota karesidenan. Kota ini resmi menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 1964, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Semakin besarnya peran kota ini dalam bidang pemerin-

tahan dan pembangunan membuat statusnya diubah menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1978. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994, Palu resmi menjadi Kotamadya Tingkat II, yang terdiri dari empat kecamatan: Palu Utara, Palu Timur, Palu Barat, dan Palu Selatan.⁵⁰

Pemetaan Industri Media

Berdasarkan data Serikat Penerbit Surat kabar⁵¹ pada tahun 2010, ada 12 surat kabar di provinsi ini. Rinciannya: 9 berupa surat kabar harian, 2 surat kabar mingguan dan 1 majalah. Untuk surat kabar harian terdiri dari *Info Baru*, *Megah Juang*, *Mercusuar*, *Nuansa Pos*, *Radar Sulteng*, *Reputasi*, *Sulteng Pos*, dan *Tribun*. Sedangkan dua surat kabar mingguan, *Media Alkhairaat* dan *Pelopor Karya*, serta satu-satunya majalah, *Motipasi*, juga berada di Kota Palu.

Tabel II.32 Jumlah Media dan Oplahnya di Sulawesi Tengah 2010

SKH	Oplah	SKM	Oplah	Majalah	Oplah	Media	Jumlah
8	14.000	2	5.000	1	1.000	12	20.000

BAHAN: SPS DAN INFOMEDIA, MEDIA DIRECTORY 2010

Tabel II.33 Pertumbuhan Media dan Oplahnya di Sulawesi Tengah 2008-2009

2008		2009		2010	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
10	23.000	10	20.000	12	20.000

BAHAN: SPS DAN INFOMEDIA, MEDIA DIRECTORY 2010

Secara umum kondisi industri media di Kota Palu berjalan pasang surut. Hanya media besar saja yang bisa bertahan hidup

50 http://www.palukota.go.id/content.php?id_content=4

51 SPS dan Infomedia, Media Directory 2010, Jakarta 2010.

di tengah kerasnya persaingan industri media, seperti harian *Radar Sulteng*, *Harian Mercusuar*, *Harian Media Alkhairaat*, *Nuansa Pos*, dan *Harian Info Baru*. Media-media *mainstream* di atas memiliki pelanggan 1.000 hingga 6.000 orang. Harian yang memiliki jumlah pelanggan terbesar adalah *Mercusuar* dengan jumlah sekitar 6.000 pelanggan yang tersebar di 11 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Sedangkan pelanggan terkecil ditempati oleh *Harian Info Baru* dengan jumlah pelanggan sekitar 700 orang.

Media tersebut dapat eksis di Sulawesi Tengah karena sudah memiliki pelanggan tetap dan pelanggan iklannya masing-masing. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, agar tetap mendapatkan pemasukan⁵².

Untuk radio, data sejumlah sumber⁵³ menyebut ada enam stasiun radio di Palu. Masing-masing: PT Radio Berlian Se- laras (Best FM) 101.8 FM, PT Radio Nebula Nada (Nebula) 101.0 FM, PT Radio Swara Nugraha (Nugraha Top FM) 102.6 MHz, dan PT Radio Swara Ramayana Jelita (Ramayana AM) 1404 Khz. Dua stasiun lainnya adalah milik *RRI Palu*: FM 90,8 MHz dan FM 105,0 MHz.⁵⁴

Upah Minimum dan Upah Layak.

Upah minimum di Sulawesi Tengah pada 2011 sebesar Rp 827.500. Angka ini naik Rp 50.000 (6.43%) dari UMP sebel-

52 Selain media yang sudah disebutkan di atas, selama empat tahun terakhir ini muncul sejumlah media di Kota Palu. Formatnya umumnya masih sebatas mingguan karena ongkos cetak yang mahal dan belum adanya pemasukan yang pasti, baik dari iklan atau langganan. Media yang baru muncul itu antara lain *Mingguan Petir*, *Deadlinenews*, dan sejumlah mingguan yang kurang dikenal namanya. Hanya *Deadlinenews* saja yang masih aktif hingga saat ini. Sedangkan mingguan lainnya terbit hanya sesekali saja dalam sebulan. Itu pun karena ada pesanan pada saat peringatan hari-hari besar nasional atau ulang tahun kabupaten tertentu.

53 Dewan Pers, Data Pers Nasional 2010, Jakarta

54 Wikimedia

umnya, 2010, yang ditetapkan sebesar Rp 777.500. Dibandingkan provinsi lain di Sulawesi, UMP Sulawesi Tengah tergolong rendah. Daerah lainnya, seperti Gorontalo Rp 762.500, Sulawesi Utara Rp 1.050.000, Sulawesi Tenggara Rp 930.000, Sulawesi Selatan Rp 1.100.000 dan Sulawesi Barat Rp 1.006.000

Jumlah ini, tentu saja masih sangat jauh dari kebutuhan layak untuk jurnalis. Berdasarkan hasil survei AJI Palu, upah layak jurnalis tahun 2011 di kota ini minimal Rp 2,1 juta. Rinciannya:

Tabel II.34 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Palu Tahun 2011

Makanan dan minuman	Rp 921.400
Perumahan dan fasilitas	Rp 300.000
Sandang	Rp 213.083
Aneka kebutuhan lain	Rp 715.583
Total	Rp 2.150.066

BAHAN: HASIL SURVEI AJI PALU, 2011

Upah Riil Jurnalis

Gaji jurnalis di Kota Palu selama ini berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan. Upah ini belum layak seperti yang diamanatkan dalam upah minimum provinsi (UMP) 2011. Jurnalis di harian *Media Alkhairaat* mengaku memiliki gaji pokok sebesar Rp 500 ribu per bulan. Jurnalis harian *Info Baru* memiliki gaji pokok sebesar Rp 750 ribu per bulan dengan tunjangan Rp 250 ribu. Jurnalis yang bekerja lima bulan di *Nuansa TV* Palu memperoleh gaji Rp 850 ribu setiap bulannya. Jurnalis di *Mingguan Deadlinenews* Palu mendapatkan upah Rp 500 ribu per bulan.

Dengan gaji yang relatif kecil, dan semuanya di bawah UMP, membuat jurnalis merasa bahwa upah yang mereka terima sangat jauh dari layak. Ini pula yang dijadikan alasan sebagian jurnalis untuk menerima amplop. “Kalau tidak begitu, dari mana

saya bisa melanjutkan hidup,” kata salah seorang jurnalis *Media Alkhairat*. Hal senada disampaikan jurnalis di *Nuansa TV* Palu. “Kalau ada pemberian dari narasumber, ya saya terima.”

II.14 Kota Pekanbaru

Jumlah penduduk	: 850.000 jiwa (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 208 miliar (2011)
APBD	: Rp 1,3 triliun (2010)
Upah Minimum Kota	: Rp 1.135.000 (2010)
Upah layak versi AJI	: Rp 3.604.700 (2011)
Jumlah media cetak	: 81 surat kabar
Jumlah media penyiaran	: 8 (radio), 3 (TV)



Kata “pekan” dalam bahasa Melayu dapat berarti “pasar”. Sehingga Pekanbaru bisa bermakna Pasar Baru. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak lepas dari pengaruh fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari kawasan dataran tinggi Sumatera.

=Kota ini mulai menjadi wilayah pemukiman pada masa Kesultanan Siak Sri Indrapura, yaitu pada era kekuasaan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, yang kemudian diteruskan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali. Selanjutnya, pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai Pekanbaru.

=Berdasarkan SK Kerajaan, yaitu Besluit van Her Inlanche Zelf Destuur van Siak No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian dari Kesultanan Siak dengan sebutan distrik. Pada 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai

tahun 1940. Kemudian menjadi menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942.

Saat pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, ditetapkan kabupaten Kampar dan kota Pekanbaru diberikan status kota kecil, dan menjadi kota praja setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri Nomor Desember 52/I/44-25. Sebelumnya yang menjadi ibukota adalah Tanjung Pinang yang kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau⁵⁵.

Pemetaan Industri Media

Menurut data Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) tahun 2010, ada 59 media cetak di Riau⁵⁶. Rinciannya, 12 berbentuk surat kabar harian, 18 berupa mingguan, 23 tabloid 23, dan 6 majalah. Dari jumlah itu, hampir semuanya berada di Pekanbaru.

Untuk surat kabar, ini di antaranya: *Media Riau*, *Metro Riau*, *Pekanbaru MX*, *Pekanbaru Pos*, *Rakyat Riau*, *Riau Mandiri*, *Riau Media Konsumen*, *Riau Pos*, *Riau Tribun*, *Sijori Pos*, dan *Tribun Pekanbaru*. Satu-satunya surat kabar harian yang tak terbit di Pekanbaru adalah *Dumai Pos*, yang berada di Dumai.

Untuk majalah, tercatat ada Sinyal Group, (dwi mingguan), *Pantas*, *Riau Review*, *Sabda Republik*, *Sagang*, dan *Sorot* (bulan-

55 http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

56 Menurut data Dewan Pers, media di Pekanbaru ada 12 harian, 10 mingguan dan 1 bulanan. Harian adalah *Haluan Riau*, *Koran Riau*, *Media Riau*, *Metero Riau*, *Pekanbaru Mx*, *Pekanbaru Pos*, *Posmetro mandau*, *Rakyat Riau*, *Riau Pos*, *Tribun Pekanbaru*. Mingguan ada *Azam*, *Fakta Post*, *Horas Plus*, *Media Trans*, *Monitor News*, *Riau Editor*, *Riau Monitor*, *Riau Sidik*, *Sinar*, *Vokal*, dan bulanan: *Buser Metro Riau*. Dari seluruh media itu, hanya dua media yang tidak beralamat di Pekanbaru, yaitu *Dumai Pos*, dan harian *Riau Pesisir*.

an). Untuk surat kabar mingguan: *Berita Rakyat, Berita Riau, Bidik, Buser Metro Riau, Fakta Post, Forum, Forum Kerakyatan, Forum Masyarakat, Genta, Horas Plus, Intermezo, Media Negeri, Publik, Radar, Riau Editor, dan Sinar*. Untuk majalah yang berbentuk dwi mingguan ada *Indonesia Bersatu* dan *Tropong*.

Surat kabar yang berbentuk tabloid adalah *Azam, Buser, Expo, Laskar, Media Otonomi Plus, Menara, Mentari, Moral, Patroli Media, Pena, Potret, Publik Indonesia Reformasi, Realitas, Riau Persada, Suara Pancasila, Sukses, Teraju, Tirai, Utusan Melayu* (semua terbit mingguan); *Monitor* dan *Inhil Pos* (dwi mingguan), dan *Plasma* (bulanan).

Tabel II.35 Jumlah Media dan Oplah Surat kabar di Riau, 2010

SKH		SKM		Tabloid		Majalah		Total	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
12	228.330	18	34.250	23	56.000	6	12.500	59	339.330

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010, SPS DAN INFOMEDIA

Jika melihat perkembangan media dalam tiga tahun belakangan ini di Riau, hanya sedikit saja ada pertumbuhan media. Lihat saja misalnya pada 2008 tercatat ada 58 media. Setahun kemudian turun menjadi hanya 57 media, sebelum akhirnya bertambah dua buah menjadi 59 media pada 2010. Pertumbuhan oplah juga hampir sama: di tahun 2008, oplah surat kabar 268.830 eksemplar. Jumlah ini kemudian naik sedikit, meski jumlah medianya berkurang di tahun 2009.

Adapun jumlah media penyiaran, berdasarkan data Dewan Pers tahun 2010,⁵⁷ tercatat ada 9 radio dan 3 stasiun televisi. Dari sembilan radio, yang ada di Kota Pekanbaru adalah *Clap-ita FM 103.4 MHz; Gress Radio FM 105.80 MHz; Radio KLA FM 100.5 MHz; Warna FM 104.2 MHz; Soreeram Jalur Sakti*

57 Dewan Pers, Data Pers nasional 2010, Jakarta, hal. 255-256.

AM 1044 KHz; dan *FS Tri* 94.3 MHz. Untuk radio seperti *Shine FM* 92.2 MHz dan *Dumai FM* 91.4 MHz, serta *Radio Malaka FM* 98.1 MHz, berada di Kota Dumai⁵⁸. Untuk stasiun TV, tercatat ada *Esa TV*; *Riau Media Televisi (RTV)* 32 UHF; dan *Suryatama Andalan Mandiri Televisi*.

Upah Minimum dan Upah Layak

Pekanbaru pada tahun 2011 menetapkan upah minimum kota (UMK) sebesar Rp 1.135.000. Angka ini lebih sedikit besar dari upah minimum provinsi (UMP) Riau yang ditetapkan Rp 1.120.000. UMP Riau ini naik sebesar Rp 104.000 (10.24%) dari UMP tahun sebelumnya yang Rp 1.016.000. Upah ini tentu saja masih jauh dari kebutuhan layak jurnalis. Berdasarkan survei kebutuhan layak jurnalis yang dilakukan AJI Pekanbaru tahun 2011, upah layak seharusnya Rp 3.604.700.

Tabel II.36 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Pekanbaru tahun 2011

Kebutuhan	Jumlah
Makanan dan minuman	Rp 1.384.000
Perumahan dan fasilitas	Rp 400.000
Sandang	Rp 300.000
Aneka kebutuhan lain	Rp 1.193.000
Tabungan (10% dari total upah)	Rp 327.700
Total	Rp 3.604.700

Upah Riil Jurnalis

Bila yang menjadi patokan upah adalah UMK, sebagian

58 Menurut Wikipedia, ada 15 radio di Riau. Radio Gress FM 105,8 MHz, Radio Pas FM 105 MHz, Radio Warna FM 104,2 MHz, Radio Clapita Emas FM 103,4 MHz, Radio Suara Arum Cendana FM 102,6 MHz, Radio Monaria FM 101,8 MHz, Radio CBSFM 101 MHz, Radio Racika FM 100,2 MHz, Radio Audi FM 99,9 MHz, Radio Smart Mandiri FM 99,5 MHz, Radio RRI Prog3 FM 99,1 MHz, Radio ARFM 93,5 MHz, Radio Bharabas FM 97,5 MHz, Radio Graha FM 96,7 MHz, dan Radio Pondasi FM 95,9 MHz.

besar perusahaan media di Pekanbaru umumnya sudah memberi upah sesuai dengan standar itu, khususnya kepada jurnalis yang berstatus karyawan tetap.

Pada 2011, upah minimum kota di Pekanbaru ditetapkan sebesar Rp 1.135.000. Jika standarnya mengacu pada upah minimum ini, maka sebagian besar perusahaan di kota ini sudah memberikan upah layak. Namun bila dikaji dari kebutuhan hidup layak bagi jurnalis di Pekanbaru, yang menurut survey AJI Pekanbaru untuk tahun 2011 sebesar Rp 2.150.066, maka jumlah itu masih sangat jauh dari cukup.

Tapi, tetap saja jumlah perusahaan media yang belum membayar upah jurnalisnya sesuai UMK cukup banyak. Padahal, sebagian dari mereka adalah perusahaan media yang sudah cukup lama berdiri. Di antaranya adalah *Azam*. Tabloid yang sudah berumur belasan tahun ini masih menggaji karyawan tetapnya kurang dari Rp 1 juta, meski sudah sekitar dua tahun diangkat menjadi karyawan tetap.

Masih ada perusahaan media lain yang juga belum menggaji jurnalisnya sesuai UMK, bahkan ada jurnalis yang tak digaji sama sekali, seperti di *Riau Pesisir*⁵⁹ yang terbit di Dumai. Sampai tahun keempat berdirinya surat kabar itu, para reporternya diharapkan memperoleh pendapatan dari *fee* iklan. Selain itu, mereka juga mencari “kebaikan” dari narasumber, tentunya dalam bentuk pemberian uang.

Bila dibuat dalam interval angka tertentu, maka para jurnalis di Pekanbaru yang telah menjadi karyawan tetap dalam waktu maksimal dua tahun mendapatkan upah antara kurang dari Rp 1 juta sampai Rp 1,8 juta. Nominal ini masih sangat kurang dibandingkan angka upah layak jurnalis Pekanbaru

59 Data soal Riau Pesisir tak ada dalam laporan Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) tahun 2010. Data soal *Riau Pesisir* muncul dalam laporan hasil survei AJI Pekanbaru. Pendataan Dewan Pers tahun 2010 juga menyebut ada media bernama *Riau Pesisir*.

2011 yang sebesar Rp 3.604.700.

Sejauh ini, yang paling baik pengupahan jurnalisnya di antara perusahaan media di Pekanbaru adalah *Tribun Pekanbaru*. Reporternya yang masih belum berstatus karyawan tetap, yakni sekitar empat bulan bekerja, mendapatkan upah lebih dari Rp 1.750.000.

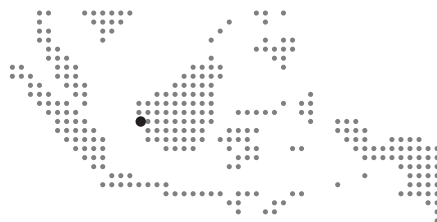
Selain masih tak memadai dari segi pengupahan, pemenuhan tunjangan minimum bagi jurnalis oleh perusahaan-perusahaan media di Pekanbaru juga masih mengundang keprihatinan. Perusahaan-perusahaan yang sudah mengikutkan karyawannya dalam program Jamsostek barulah perusahaan-perusahaan bonafid, seperti *Riau Pos* dan *Tribun Pekanbaru*. Namun, ada juga media yang terbilang kecil yang sudah memberikannya, seperti *Pekanbaru MX* (koran kriminal), *Metro Riau* (harian umum), *Riaubisnis.com*, *Riau Televisi*, *Aditya FM* dan *Smart FM*.

Tunjangan yang sudah umum diberikan kepada jurnalis di Pekanbaru adalah tunjangan makan, transportasi, dan jabatan. Tunjangan itu dimasukkan dalam item pembayaran gaji tiap bulannya. Sementara untuk soal tunjangan perumahan dan komunikasi, masih banyak perusahaan media yang belum memberikan kepada para jurnalis dan pekerjanya⁶⁰.

60 Bila kondisi pengupahan bagi jurnalis di Pekanbaru sudah memprihatinkan, masih jauh lebih parah lagi kondisi pengupahan jurnalis di daerah-daerah/ biro-biro yang menjadi korresponden atau kontributor. Media-media di Pekanbaru memiliki kebijakan berbeda terkait pengupahan kepada jurnalisnya di biro-biro. Mereka pada umumnya menerapkan standar yang berbeda antara jurnalis yang berbasis di kantor pusat dengan jurnalis di biro-biro. Namun, *Tribun Pekanbaru* menerapkan standar yang sama antara jurnalis yang berbasis di kantor pusat dengan yang ada di daerah-daerah. Kondisi di Harian Umum *Haluan Riau*, para kepala biro berstatus karyawan tetap. Sementara, para reporternya ada yang sudah karyawan tetap dan ada juga yang tidak. Bila sudah berstatus karyawan tetap, mereka digaji bulanan. Bila belum, upah yang mereka terima tergantung produktivitasnya dalam menulis berita.

II.15 Kota Pontianak

Jumlah Penduduk	: 550.304 jiwa (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 89,6 miliar (2010)
APBD	: Rp 757 miliar (2010)
Upah Minimum Kota	: Rp Rp 845.000 (2011)
Upah Layak Versi AJI	: Rp 3.526.600 (2011)
Jumlah Media Cetak	: 16 (media cetak)
Jumlah Media Penyiaran	: 10 (radio), 4 (TV)



Kota Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Abdurachman pada 23 Oktober 1771, bertepatan dengan tanggal 14 bulan Rajab tahun 1185 H. Kota ini awalnya dibangun di persimpangan tiga sungai: Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak, tepat di atas daerah yang sekarang dikenal dengan Kampung Dalam Bugis.

Kota Pontianak kemudian berkembang menjadi Ibukota dari Kesultanan Pontianak, tempat kedudukan Sultan Pontianak di masa lampau. Di masa penjajahan Belanda, pemerintah kota Pontianak diberikan wewenang berupa otonomi yang sangat terbatas dengan pembentukan apa yang dikenal dengan nama *Platselijk Fends Pontianak*. Kota Pontianak oleh pemerintahan *Swapraja Pontianak* dijadikan sebuah *Lanschaps Gemmeente* pada 14 Agustus 1946.

Melalui Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, yang kemudian dijadikan Undang-Undang No.27 tahun 1959, status Pontianak meningkat menjadi kota praja dengan status daerah otonom tingkat II, sampai akhirnya menjadi Kotamadya Pontianak pada 31 Desember 1965.

Pemetaan Industri Media

Di Kalimantan Barat, menurut data SPS⁶¹, ada 17 media

61 Media Directory 2010: The Power of Print Media, Infomedia dan Serikat Penerbit Surat-

cetak⁶². Rinciannya: dua media cetak berbentuk majalah, yaitu *Kalimantan Review* dan *Majalah Info*. Keduanya berada di Pontianak. Surat kabar yang berbentuk harian meliputi: *Berita Katulistiwa* (Berkat), *Borneo Tribune*, *Equator*, *Kapuas Post*, *Korran Pontianak*, *Kuntian Ribao*, *Mediator*, *Metro Pontianak*, *Pontianak Post*, dan *Tribun Pontianak*. Dari 10 harian, hanya *Mediator* yang berada di luar kota Pontianak, yaitu di Singkawang. Untuk mingguan, ada *Opsy Post*. Untuk tabloid, ada mingguan *Citra Media Kal-Bar*, *Media Kal-Bar*, *Mitra Kal-Bar*, dan Surat kabar bulanan *Pilar Katulistiwa* –yang semuanya berkantor di Pontianak.

Tabel II.37 Jumlah Media dan Oplah Surat kabar di Kalimantan Barat Tahun 2010

SKH		SKM		Tabloid		Majalah		Total	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
10	177.128	1	2.000	4	5.200	2	2.000	17	186.328

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010, INFOMEDIA DAN SPS, 2010

Jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan dari segi jumlah media maupun oplahnya. Di tahun 2008, jumlah surat kabar di daerah ini sebanyak enam buah. Tahun berikutnya bertambah menjadi 12 buah, sebelum menjadi 17 buah di tahun 2010⁶³.

kabar (2010), 2010.

- 62 Di Kalimantan Barat, menurut data Dewan Pers, ada 9 harian, 1 mingguan, 1 bulanan. Media harian: Berkat, Borneo Metro, Borneo Tribune, Equator, Kapuas Post, Kun Dian Ri Bao, Metro Pontianak, Pontianak Post, Tribun Pontianak. Mingguan: Media Kalbar. Bulanan: Kalimantan Review.
- 63 Menurut data AJI Pontianak, hingga 2010, tercatat 10 media cetak yang terbit secara berkesinambungan. Sedangkan media elektronik, baik radio publik lokal, swasta, maupun komunitas, pertumbuhannya bak jamur di musim hujan. Jumlah radio yang beroperasi di Kalbar hingga 2010 mencapai 89 stasiun. Angka ini terpaut jauh dengan pertumbuhan televisi lokal yang hanya tiga stasiun. Data media cetak didapat dari sejumlah sumber secara langsung, dan data pendukung dari internet. Sedangkan radio datanya diperoleh dari KPI Kalbar. Untuk radio, selain RRI, hanya Radio Volare dan Sonora yang memproduksi dan menyiarkan berita, sementara

Jumlah oplah juga seperti itu: di tahun 2008 oplah surat kabar di provinsi ini 48.800 eksemplar, kemudian naik menjadi 161.328 di tahun berikutnya.

Sejarah perkembangan media massa di Pontianak, tidak lepas dari campur tangan birokrat di jajaran pemerintahan daerah. Pada 1973, Gubernur Kal-Bar, saat itu dijabat Kadarusno, menghendaki adanya sebuah media harian yang terbit pagi. Ia meminta Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kal-Bar, Tabrani Hadi, untuk memenuhi obsesinya itu.

Tabrani melakukan penjajakan sekaligus mengumpulkan sejumlah orang untuk mendirikan koran harian. Dari hasil kesepakatan, terbitlah Harian Akcaya. Pemda tidak terlibat pembiayaan koran ini. Kontribusinya sebatas meminjamkan tempat di ruang Humas Pemda Kal-Bar. Adapun pemilik koran, diantaranya adalah Tabrani Hadi, Agusno Sumantri, dan Bey Akub. Dua nama belakangan, Agusno dan Bey, merupakan wartawan.

Koran ini mengalami perkembangan cukup pesat. Pada 1990, Akcaya resmi bergabung dengan Jawa Pos dengan nama yang sama. Begitu pula manajemennya. Berkat penambahan perangkat pendukung seperti mesin cetak dan sumberdaya manusia, jumlah halamannya bertambah dari semula delapan menjadi 12 halaman dan berwarna. *Sharing* kepemilikan 60 banding 40. Koran ini akhirnya dikuasai penuh oleh Jawa Pos seiring penambahan investasi yang dilakukannya⁶⁴.

radio yang lainnya program hiburan masih mendominasi. Sedangkan untuk televisi, selain TVRI, hanya Ruai TV yang memproduksi dan menyiarkan berita, sementara televisi yang lainnya masih didominasi oleh program hiburan dan iklan.

64 Saat peristiwa invasi Irak ke Kuwait, oplah Akcaya terdongkrak tajam. Saat itu pembaca masih sulit mendapatkan informasi dari luar negeri. Dari sekitar 8.000 eksemplar, oplah Akcaya kala itu melejit menjadi 17 ribu eksemplar. Pada 1994, Akcaya terbit menjadi 16 halaman hingga jadi 24 halaman seperti sekarang. Pada 1997, oplah pada hampir semua koran di Indonesia terjun bebas akibat krisis ekonomi. Akcaya hanya mampu mencetak koran berukuran kecil dan berubah lagi menjadi delapan halaman. Saat itu harga kertas melambung.

Seiring reformasi yang baru saja bergulir, berdirilah Harian Equator pada 2000. Disusul kemudian pada 2002 Harian Kapuas Post dan Kun Dian Ribao yang diterbitkan pada 2004. Kota Pontianak akhirnya memiliki koran kriminal pertama dengan nama Metro Pontianak. Seluruh penerbitan itu masih berada di bawah payung Jawa Pos Group. Nama Akcaya kemudian berubah menjadi Akcaya Pontianak Post pada 2000 dan menjadi Pontianak Post pada 2002 hingga kini.

Dari sisi pemasaran, oplah Pontianak Post terus menanjak antara 35-40 ribu eksemplar. Jumlah ini relatif bertahan, atau tidak mengalami peningkatan signifikan seiring masuknya era digital, baik internet maupun televisi. Segmentasi pembaca Pontianak Post adalah masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke atas. Isu pemberitaan didominasi politik dan pemerintahan serta ekonomi, baik lokal, nasional, serta internasional. Manajemen juga menambah segmentasi pembaca pemula dengan menampilkan rubrik ekspresi. Koran ini didistribusi ke seluruh wilayah Kal-Bar.

Sedangkan Metro Pontianak, membidik segmen pasar menengah ke bawah di Kota Pontianak dan fokus pada berita kriminal dengan jumlah oplah 2.000-3.000 eksemplar. Harian Equator, terbit dengan rubrik andalan politik dan kriminal dengan jumlah oplah 7.000 – 8.000 eksemplar. Jawa Pos Group kemudian melebarkan sayapnya dengan menerbitkan Harian Kapuas Post.

Koran Kapuas Post diperuntukkan bagi masyarakat di wilayah timur Kal-Bar, meliputi Kabupaten Pontianak, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Oplahnya mencapai 4.000 – 5.000 eksemplar. Adapun koran berbahasa Mandarin, Kundian Ri Bao, membidik pasar di komunitas Tionghoa Kal-Bar. Jajaran redaksi Pontianak Post saat ini berjumlah 54 orang. Mereka rata-rata berstatus wartawan organik. Jumlah karyawan keseluruhan, di

luar sumberdaya percetakan mencapai 200 orang.

Sama halnya dengan Harian Berita Khatulistiwa (Berkat) yang lahir tahun 2000, bersamaan dengan kelahiran Harian Equator. Harian Berkat membidik pasar menengah ke bawah dengan format koran berukuran lebih kecil dari *broadsheet*. Oplah Harian Berkat hingga kini bertahan pada level 5.000 eksemplar dan tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kal-Bar.

Pada 2007, lima orang anak muda, masing-masing Nur Iskandar, Tanto Yakobus, Yusriadi, Asriyadi Alexander Mering, dan Hairul Mikrad, menggagas lahirnya sebuah koran harian independen di Kal-Bar. Tepat pada 19 Mei, obsesi ini menjadi kenyataan dan koran Borneo Tribune hadir di tengah masyarakat pembaca di Kal-Bar.

Kehadiran Borneo Tribune di Pontianak tidak lepas dari kemelut di tubuh Harian Equator, salah satu anak perusahaan Pontianak Post Group. Saat itu terjadi ketegangan di bidang redaksi dan menyebabkan henggangnya lima awak redaksi Equator. Koran ini akhirnya menjadi media alternatif dari sejumlah media yang sudah ada sebelumnya di bawah payung Jawa Pos Group.

Suguhan utama pemberitaan Borneo Tribune lebih mengedepankan unsur pendidikan, ekonomi, dan politik. Ia bahkan sukses menciptakan pangsa pasarnya sendiri di seluruh wilayah Kal-Bar. Mendedikasikan dirinya sebagai koran komunitas, dan kesadaran penuh bahwa media ini lahir dari semangat kebersamaan, hampir seluruh pedalaman Kal-Bar dirambahnya. Kini, oplah Borneo Tribune mencapai 9.700 eksemplar.

Tak cukup hanya dengan satu koran, media yang kini berada di bawah bendera PT Borneo Tribune Press ini pun melebarkan sayap usahanya. Tepat pada 1 November 2010, lahirlah Borneo Metro yang secara spesifik menyajikan berita-berita kriminal di Kota Pontianak. Tampil dengan ukuran setara Ha-

rian Berkas, koran dengan pangsa pasar kelas menengah ke bawah ini membuka 2011 dengan jumlah 16 halaman.

Dengan usia Borneo Metro yang masih seumur jagung, oplahnya hanya 1.000 eksemplar. Ini masih terpaut jauh di bawah koran kriminal pendahulunya, Harian Metro Pontianak yang sudah menggondol jumlah pelanggan sekitar 3.000-an. Namun, dengan semangat kebersamaan itu, manajemen koran ini melebarkan pangsa pasarnya di luar Kota Pontianak. Saat ini, Borneo Metro beredar di sepanjang pantai utara Kal-Bar, meliputi Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas.

Persaingan kian ketat di tingkat pembaca seiring masuknya spirit baru Kal-Bar, Harian Tribun Pontianak pada 1 Agustus 2008. Koran yang terbit di bawah payung Gramedia Kompas Group ini, dalam usia yang relatif muda telah sukses merebut pembaca di seluruh wilayah Kal-Bar dengan harga Rp 1.000 per eksemplar. Selama satu tahun penuh, manajemen koran ini menawarkan produk koran murah 24 halaman kepada pembacanya. Karuan saja, dalam hitungan satu tahun ia sudah mengklaim dirinya sebagai koran terbesar di Kal-Bar.

Jumlah radio di Kalimantan Barat, menurut data Dewan Pers 2010, sebanyak 11 stasiun. Masing-masing: *Radio Vista FM* 92.4 MHz, *Divasi FM* 95.1 MHz, *Madina FM* 90.0 MHz, *Kita FM* 87.6 MHz, *Mujahidin FM* 105.8 MHz, *MC Radio FM* 89.2 MHz, *Samaria FM* 97.9 MHz, *Raudhah FM* 88.4 MHz, *Prokom FM* 107.7 MHz, *Swara Prima* 99.5 MHz, dan Radio Perkumpulan Gerakan Masyarakat Adat Dayak Jelai Kendawangan 107.7 MHz. Radio yang disebut terakhir ini merupakan satu-satunya radio yang tak berlokasi di Pontianak, melainkan di Ketapang⁶⁵.

65 Menurut data AJI Pontianak, bukan hanya Radio Perkumpulan Gerakan Masyarakat Adat Dayak Jelai Kendawangan yang ada di luar Pontianak. Radio lainnya, antara lain: PT Radio

Untuk stasiun TV, berdasarkan data Dewan Pers, ada tiga stasiun yaitu *Katulistiwa TV 39 UHF*, *Ruai TV 43 UHF* dan *Kapuas Citra Televisi 45 UHF*. Jumlahnya menjadi empat stasiun jika TVRI dimasukkan dalam daftar. Dari empat stasiun TV itu, hanya TVRI dan Ruai TV memproduksi dan menyiarkan berita. Televisi yang lainnya masih didominasi oleh program hiburan dan iklan.

Upah Minimum dan Upah Layak

Upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat pada 2011 sebesar Rp 802.500. Dibandingkan dengan tahun lalu, Rp 741.000, upah minimum ini ada kenaikan Rp 61.500 (8.30%). Di wilayah Kalimantan, upah minimum Provinsi Kalimantan Barat merupakan yang paling rendah. Bandingkan dengan Kalimantan Timur (Rp 1.084.000), Kalimantan Selatan (Rp 1.126.000) dan Kalimantan Tengah (Rp 1.134.580).

Jumlah ini, tentu saja masih jauh dari kebutuhan layak untuk jurnalis. Menurut hasil survey AJI Pontianak⁶⁶, upah jurnalis layak di daerah ini sebesar Rp. 3.526.600 per bulan.

Tabel II.38 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Pontianak Tahun 2011

Makanan dan Minuman	Rp 2.740.000
Perumahan	Rp 250.000
Aneka Kebutuhan Lain	Rp 216.000
Tabungan (10% dari total upah)	Rp 320.600
Jumlah	Rp 3.526.600

Prominda Dirgantara 93,6 FM dan PT Radio Rama Gentara 1044 KHz AM (Kabupaten Pontianak), PT Radio Suara Kijang Berantai Perkasa612 KHz AM, PT Radio Suara Pemangkat 1008 KHz (Kabupaten Sambas), RSPD Bumi Daranante (Kabupaten Sanggau), PT Radio Swara Mahkota Polareksa 104,1 FM, PT Radio Swara Pinoh Perkasa 728 KHz AM, RRI Cab Pratama Sintang 90,7 / 102,5 FM (Kabupaten Sintang), dan PT Radio Renita FM (Ketapang).

66 Survey dan Riset terhadap Upah Layak Jurnalis di Pontianak dilakukan mulai tanggal 11 hingga 31 Desember 2010.

Upah Riil Jurnalis

Tim survey berkesimpulan upah riil jurnalis media di Pontianak berkisar antara Rp 1.000.000 sampai Rp 2.000.000 per bulan. Masa kerja mulai dari satu tahun hingga sembilan tahun di media cetak, televisi, radio maupun online. Menurut para jurnalis, gaji yang diterima saat ini masih sangat kurang, sementara beban kerja, biaya operasional dan kebutuhan hidup semakin besar setiap tahunnya. Para jurnalis berharap gaji yang diterima minimal sekitar tiga juta rupiah per bulan.

Tabel II.39 Upah Riil Jurnalis di Kota Pontianak 2011

Harian Equator	Redaktur Madya	Terdiri dari; gaji pokok Rp 800.000, uang makan Rp 300.000, tunjangan jabatan Rp 250.000, tunjangan profesi Rp 400.000. THR setiap tahun fluktuatif antara Rp. 500.000-Rp. 600.000	Rp 1.500.000-Rp 2.000.000
Pontianak Post	Reporter Kontrak	gaji pokok Rp 600.000, uang makan Rp 300.000, insentif berita Rp 1.300.000-Rp 1.800.000	Rp. 2.000.000-Rp. 2.500.000
Metro Pontianak	Reporter Kontrak	Gaji pokok Rp 650.000; uang makan Rp 300.000; tunjangan berita Rp 800.000-Rp 1.050.000. THR satu kali gaji pokok	Rp. 1.500.000-Rp 2.000.000 per bulan .
Harian Kapuas Post	reporter kontrak	Gaji pokok Rp 650.000; uang makan Rp. 300.000; tunjangan profesi Rp. 350.000-550.000. THR sebesar satu kali gaji pokok	Rp. 1.300.000-Rp. 1.500.000 per bulan
Borneo Metro	Reporter magang	gaji pokok Rp 750.000; uang makan Rp 450.000; tunjangan berita Rp. 500.000	Rp 1.700.000
Ruai TV	reporter kontrak, jabatan produser	Gaji pokok Rp 900.000, uang kehadiran Rp 300.000, tunjangan jabatan Rp. 400.000, tunjangan komunikasi Rp 100.000. THR satu kali gaji pokok	Rp 1.600.000 dipotong 10 persen untuk tabungan sehingga diterima hanya Rp. 1.500.000 per bulan
Kapuas Citra Televisi (KCTV).	reporter dan kameraman kontrak	Gaji pokok Rp 800.000, lembur Rp. 200.000-300.000. THR satu kali gaji pokok	Gaji Rp. 1.000.000-Rp. 1.100.000 per bulan

BAHAN: HASIL SURVEY AJI PONTIANAK, 2011

II.16 Kota Semarang

Jumlah Penduduk	: 1.553.778 jiwa (2010)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 294 miliar (2010)
APBD	: Rp 1,6 triliun (2010)
Upah Minimum Kota	: Rp 961 ribu (2011)
Upah Layak AJI	: Rp 3,2 Juta (2011)
Jumlah Media Cetak	: 14 media
Jumlah Media Penyiaran	: 25 (Radio), 4 (TV)



Pada akhir abad ke-15 M, Kerajaan Demak menempatkan Pangeran Made Pandan (Sunan Pandanaran I) untuk menyebarkan agama Islam dari perbukitan Pragota. Dari waktu ke waktu daerah ini semakin subur. Di antara kesuburan itu muncullah pohon asam yang arang (bahasa Jawa: Asem Arang). Hikayat ini pula yang menjadi asal muasal nama daerah ini kemudian diberi nama Semarang.

Made Pandan lantas diberi gelar Kyai Ageng Pandan Arang I. Sepeninggalnya, pimpinan daerah dipegang putranya, Pandan Arang II. Di bawah Pandan Arang II, pertumbuhan Semarang semakin meningkat dan menarik perhatian Sultan Hadiwijaya dari Pajang, yang kemudian menaikkan status Semarang menjadi setingkat kabupaten pada 2 Mei 1547. Tanggal ini yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota ini.

Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 466 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, ibu kota Jawa Timur⁶⁷. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,37 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang adalah yang tertinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 1,41 persen. Jumlah

67 <http://www.semarangkota.go.id>

penduduk Semarang tahun 2010 sebanyak 1.553.778 orang⁶⁸.

Pemetaan Industri Media

Berdasarkan data hingga 2010, di Jawa Tengah tercatat setidaknya 13 harian, 7 mingguan, 10 tabloid, dan 7 majalah⁶⁹. Secara total, jumlah media sebanyak 37 buah, dengan oplah secara keseluruhan sebanyak 731.500 eksemplar. Inilah rinciannya:

Tabel II.40 Jumlah dan Oplah Surat kabar di Jawa Tengah Tahun 2010

SKH	Oplah	SKM	Oplah	Tabloid	Oplah	Bulanan	Oplah	Media	Oplah
13	503.500	7	103.500	10	74.000	7	50.500	37	731.500

SUMBER: MEDIA DIRECTORY 2010, SPS-INFOMEDIA

Dari 37 media itu, tak semuanya terbit di Semarang. Surat kabar harian yang ada di Semarang meliputi: *Harian Semarang*, *Meteor*, *Radar Semarang*, *Suara Merdeka*, dan *Wawasan*. Selebihnya ada di luar Semarang, yaitu *Radar Banyumas* (Cilacap), *Radar Kudus*, *Radar Muria* (Kudus), *Radar Pekalongan* (Pekalongan), *Solo Pos*, *Radar Solo*, *Joglo Semar* (Solo) dan *Radar Tegal* (Tegal).

Untuk surat kabar mingguan yang ada di Semarang terdapat: *Cempaka*, *Inspirasi*, *Kriminal*, *Target Operasi*. Tiga lainnya, di luar Semarang: *Cahaya Sakti* (Cilacap), *Suara Rakyat*, dan *Tegal Pos* (Tegal). Adapun tabloid yang berada di di Semarang adalah *Bola Mania* dan *Otosped* (mingguan). Lima lainnya terbit di luar Semarang: *Arena*, *Detik* (Solo), *Detik Diva* (Cepu), *Telegraph Indonesia* (Tegal). Untuk surat kabar dwi mingguan, semuanya terbit di luar Semarang yaitu *Focus*, *Logika* (Peka-

68 <http://www.bps.go.id/hasilSP2010/jateng/3300.pdf>

69 Berdasarkan data Dewan Pers, jumlahnya lebih sedikit: ada 11 harian, 4 mingguan, 5 bulanan.

longan). Begitu pula dengan surat kabar bulanan: *Gema Kota Santri* (Pekalongan) dan *Gosana* (Cilacap).

Untuk surat kabar yang berbentuk majalah yang berada di Semarang, masing-masing: *Bina* (mingguan), *Legalitas*, *Olga* (dwi mingguan), *Hello* dan *MOP*. Dua lainnya, *Generasi Muda* dan *Gudril* ada di Cilacap.

Di Jawa Tengah, *Suara Merdeka* merupakan koran tertua⁷⁰. Didirikan tahun 1950, pasar mereka sangat merata di Jawa Tengah. Oplahnya disebut-sebut sekitar 160 ribu eksemplar. Sejak tahun 2009, harian yang bertagline “Perekat Komunitas Jawa Tengah” ini dipegang oleh keluarga generasi ketiga, Kukrit Suryo Wicaksono (Pemimpin Umum).

Kondisi finansial *Suara Merdeka* sangat sehat. Selain iklan, pemasukan didapat dari program-program ‘off air’ hasil kerja sama dengan kalangan pemerintah dan swasta. Misalnya, dalam Semarang Great Sale 2010, mereka menggandeng Pemkot Semarang dan perusahaan swasta. Sistem kerja sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Sehari dalam seminggu, wartawan diliburkan. Wartawan juga mendapat cuti maksimal 12 hari selama setahun. Izin libur tak resmi dan non cuti diberikan atas persetujuan pimpinan⁷¹.

Satu-satunya koran sore adalah *Wawasan*⁷². Terbit perdana

70 Hetami, sang pendiri, mengawali bisnisnya dengan menerbitkan Harian *Suara Merdeka* pada tahun 1950. Kemudian, bisnisnya dipegang sang menantu, Budi Santosa. Selain media, *Suara Merdeka* Grup ini punya percetakan besar dengan label PT Mascomm Graphy, Sekolah Internasional Bina Bangsa, dan SM TV (channel sudah didapat, tapi hingga saat ini belum siaran).

71 Kukrit Suryo Wicaksono tercatat sebagai pengurus Kadin, Ketua Pertina Jateng, Ketua PPGI Jateng, dan Komisaris Semarang United. Sosok ini dikenal sangat dekat dengan pemerintahan, mulai Pemkot Semarang hingga Pemprov Jawa Tengah. Setelah lengser, sang ayah mendirikan Budi Santosa Foundation. Yayasan ini dikelola petinggi dan ‘pensiunan’ *Suara Merdeka* Grup. Mulai tahun 2009, mereka bekerja sama dengan GTZ dan Bank Indonesia untuk melakukan survei iklim daya saing di 9 Jawa Tengah. Hasilnya berupa ranking pemerintahan kota/ daerah dalam hal daya saing (investasi). Saham terbesar *Suara Merdeka* dikuasai keluarga Budi Santosa.

72 Pada tahun 2008, sekitar 60 karyawan dipecat (sebagian diantaranya wartawan) dengan

pada 1986, kondisi finansialnya cenderung kurang sehat. Untuk operasional, koran ini kadang disubsidi ‘kakak kandung’-nya, Suara Merdeka. Akhir tahun 2010, koran ini hendak dibeli Soekamdani (pemilik Solopos dan Bisnis). Namun negosiasi gagal, karena Soekamdani dikabarkan ingin merekrut karyawan baru, sementara, pemilik Wawasan, Kukrit S Wicaksono, ingin eks-karyawan Wawasan tetap dipertahankan. Setelah gagal ganti pemilik, Wawasan berubah konsep. Koran ini terbit pagi sejak 10 Januari 2011. Seluruh karyawan yang berjumlah kurang lebih 160 orang, dipertahankan. Sistem kerja sesuai perundang-undangan. Libur sehari dalam seminggu dan cuti 12 hari selama setahun. Izin libur atau cuti lain diberikan atas kebijakan pimpinan.

Olga! Girls Magazine. Olga adalah penerus Majalah Tren, masih satu grup dengan Suara Merdeka. Majalah ini mulai terbit pada tahun 2000. Tren yang tak juga berkembang akhirnya ditutup pada 2005. Dan setahun berikutnya, Tren resmi menjadi Olga yang terbit bulanan. Seluruh karyawan Tren dipecat. Ini merupakan proyek merugi Suara Merdeka Grup. Meski cetakannya serba wah, Olga kurang mendapat tempat di kalangan remaja Jawa Tengah. Oplahnya tidak lebih dari 8.000 eksemplar⁷³.

Tabloid Cempaka Minggu. Tabloid ini milik Suara Merdeka Group dan terbit mingguan sejak 1989. Sahamnya oto-

alasan perusahaan merugi. Hanya satu wartawan yang menggugat, dengan bantuan AJI Semarang. Dalam mediasi, wartawan itu mendapatkan haknya berupa pesangon. Sistem kekarayannya tidak begitu jelas. Ada wartawan yang bekerja selama bertahun-tahun tapi tidak diangkat sebagai karyawan. Ada yang bekerja baru beberapa tahun sudah diangkat. Ada juga yang sudah tiga tahun bekerja, masih dianggap magang. Hal ini terungkap berdasarkan kasus yang ditangani AJI.

73 Karyawan Olga lebih sering bekerja kantor. Hanya ketika ada artis atau program khusus berkaitan dengan remaja, wartawannya melakukan liputan. Sistem kerjanya tidak baku. Wartawan tidak diharuskan absen tiap hari. Hanya beberapa hari menjelang deadline, mereka mengantor. Libur dan Cuti tidak jelas. Meski demikian, asalkan ada izin dari pimpinan, libur dan cuti bisa diberikan. Jumlah karyawan majalah ini sekitar 40 orang.

matis dipegang keluarga pemilik grup itu. Mengambil segmen keluarga, tabloid ini berolah sekitar 10 ribu eksemplar. Selain karyawan di Semarang, tabloid ini juga mempekerjakan kontributor di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Sebagian karyawan merupakan kru Suara Merdeka yang diperbantukan. Jumlahnya sekitar 35 orang. Sistem kerja fleksibel. Wartawan tidak harus bekerja tiap hari. Libur dan cuti menyesuaikan situasi. Tidak pernah ada gejolak di tabloid ini hingga kini.

Untuk harian, ada *Radar Semarang*. Harian ini pada pertengahan 1999 terbit sebagai suplemen pada harian *Jateng Pos* (Jawa Pos Grup wilayah Jawa Tengah dan DIY). Setahun kemudian, *Jateng Pos* berganti nama menjadi *Radar Semarang*. Sahamnya dikuasai Jawa Pos. Total oplahnya 55 ribu eksemplar meliputi Kota Semarang, Salatiga, Magelang, Pekalongan, Kabupaten Demak, Temanggung, Purworejo, Wonosobo, Kendal, dan Batang. Jumlah wartawannya kurang lebih 20 orang (untuk Semarang saja)

Kondisi keuangan koran ini cukup sehat. Mereka mampu bersaing dengan Suara Merdeka untuk perolehan iklan dan pembaca. Selain gaji, karyawan mendapat tunjangan keluarga. Libur dan Cuti mengikuti perundang-undangan. Meski demikian, dalam beberapa kasus, wartawan yang libur atau cuti kadang masih diharuskan mengirim berita.

Selain Radar Semarang, grup Jawa Pos lainnya di kota ini adalah *Meteor*. Media ini terbit sejak 6 September 2000. Dengan gaya bombastis dan sensasional, Meteor diarahkan merebut segmentasi menengah ke bawah. Karena agak berbeda (secara gaya bahasa, cenderung vulgar dengan cita rasa lokal) di bandingkan koran lainnya, Meteor berhasil merebut simpati pembaca. Oplah mereka sekitar 50 ribu eksemplar untuk area Jawa Tengah dan DIY.

Kondisi keuangan Meteor cukup sehat. Selain gaji, wartawan juga menikmati jaminan hari tua. Bagi karyawan yang

bekerja selama 20 tahun akan mendapatkan tali ksasih sebesar Rp 200 juta. Kebijakan ini dirintis sejak tahun lalu bekerja sama dengan Bank Mandiri. Iuran karyawan ditanggung perusahaan.

Sistem kerja wartawan lumayan berat. Ada cuti tapi susah diambil. Perusahaan tetap mewajibkan wartawan yang cuti untuk kirim berita. Akibatnya hanya sedikit yang bisa benar-benar menikmati cuti alias libur, kecuali saat hari raya (hanya dua hari libur). Sekitar tahun 2000-an sempat ada gejolak di koran dengan jumlah wartawan kurang lebih 20 wartawan sekaresidenan Semarang, Jogja dan Solo ini. Wartawan mogok kerja. Aksi ini tidak diikuti secara massal. Akibatnya, wartawan yang mogok dipecat atau memilih mengundurkan diri baik-baik.

Harian lain yang perlu diketahui sejarahnya adalah *Harian Semarang*. Harian ini terbit perdana pada Agustus 2009. Sang pemilik adalah bos penerbit CV Aneka Ilmu, Soewanto. Kendali Harsem, demikian media itu disebut, dipegang anak Soewanto, Nugroho. Yang berada dalam satu grup bisnis ini antara lain, Hotel Semesta, Sekolah Semesta, dan klinik kecantikan.

Oplah koran ini baru pada kisaran 8 ribu - 10 ribu. Setelah setahun terbit, area persebarannya diperluas, mulai Demak, Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Kendal. Total jumlah karyawan kurang lebih 40 orang. Wartawan libur sehari dalam seminggu, karena pada hari Minggu, koran ini tidak terbit. Cuti hanya diberikan atas kebijakan pimpinan. Kondisi keuangan koran ini agak seret. Sebab itu, perusahaan tak memberikan tunjangan atau fasilitas apa pun kepada karyawannya⁷⁴.

Untuk jumlah stasiun radio di Jawa Tengah, berdasarkan data Dewan Pers, ada 16 stasiun. Adapun TV ada 3 stasiun.

74 Harian yang juga perlu disebut di Semarang adalah Warta Jateng. Media ini terbit setelah Kompas Biro Jawa Tengah resmi bubar pada akhir 2010. Warta Jateng mulai terbit 17 Januari 2011. Sahannya dipegang grup Warta Kota.

Stasiun radionya masing-masing: *Pas FM* 106 Mhz, *RRI Pro-1 FM* 89,0 Mhz, *TOP FM* 89,4 Mhz, *Trijaya FM* Semarang 89,8 Mhz, *TRAX FM* Semarang 90,2 Mhz, *RRI Pro-3 FM* 90,6 Mhz, *Elshintar FM* 91,0 Mhz, *Smart FM* 93,4 Mhz, *RRI Pro-2 FM* 95,3 MHz, *Female FM* 96,1 Mhz, *Suara Semarang FM* 96,9 Mhz, *Pro Alma FM* 97,7 Mhz, *Gaya FM* 98,5 Mhz, *Merci FM* 98,9 Mhz, *Radiks FM* 99,3 Mhz, *RCTFM* 101,2 Mhz, *IBC FM* 101,6 Mhz, *Prambors FM* 102,0 Mhz, *GajahMada FM* 102,4 Mhz, *Jatayu FM* 102,8 Mhz, *Kis FM* 103,2 Mhz, *IMELDA* 104,4 Mhz, *Suara Sakti FM* 105,2 Mhz, *Rasika FM* 105,6 Mhz, *Radio Dakwah Islam (DAIS) FM* 107,9 MHz dan *Rhema Radio FM* 88,6 MHz⁷⁵.

Radio Idola. Stasiun radio ini didirikan pada 1999 dengan label Joss FM. Karena dianggap kurang berhasil, namanya diubah menjadi Idola. Pemilik radio ini adalah pengusaha properti dan jok mobil di Semarang, Handoyo. Segmentasi kelas menengah ke bawah. Sajian utamanya, informasi, dialog, dan program off air. Untuk mendukung siaran, Idola memiliki ‘cabang’ di Jepara. Pendengarnya terbentang dari Kedu (Magelang, Wonosobo, Temanggung) hingga Pantura Timur Jawa Tengah. Kondisi keuangan perusahaan ini cukup baik. Iklan dan kegiatan off air berjalan lancar. Libur dan cuti diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan, tidak ada sejarah protes karyawan sejak berdiri hingga kini.

Radio Smart. Radio ini mulai mengudara pada tahun 2001. Awalnya berjejaring dengan Smart FM Jakarta, namun dalam perkembangan, pada tahun 2009, radio ini lepas dari jaringan. Secara finansial, mereka berdiri sendiri. Sementara dari sisi program, beberapa masih menginduk ke jaringan Smart FM.

Pemilik radio ini juga pemilik radio Idola. Sejak lepas se-

cara finansial dari Smart FM, kantor radio ini jadi satu dengan Idola. Satu ruko, bersebelahan. Menurut informasi, langkah ini diambil karena pemilik tak kuat menyewa ruang di Gedung HSBC-kantor Smart sebelumnya. Jumlah wartawan radio ini hanya dua orang. Libur dan cuti mengikuti sehari dalam seminggu dan cuti 12 hari selama setahun. Meski sempat gonjangan-jangjing, karena beberapa karyawannya keluar, tak ada sedikit pun nuansa protes di perusahaan ini.

Radio Rasika. Rasika dipegang Hasanudin, Ketua PRSSNI Jawa Tengah saat ini. Saham radio ini dimiliki Hasanudin dan tiga pengusaha asal Surabaya. Program tetapnya antara lain informasi, siaran lalu lintas, hiburan, dan pengajian. Jangkauan radio ini mencapai Pantura Timur Jawa Tengah, seperti Grobogan, Pati, dan Blora.

Rasika juga didirikan di Pekalongan dan Kota Semarang. Untuk Pekalongan, formatnya menyerupai kantor pusat yang berada di Ungaran, Kabupaten Semarang. Sementara Rasika Kota Semarang sedikit berbeda. Program utamanya adalah hiburan berupa lagu dangdut. Kondisi keuangan radio ini lumayan baik meski pendapatannya fluktuatif. Mereka mendapatkan pemasukan besar dari program off air, seperti talkshow atau liputan khusus.

Jumlahnya karyawannya kurang lebih 40 orang, termasuk 3 wartawan. Mereka mendapatkan libur dan cuti sesuai perundang-undangan, libur sehari dalam seminggu dan cuti 12 hari selama setahun. Tidak ada sejarah perlawanan di perusahaan ini.

Radio Trijaya. Radio Trijaya yang merupakan jaringan radio milik MNC, mulai mengudara di Semarang sejak tahun 2002. Selain hiburan, radio ini juga menyiarkan berita, baik melalui jaringan maupun siaran lokal. Wartawannya ada tiga di Semarang. Satu diantaranya bertugas menjadi korlip yang kadang ikut liputan juga. Kondisi keuangan tak cukup baik. Gaji

karyawan masih ditanggung pusat karena pemasukan dari program daerah belum mencukupi. Tidak ada bonus, tunjangan prestasi, atau tambahan apa pun meski karyawan dilibatkan dalam program off air atau kerja sama dengan pihak lain.

Libur dan cuti sesuai perundang-undangan. Meski demikian, selain reportase, wartawan juga dibebani dengan program mingguan atau talkshow. Sehingga jatah libur mereka kadang berkurang.

Jumlah TV, di Jawa Tengah tercatat ada 4 buah, yaitu PT Banyumas Citra Televisi (BMS TV), PT Televisi Dian Nuswantoro (TVKU 23 UHF) dan PT Televisi Semarang Indonesia (TVB 47 UHF). Tiga dari TV itu, yaitu TVKU, TVB dan Pro TV berada di Semarang⁷⁶.

TV Borobudur. TV Borobudur mulai siaran pada pertengahan tahun 12 Mei 2003. Saham televisi yang lebih populer dengan sebutan TVB ini dimiliki beberapa pengusaha bukan dari kalangan media, antara lain Hengki Gunawan. Wartawannya tersebar di hampir seluruh kabupaten/ kota se-Jateng. Total karyawannya berkisar 60 orang. Sebagian besar diantaranya berstatus kontributor, dibayar per berita tayang. Sistem kerjanya, bagi yang berada di Semarang diharuskan berkantor, bagi yang berada di luar kota hanya setor berita melalui kurir.

Yang agak berat, wartawan tidak hanya melakukan liputan, tapi juga mengedit berita. Tim pemberitaan menerima hasil jadi. Untuk libur dan cuti mengikuti perundang-undangan. Libur sehari dalam seminggu dan cuti 12 hari selama setahun. Pada akhir 2010, stasiun TV ini dibeli Kompas TV. Hingga kini belum jelas arah selanjutnya. Namun wartawan dan karyawan masih bekerja sebagaimana biasa. Disebut-sebut, Kompas TV masih merekrut orang-orang baru di stasiun TV tersebut.

76 Data Pers Nasional 2010, Dewan Pers, Desember 2010.

Sebelumnya, TVB pernah didekati Trans Corp. Pernah satu kali ada protes dari wartawan yang dipecat pada tahun 2007. Namun aksi itu tidak berujung ke jalur hukum. Kasusnya bisa diselesaikan dengan cara mediasi.

Semarang TV. Awalnya, stasiun televisi ini bernama Cakra Semarang TV. Pada tahun 2008, namanya diubah menjadi Semarang TV. Grup Bali TV ini mulai mengudara pada tahun 2006. Sahamnya patungan antara pengusaha Semarang, KRMTM Ismangun, dan pemilik Bali TV, Satria Narada. Kondisi keuangan perusahaan ini tidak begitu sehat. Makanya, jika ada wartawan yang keluar, mereka tidak mencari pengganti. Beban kerjanya diberikan kepada wartawan lainnya. Selain itu, beberapa wartawan juga bekerja ganda. Misalnya mengedit berita hingga membantu program off air.

Libur dan cuti diberikan sesuai perundang-undangan. Libur sehari dalam seminggu dan cuti 12 hari selama setahun. Pernah ada protes dari wartawan yang dipecat karena dianggap menyalahi kontrak. Wartawan ini bekerja lebih dari 2,5 tahun, tapi statusnya masih kontrak. Dalam kontrak disebutkan, ia dilarang menikah dan melahirkan. Tapi larangan itu dilanggar. Kasusnya berhenti, karena pengusaha tidak pernah hadir dalam mediasi. Pihak Depnakertrans memutuskan gugatan wartawan ini tidak bisa diteruskan.

TVKU. Sebelumnya, sekitar tahun 2003, TVKU (TV Kampus Udinus) hanya menyiarkan program pendidikan. Tapi sejak 1 Desember 2004, mereka resmi menjadi televisi komersial. Siarannya tak melulu pendidikan, tapi juga berita, hiburan, dan talkshow. Daya jangkauan siarannya terbentang dari Pemalang (barat) dan Blora (Timur).

Jumlah karyawannya kurang lebih 40 orang. Hampir semuanya berasal dari mahasiswa di kampus tersebut yang dulunya magang. Libur dan cuti diberikan sesuai ketentuan undang-undang. Kondisi keuangan perusahaan ini diklaim lu-

mayan menjanjikan. Terbukti, iklan masih terus mengalir meski tidak melimpah. Sang pemilik yang juga Rektor Udinus, Edi Nursasongko memanfaatkan media ini untuk mem-branding kampusnya. Sistem kekaryawanan tidak begitu jelas. Meski demikian, karyawan mendapatkan gaji dan ongkos operasional.

Pro TV. Pro TV mengudara sejak 2004. Sahamnya dimiliki pengusaha asal Jakarta, Leo Sutanto. Pada tahun 2008, Pro TV diambil alih MNC Grup. Sebagian karyawan Pro TV direkrut, sebagian keluar dengan 'tali asih'. Koresponden MNC grup-RCTI, Global, TPI (yang kini jadi MNC TV) sewilayah Jawa Tengah dan DIY, akhirnya menjadi satu atap. Mereka menempati jabatan sebagai asisten produser hingga produser. Sementara, untuk kameraman, sebagian diambilkan dari orang-orang yang dulunya membantu koresponden. Selain siaran sendiri, Pro TV juga memasok berita untuk MNC Grup. Wartawannya, sebanyak 52 orang, tersebar di hampir semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Secara umum, perusahaan dalam kondisi sehat meski tidak menjamin karyawannya mendapat penghargaan yang memadai. Untuk asuransi saja, karyawan berinisiatif sendiri dengan ikut BNI Life. Jika ada yang kecelakaan dalam liputan, biaya medis tidak menjadi masalah. Iklan Pro TV lumayan banyak, meski hasilnya tidak terlampau besar. Program off air juga berjalan. Dengan modal SDM 'eks koresponden' TV nasional, Pro TV cukup dihargai di kalangan pemerintah atau swasta untuk menggarap program-program dokumenter atau publikasi visual.

Upah Minimum dan Upah Layak

Upah minimum di Jawa Tengah tahun 2011 sebesar Rp 675.000. Dibanding tahun sebelumnya, Rp 660 ribu, upah minimum ini mengalami kenaikan Rp 15.000 (2,27%). Dibanding dengan provinsi lainnya, Jawa Tengah memiliki UMP paling

kecil, masih berada di bawah DI Yogyakarta yang UMP tahun 2011 Rp 808.000, Jawa Timur Rp 705.000, Jawa Barat 732.000, Banten Rp 1.000.000 dan DKI Jakarta Rp 1.290.000.

Apakah upah itu sudah memadai? Tentu saja tidak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan AJI Semarang, upah layak untuk jurnalis di kota ini sekitar Rp 3,2 juta.

Tabel II.41 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Semarang Tahun 2011

Kebutuhan	Jumlah
Makanan dan Minuman	Rp 1,260,800
Perumahan dan Fasilitas	Rp 250,000
Sandang	Rp 186,528
Aneka Kebutuhan Lain	Rp 1.248.200
Tabungan (10% dari total upah)	Rp 294,553
Total	Rp 3.240.081

Upah Riil jurnalis

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan AJI Semarang, upah riil jurnalis di Semarang berkisar antara Rp 700 ribu sampai Rp 1,8 juta. Melihat hasil survey itu, gaji lebih baik justru dinikmati oleh jurnalis media cetak, di mana gaji terendahnya Rp 900 ribu seperti diterima oleh jurnalis harian *Meteor* dan gaji tertingginya Rp 1,8 juta, dinikmati oleh jurnalis di harian *Suara Merdeka*.

Sedangkan gaji jurnalis TV di Semarang, secara rata-rata masih lebih buruk dari jurnalis Radio. Jurnalis TV, seperti yang terjadi di Semarang TV, hanya menerima Rp 700 ribu. Bandingkan dengan jurnalis di tiga radio: Rasika FM, Smart FM dan Trijaya FM, yang bisa mendapatkan gaji Rp 1 juta per bulan.

Tabel II.42 Upah Riil Jurnalis Kota Semarang Tahun 2011

No	Nama Media	Gaji Pokok	Tunjangan/ Fasilitas/ Keterangan	Total Penerimaan
Cetak				
1	Suara Merdeka	Rp 1.150.000	Tunjangan transportasi (d disesuaikan jarak rumah dengan kantor) berkisar Rp 200 ribu – Rp 300 ribu, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga Rp 250 ribu, dan tunjangan prestasi berkisar Rp 100 ribu – Rp 750 ribu, terkadang ada tunjangan tambahan yang jumlahnya bervariasi Rp 100 ribu – Rp 500 ribu (karyawan tidak tahu tunjangan apa)	Rp 1.800.000 (rata-rata)
2	Wawasan	Rp 900.000	Tunjangan transportasi dan komunikasi Rp 250 ribu serta tunjangan prestasi (tidak tentu).	Rp 1.300.000 (rata-rata)
3	Harian Semarang	Rp 1.200.000	Tidak ada tunjangan dan fasilitas apa pun.	Rp 1.200.000
4	Radars Semarang	Rp 700.000	Tunjangan transportasi dan komunikasi Rp 200 ribu dan prestasi (tidak tentu).	Rp 1.100.000 (rata-rata)
5	Meteor	Rp 500.000	Tunjangan transportasi dan makan Rp 150 ribu, tunjangan prestasi tergantung produktifitas.	Rp 900.000 (rata-rata)
Radio/Online				
6	Rasika	Rp 700.000	Tunjangan transportasi Rp 100 ribu, tunjangan komunikasi Rp 100.000. Bonus diberikan kepada wartawan yang dinilai produktif, besarnya Rp 100 ribu.	Rp 1.000.000
7	Smart	Rp 850.000	Tunjangan transportasi Rp 100 ribu, tunjangan komunikasi Rp 100 ribu.	Rp 1.050.000
8	Trijaya	Rp 750.000	Tunjangan transportasi Rp 100 ribu, tunjangan komunikasi Rp 150 ribu..	Rp 1.000.000
Televisi				
9	Semarang TV	Rp 700.000	Tidak ada tunjangan transportasi dan tunjangan komunikasi.	Rp 700.000
10	Pro TV	Rp 1.000.000	Tidak ada tunjangan dan fasilitas. Karyawan mengusahaan sendiri asuransi kesehatan dengan cara iuran tiap bulan.	Rp 1.000.000

NB: TUNJANGAN PRESTASI DIBERIKAN KEPADA WARTAWAN YANG PRODUKTIF DAN MEMBANTU PROGRAM PERUSAHAAN DENGAN KALANGAN LAIN.

II.17 Kota Surabaya

Jumlah Penduduk 2010	: 949.775 jiwa
Pendapatan Asli Daerah 2010	: Rp 195 miliar
APBD 2010	: Rp 1,439 triliun
Upah Minimum Kota 2010	: Rp 1.180.000
Upah Layak Versi AJI 2011	: Rp 4.243.030
Jumlah Media Cetak 2010	: 9 media
Jumlah Media TV dan Radio 2010	: 19 (Radio), 5 (TV)



Nama Surabaya muncul sejak awal pertumbuhan kerajaan Majapahit. Nama ini diambil dari simbol ikan Sura dan Buaya,

untuk menggambarkan pertempuran di kawasan Ujung Galuh (nama daerah Surabaya di masa silam), yakni antara tentara yang dipimpin Raden Widjaja dengan pasukan tentara Tar Tar pada 31 Mei 1293. Peristiwa heroik inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Surabaya.

Di masa menjelang kemerdekaan, Surabaya juga menorehkan sejarah. Saat tentara Inggris mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945, pasukan Indonesia menyambutnya dengan perlawanan hebat. Brigadir Jenderal Mallaby, yang memimpin brigade ke-49 dengan kekuatan 6.000 serdadu, tewas dalam masa-masa ini. Ultimatum yang dikeluarkan tentara Sekutu agar penduduk Surabaya menyerah tanpa syarat, dijawab dengan perlawanan hebat di seluruh kota pada 10 November 1945.

Secara ekonomi, Surabaya sudah tersohor sejak lama. Di tahun 1612, daerah ini juga sudah menjadi bandar perdagangan yang ramai. Banyak pedagang Portugis membeli rempah-rempah dari pedagang pribumi. Pedagang pribumi membeli rempah-rempah secara sembunyi-sembunyi dari Banda, meskipun telah ada persetujuan dengan VOC yang melarang orang-orang Banda berdagang untuk kepentingannya sendiri.

Kini, Surabaya menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta. Sebagai kota metropolitan, Surabaya menjadi pusat kegiatan perekonomian di daerah Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Menurut Sensus Penduduk Tahun 2010, jumlah penduduk Surabaya sebanyak 2.765.908 jiwa. Dengan wilayah seluas 333.063 km², maka kepadatan penduduk Kota Surabaya adalah sebesar 8.304 jiwa per km².⁷⁷

77 Bahan diolah dari sejumlah sumber. Antara lain, website pemerintah kota Surabaya (<http://www.surabaya.go.id>) dan Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya)

Pertumbuhan Media

Di Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi –juga media– tentu saja berpusat di Surabaya sebagai ibukota provinsi. Sebagian besar surat kabar, radio, televisi, dan media online di Jawa Timur, berkantor di Surabaya. Jika secara ekonomi Surabaya menjadi kota nomor dua setelah Jakarta. Begitu pula dengan pertumbuhan medianya.

Berdasarkan data Dewan Pers dan Serikat Penerbit Surat kabar tahun 2010, Jawa Timur –di mana Surabaya sebagai episentrum pertumbuhannya—merupakan provinsi yang memiliki jumlah surat kabar dan oplah terbanyak nomor dua di seluruh Indonesia setelah Jakarta. Menurut data SPS⁷⁸ tahun 2010, jumlah surat kabar di Jawa timur sebanyak 70 buah. Rinciannya: 25 berupa surat kabar harian, 12 surat kabar mingguan, 20 tabloid, dan 12 majalah. Oplah media di provinsi ini 1.542.720 eksemplar. Data Dewan Pers menyebut jumlah yang berbeda: 14 harian, 35 mingguan dan 23 bulanan. Total ada 72 media⁷⁹.

Berdasarkan data Dewan Pers 2010, inilah rekap jumlah surat kabar di Surabaya. Harian di Surabaya meliputi *Duta Masyarakat*, *Harian Bangsa*, *Jatim Mandiri*, *Jawa Pos*, *Memorandum*, *Radar Surabaya*, *Surabaya Pagi*, *Surya*. Untuk mingguan, masing-masing: *Agrobis*, *Agrobis Burung*, *Asian Plus*, *Be-*

78 Media Directory 2010: The Power of Print Media, Infomedia dan Serikat Penerbit Surat-kabar (2010), 2010.

79 Menurut catatan AJI Surabaya, jumlah perusahaan media cetak (mainstream) yang berpusat di Surabaya mencapai 10 perusahaan. Antara lain: Harian Jawapos, Surya, Surabaya Post, Surabaya Pagi, Jatim Mandiri, Radar Surabaya, Memorandum, Bhirawa, Liberty, dan Nyata. Kota ini juga diramaikan oleh media cetak nasional yang beredar bahkan membuka kantor perwakilan di Surabaya, antara lain Koran Tempo, Media Indonesia, Harian Seputar Indonesia, Republika dan Kompas. Untuk media online terdapat setidaknya empat media mainstream, yaitu beritajatim.com, kabarbisnis.com, suarasurabaya.net dan detiksurabaya.com. Untuk kelompok media elektronik (radio & TV), menurut data KPID Jatim, hingga Desember 2010 terdapat 30 pemegang izin prinsip penyiaran radio, 10 media TV lokal dan TVRI Surabaya (10 media tv nasional seluruhnya juga membuka kantor cabang di Surabaya).

bas, Bidik, Bidik nasional, Cantiq, Elite, Fakta Metropolis, Forum Nusantara, Gloria, Indo Pers, Jaya Baya, Kisah Hikmah, Kisah Nyata, Komputek, Lacak, LezatLiberty, Untuk tabloid terdiri dari Memorandum, Modis, News Ponsel, Nurani, Nyata, Oto Trend, Sapujagat, The Epoch Times, dan Vonis. Untuk bulanan terdiri dari: Analisa Publik, Ayo, Detik Nasional, Exclusive, Fakta, Fun, Hot Chord, Info haji, Koki, Mentari, Posmo, Shop Shop, Suara Hidayatullah, Suara Surabaya Media, Toddie, Toymagz.

Tabel II.43 Media dan Oplah di Jawa Timur Tahun 2010

SKH		SKM		Tabloid		Majalah		Total	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
25	1.167.220	12	89.500	20	88.000	13	198.000	70	1.542.720

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010, INFOMEDIA DAN SPS, 2010

Untuk stasiun radio, inilah yang ada di Surabaya: *Istara FM 101.1 Mhz, Wijaya FM 103.5 MHz, Antares FM 92.9 MHz, Bahtera FM 96.4 MHz, Era Bima Sakti FM 105.9 MHz, Miniwat AM 84.6 KHz, SCFM 104.7 MHz, camar FM 103.1 MHz, Devina Jelita FM 84.80 MHz, hard Rock FM 89.70 MHz, Mercury FM 96.0 MHz, Merdeka FM 106.7 MHz, Metro FM 88.50 MHz, Elshinta FM 101.0 MHz, Suara MTB FM 102.7 MHz, Cosmonita AM 84.6 KHz, la Victor AM 1242 KHz, Antariksa AM 1278 KHz, Suara Surabaya FM 100.0 MHz, Giga FM 99.6 MHz, Global FM 90.9 MHz, M Radio FM 98.8 MHz, Kota FM 88.1 MHz, media FM 90.1 MHz, Sonora FM 98.0 MHz, Cakrawala FM 101.50 MHz, Starto FM 101.9 MHz, Suzana FM 91.3 MHz, dan Colors Radio FM 87.7 MHz.*

Sedangkan stasiun TV di Surabaya terdiri dari: *Jawa Pos Media TV (JTV), Surabaya media TV (SBO), Televisi Elang Medika Internasional MH TV 62 UHF, Matahari Nusantara TV, Arek TV 31 UHF, Bama Berita Sarana TV, Oxcy Media TV (BC Channel), Space Toon 58 UHF, dan Surabaya TV 44*

UHF⁸⁰.

Upah Minimum dan Upah Layak

Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2011 ditetapkan Rp 1.115.000 per bulan. Jumlah ini lebih besar dari tahun 2010, yang UMK-nya Rp 1.031.500. Dengan upah seperti ini, maka UMK Surabaya masih kalah dari Gresik, yang UMK-nya Rp 1.133.000 per bulan. Soal ini sempat diprotes oleh buruh di Surabaya. Sebab, selama ini UMK kota ini merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Tentu saja, upah itu masih jauh dari memadai untuk kebutuhan jurnalis di Surabaya.

Berdasarkan hasil survei AJI Surabaya, upah layak untuk jurnalis di kota Pahlawan ini adalah Rp 3.864.850. Angka ini diperoleh setelah melakukan survei pasar atas 24 item ditambah 10 persen komponen tabungan barang sesuai acuan yang diberikan AJI Indonesia. Adapun hasil survei atas 24 item barang diperoleh angka Rp 3.513.500 sementara tabungan Rp 351.350.

Tabel II.44 Kebutuhan Layak Jurnalis Kota Surabaya Tahun 2011

Kebutuhan	Jumlah
Makanan dan Minuman	Rp 1.324.000
Perumahan dan Fasilitas	Rp 300.000
Sandang	Rp 798.000
Aneka Kebutuhan Lain	Rp 1.091.500
Tabungan (10% dari total upah)	Rp 351.350
Jumlah	Rp 3.864.850

Dari kuesioner dan wawancara yang dilakukan tim AJI Surabaya, hanya harian Jawa Pos yang menggaji jurnalis dengan memenuhi upah layak jurnalis di Surabaya. Media-media

80 Data Pers Nasional 2010, Dewan Pers, Desember 2010, hal. 290.

lain, termasuk yang berada di bawah naungan Grup Jawa Pos, belum menerapkan sistem penggajian yang memenuhi standar upah layak versi AJI Surabaya.

Upah Riil Jurnalis

AJI Surabaya menyebarkan 50 kuesioner kepada jurnalis yang telah diangkat menjadi karyawan di sejumlah perusahaan media yang berkantor pusat di Surabaya. Adapun sebaran responden adalah 6 jurnalis radio dan online, 14 dari media cetak dan 5 jurnalis media tv lokal. Hasil survey AJI Surabaya menunjukkan terdapat ketimpangan dalam sistem pengupahan di antara media yang berkantor pusat di Surabaya. Indikasinya ada perusahaan yang telah memberi upah bulanan Rp 4.500.000 jauh di atas angka UMK Surabaya 2011 yang ditetapkan sebesar Rp 1.115.000. Namun terdapat ironi yaitu ada perusahaan media di Surabaya yang menggaji jurnalis di bawah nilai UMK. Menurut hasil survei ada perusahaan media cetak di Surabaya yang memberi gaji Rp 875.000 per bulan.

Secara umum hasil survei AJI Surabaya menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan media belum sanggup memberi upah sesuai realita kebutuhan jurnalisnya. Ini terlihat dari jawaban para responden rata-rata kebutuhan riil jurnalis mencapai Rp2.837.879 sementara upah riil sebesar Rp 2.093.000. Upah yang lebih rendah dibanding kebutuhan riil jurnalis berdampak pada terganggunya proses kerja. Untuk memenuhi kebutuhannya sejumlah jurnalis memilih mengorbankan idealisme dengan menerima imbalan dari narasumber. Sebagian lain memenuhi kebutuhan dengan menjalankan usaha sampingan.

II.18 Kota Yogyakarta

Jumlah penduduk	: 388.627 (2011)
Pendapatan Asli Daerah	: Rp 198 miliar (2010)
APBD	: Rp 744.107.426.500 (2010)
Upah Minimum Provinsi	: Rp 808.000 (2011)
Upah layak versi AJI	: Rp 3.147.980 (2011)
Jumlah media cetak dan online	: 16 (2010)
Jumlah media penyiaran	: 16 (radio), 4 (TV)



Lahirnya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti, 13 Februari 1755. Dengan perjanjian yang ditandatangani Belanda itu, Kerajaan Mataram dibagi dua: setengah masih menjadi hak Kerajaan Surakarta, selebihnya hak Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alogo Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya antara lain di sekitar Yogyakarta. Setelah perjanjian itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahannya ini ialah hutan, yang kemudian dibabat untuk jadi keraton. Setahun kemudian, keraton itu rampung dan menandai berdirinya Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di keraton yang baru. Peresmian terjadi 7 Oktober 1756.

Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hameng-

ku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari Presiden RI. Saat itu, Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta, yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman, baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947. Setelah keluarnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk pemerintahannya disebut Pemerintahan Kota Yogyakarta.⁸¹

Pemetaan Industri Media

Menurut data Serikat Penerbit Surat kabar (SPS), terdapat 5 surat kabar, 1 surat kabar mingguan dan 12 majalah di Yogyakarta. Ke-12 majalah itu: *Jaka Lodang* (mingguan), *Praba*, *Kabare*, *Kombinasi*, *Handicraft Indonesia*, *Rohani*, *Sinus*, *Suara Aisyiyah*, *Suara Muhammadiyah*, *Utusan* (dwi mingguan), dan *Basis* serta *Pusara* (dwi bulanan). Adapun harian adalah *Bernas Jogja*, *Harian Jogja*, *Kedaulatan Rakyat*, *Koran Merapi*, *Radar Jogja*. Ada pula surat kabar nonharian: *Minggu Pagi*.

Dewan Pers⁸² dan Serikat Penerbit Surat kabar pada 2010⁸³ mencatat di Daerah Istimewa Yogyakarta ada 5 harian, 3 mingguan dan 8 bulanan. Masing-masing: Harian *Bernas Jogja*,

81 Sejarah Kota Yogyakarta, dari website Pemerintah Kota Yogyakarta. Lihat di <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21>

82 Dewan Pers, *Data Pers Nasional 2010*, Desember 2010, Jakarta, hal. 147-151.

83 Serikat Penerbit Surat kabar dan Infomedia, *Media Directory 2010: The Power of Print Media*, Infomedia dan SPS, Jakarta, hal 68-70, 94, dan 119.

Harian Jogja, Kedaulatan Rakyat, Koran Merapi, Radar Jogja. Mingguan ada Djaka Lodang, Malioboro Ekspres, Minggu Pagi. Untuk surat kabar bulanan ada Basis, Gong, Info Wisata Jogja, Kabare, Spirit Bisnis, Suara Aisyiyah, Suara Muhammadiyah, dan Suluh. Semua surat kabar itu ada di Kota Yogyakarta.

Tabel II.45 Jumlah Media dan Oplah Surat kabar di DI Yogyakarta Tahun 2010

SKH		SKM		Majalah		Total	
Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah	Media	Oplah
5	282.465	1	72.866	12	81.400	19	436.731

BAHAN: MEDIA DIRECTORY 2010: THE POWER OF PRINT MEDIA, INFOMEDIA DAN SPS

Melihat statsitisk yang ada di SPS, jumlah media di Yogyakarta dalam dua tahun ini memang ada penambahan, meski sangat kecil yaitu 1 media. Jumlah media di tahun 2009 dan 2008 juga sama yaitu 19. Meski dari segi jumlah media tergolong kecil pertumbuhannya, namun dari segi oplah berbeda. Di tahun 2009, jumlah oplah mencapai 390.031 eksemplar dan menjadi 436.731 eksemplar di tahun berikutnya Artinya, dalam setahun ada penambahan sekitar 46 ribu eksemplar.

Untuk radio, tercatat ada 20 stasiun. Masing-masing: Radio *Geronimo* 106.1 Mhz, *Eltira* FM 102.1 Mhz, *Persatuan* (Bantul), Radio *Unisi*, Radio *Andalan Muda* 100.5 Mhz, *Gema Ceyca Daksinarga* 98.6 Mhz, *Istakalisah* 96.2 Mhz, *Prambors Yogya* 95.8 Mhz, *Mataram Buasan Suara* 92.7 Mhz, *I Radio* 88.7 Mhz, *Reco Buntung* 99.4 Mhz, *Star FM* 101.3 Mhz, *Suara Agrososro* 93.2 Mhz, *Sasando FM* 90.3 Mhz, *Swara Teknologi Nasional* 103.7 Mhz, *Yasik* 95.4 Mhz, *Rosala* 107.2 Mhz, *RRI Programa 1* 91.1 Mhz, *RRI Programa 2* 102.5 Mhz, dan *RRI Programa 4* 102.9 Mhz. Dari 20 radio itu, Radio *Persatuan* mengudara di Bantul, *Andalan Muda* dan *Rosala* di Kulon Progo, *Suara*

Agrososro di Gunung Kidul, dan *Sasando FM* di Sleman⁸⁴.

Untuk televisi, berdasarkan data Dewan Pers, tercatat ada empat (4): *Arah Dunia TV* (ADI TV) 44 UHF, *Reksa Birama Media RB TV* 40 UHF, *Jogja TV* 48 UHF, dan *TVRI Yogyakarta*⁸⁵.

Upah Minimum dan Upah Layak

Daerah Istimewa Yogyakarta, di tahun 2011, menetapkan upah minimum sebesar Rp 808.000. Ada kenaikan sebesar Rp 62.306 (8.36%) dibanding tahun sebelumnya yang upah minimumnya Rp 745,694. Dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa lainnya, Yogyakarta memang relatif lebih tinggi UMP-nya: Jawa Timur (Rp 705.000), Jawa Tengah (Rp 675.000), dan Jawa Barat (Rp 732.000). Hanya Provinsi Banten yang UMP-nya lebih tinggi dari Yogyakarta yaitu Rp 1 juta.

Upah minimum yang ditetapkan pemerintah ini sebenarnya sedikit lebih besar dari yang diusulkan Dewan Pengupahan, yang saat itu mengajukan Rp 804.000. Gubernur DIY, sebagai pemutus akhir dari ketentuan pengupahan, melalui Keputusan Gubernur DIY No. 270/KEP/2010 tertanggal 22 November 2010, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2011 sebesar Rp 808.000.

Apakah angka Rp 808 ribu itu layak untuk memenuhi kebutuhan jurnalis di kota ini? Tentu saja tidak. Berdasarkan survei kebutuhan hidup layak yang dilakukan AJI Yogyakarta⁸⁶, upah minimum bagi jurnalis di daerah ini adalah Rp 3.147.980. Bahkan, upah minimum tahun 2011 yang ditetapkan pemerintah itu juga masih jauh jika dibandingkan dengan upah layak yang

84 Dewan Pers, *op cit* hal. 163-164

85 Dewan Pers, *ibid* hal. 289.

86 Penentuan kebutuhan hidup layak ini berdasarkan hasil survei harga kebutuhan di toko-toko yang dilakukan pada 15 Desember 2010 sampai 7 Januari 2011.

disusun AJI Yogyakarta di tahun 2008. Saat itu, upah layak versi AJI Yogyakarta sebesar Rp 2,7 juta per bulan.

Tabel II.46 Kebutuhan Hidup Layak Jurnalis Kota Yogyakarta Tahun 2011

Makanan dan minuman	Rp 1.140.200
Perumahan dan fasilitas	Rp 200.000
Sandang	Rp 435.000
Aneka kebutuhan lain	Rp 1.086.600
Tabungan 10 persen dari total upah	Rp 286.180
Total	Rp 3.147.980

BAHAN: SURVEI KEBUTUHAN JURNALIS AJI YOGYAKARTA, 2011

Sebagai bahan perbandingan, sejumlah organisasi buruh di Propinsi DIY juga menggelar survei upah layak. Tapi, tidak satu pun yang mendekati angka yang ditetapkan pemerintah. Semua menetapkan upah layak di atas Rp 1 juta. Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), melalui surveinya, menetapkan angka Rp 1.180.000 untuk upah layak pekerja setiap bulan; Perhimpunan Solidaritas Buruh (PSB) menemukan angka Rp 1,4 juta; dan KASBI menemukan angka Rp 3,2 juta.

Upah Riil Jurnalis

Bagaimana dengan kondisi riil upah jurnalis di Kota Yogyakarta? Secara umum, jurnalis cetak di DIY yang tergolong pemula menerima upah antara Rp 1 juta hingga Rp 1,7 juta per bulan⁸⁷. Namun masih banyak pula jurnalis yang memperoleh upah yang berada di bawah upah minimum. Salah satu perusahaan media cetak di Yogyakarta, misalnya, masih menggaji jurnalisnya pada angka Rp 600-an ribu.

Dari sekian banyak jurnalis yang bekerja di DIY, sebagian di antaranya adalah koresponden dan kontributor (bukan kary-

87 Hasil survei terhadap 8 jurnalis (4 media cetak, 1 TV, 2 radio, dan 1 media online) di Yogyakarta.

awan tetap) media cetak dan elektronik yang berdomisili di Jakarta, yang digaji berdasarkan berita yang dimuat di medianya. Konsekuensinya, tidak ada jaminan sosial dan kesehatan yang didapatkan.

Kondisi paling memprihatinkan dialami oleh jurnalis radio di Yogyakarta. Meskipun jurnalis radio jumlahnya cukup banyak, namun umumnya kesejahteraan mereka masih jauh di bawah upah minimum. Bahkan ada sebagian jurnalis radio yang digaji cuma Rp 15.000 sampai Rp 25.000 per berita setiap hari, dengan pembatasan berita yang dimuat setiap harinya.

Rendahnya upah layak yang diterima oleh jurnalis di DIY ini menjadikan banyak jurnalis yang cenderung permisif terhadap amplop⁸⁸. Banyak di antara mereka yang justru hanya menjadikan jurnalis sebagai status dan tidak terlalu mengharap gaji yang memang rendah dari perusahaannya, karena mereka bisa mendapatkan uang yang lebih layak dari hasil jumpa pers atau amplop-amplop yang berasal dari berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta.

88 Sikap permisif ini tercermin dalam resistensi mereka ketika pengurus AJI Yogyakarta mempersoalkan APBD Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk jurnalis.

BAB III

AJI dan Isu Kesejahteraan Jurnalis

SURVEI yang dilakukan sejumlah lembaga tentang postur ekonomi jurnalis sejak tahun 2000 dan sesudahnya memberikan gambaran cukup terang bagaimana tingkat kesejahteraan mereka yang menggeluti profesi ini. Temuan yang menyebutkan ada jurnalis yang digaji di bawah Rp 200 ribu, atau banyak yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 1,5 juta, merupakan fakta tak terbantahkan tentang potret sebenarnya dari kehidupan ekonomi para jurnalis. Tapi, apakah fakta ini mengejutkan? Memprihatinkan, tentu saja “ya”, tapi tak sepenuhnya mengagetkan.

Mari kita lihat statistik negara ini. Penduduk Indonesia di tahun 2011 diestimasi sekitar 245 juta—sensus penduduk tahun 2010 menyebut angka 237 juta penduduk. Dari jumlah itu, yang dikategorikan miskin menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 31,02 juta jiwa¹. Dengan mengakui adagium

¹ Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di Indonesia berkurang, pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta jiwa (13,33%) berkurang 1,51 juta jiwa dibandingkan dengan Maret 2009 sebesar 32,53 juta jiwa (14,15%). Lihat <http://www.depkominfo.go.id/berita/bipnews-room/jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-tahun-2010-berkurang/>

bahwa pers adalah “cermin kondisi masyarakat”, maka fakta banyak jurnalis yang diupah tak layak itu seperti sesuatu yang bisa dipahami, meski—tentu saja—tak bisa dibenarkan.

Jika ditelisik lebih dalam, masih banyaknya jurnalis yang menerima upah tak layak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi medianya. Anggota Dewan Pers periode 2007-2010 Leo Batubara dalam sejumlah kesempatan menyebut masih banyak industri media yang kondisinya kurang sehat. Berdasarkan data tahun 2009, ada sekitar 850 perusahaan media cetak. Celakanya, menurut Leo Batubara, hanya 30 persen saja yang sehat secara bisnis. Kondisi di industri penyiaran juga hampir sama. Dari sekitar 2.000 stasiun radio dan 120-an stasiun televisi, hanya 10 persen saja yang bisa dibilang “bugar” secara bisnis².

Berdasarkan pendataan Dewan Pers di tahun 2010, jumlah radio tercatat sebanyak 378, televisi 118, dan surat kabar sebanyak 952—harian (306), mingguan (389), dan bulanan (257). Pertumbuhan industri media dalam dua tahun ini lebih banyak diwarnai oleh ekspansi bisnis oleh pemain-pemain besar saja, sedangkan pemain bisnis media “kelas kaki lima” hanya sebatas bertahan. Dengan kondisi seperti itu, sepertinya bisa diperkirakan bahwa media yang sehat secara ekonomi memang sedikit membaik meski tak akan jauh dari taksiran Leo Batubara dua tahun lalu.

Beragamnya wajah pemain media, dari yang kelas “bintang lima” sampai “kaki lima”, memang tak lepas dari relatif longgarnya regulasi pembentukan media baru. Untuk media cetak, tak ada lagi kewajiban untuk mendapatkan lisensi Surat Izin Usaha Penerbitan Pers seperti di masa Orde Baru. Inilah yang membuat jumlah surat kabar melonjak drastis. Untuk penyiar-

2 Hanya 30 persen Perusahaan Media yang Sehat Bisnis, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18878/hanya-30-persen-perusahaan-media-yang-sehat-bisnis>

aran, kebijakannya memang relatif berubah dari sebelumnya. Izin penggunaan frekuensi tetap harus didapatkan. Jika sebelumnya hanya dari pemerintah, kini juga mensyaratkan ada rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Harus diakui dengan getir bahwa pemain media kelas “kaki lima” menjadi salah satu penyumbang potensial dari buruknya potret ekonomi jurnalis. Namun, media dari grup besar belum tentu pula memberi upah yang layak sesuai standar AJI.

Isu tentang kesejahteraan ini kurang menjadi perhatian pada masa Orde Baru. Dengan jumlah penerbitan yang terbatas dan hanya media-media yang punya cukup modal atau kedekatan dengan kekuasaan yang bisa terbit, maka ihwal kesejahteraan berada di urutan belakang dalam skala prioritas. Isu yang cukup kuat saat itu adalah tentang kebebasan pers yang memang masih jadi barang langka karena kuatnya represi pemerintah. Setelah rezim Soeharto jatuh di tahun 1998, yang diikuti longgarnya regulasi untuk bisa masuk ke bisnis media, barulah isu kesejahteraan mulai mencuat ke permukaan—selain soal kebebasan pers dan profesionalisme. Perubahan ritme ini pula yang tercermin dalam sejarah organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Organisasi ini berdiri pada 7 Agustus 1994, yang awalnya punya dua fokus utama: kebebasan pers dan profesionalisme. Pada saat itu, dua isu ini memang masih jadi masalah sangat “serius”, utamanya tentang kebebasan pers. Sistem politik yang represif, yang tercermin pula dalam sistem pers Indonesia, membuat kemerdekaan media dari tekanan dan intimidasi menjadi isu yang menonjol. Cukup banyaknya kasus pembredelan di masa Orde Baru menjadi bukti nyata tentang seriusnya ancaman terhadap kemerdekaan pers di masa itu.

Soal kesejahteraan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari AJI setelah organisasi ini resmi diterima sebagai anggota International Federation of Journalist (IFJ) di tahun

1996. Kepedulian cukup besar terhadap isu kesejahteraan itu tergambar cukup dalam pelaksanaan kongres AJI pada 1997. Itulah awal AJI menggarap isu kesejahteraan, selain kebebasan pers dan profesionalisme, melalui kampanye tentang hak-hak jurnalis dalam bekerja. Termasuk di antaranya: hak untuk mendapatkan upah dan tunjangan layak; menikmati kondisi dan suasana kerja yang memadai; serta hak untuk berserikat, baik dengan mendirikan, menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja.

III.1 AJI dan Kampanye Serikat Pekerja

Serikat pekerja, seperti tertuang dalam sejumlah literatur, merupakan instrumen modern untuk menjembatani perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Adanya organisasi yang menaungi para pekerja merupakan jawaban dari tak seimbangny hubungan antar keduanya. Untuk itulah perlu ada wadah yang menghimpun kekuatan pekerja agar bisa berjuang secara bersama-sama. Tentu saja aspirasi yang disampaikan secara kolektif itu diharapkan dapat menaikkan posisi tawarnya di depan pemilik modal.

Sejarah serikat pekerja di dunia bisa dikenali keberadaannya di abad ke-18 di sejumlah negara-negara Eropa³. Di Indonesia, tradisi ini mulai dikenal pada sebelum masa kemerdekaan yang ditandai dengan berdirinya Serikat Buruh Kereta Api dan Kereta Listrik (SVTP) pada 14 November 1908. Setelah itu, serikat pekerja terus tumbuh, dan tentu saja dipengaruhi pasang surut situasi politik sesudahnya. Sama seperti halnya institusi sipil lainnya, represi di masa Orde Baru membuatnya tak bisa berkembang. Apalagi dengan adanya kebijakan wadah tunggal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), yang tak

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_union

menoleransi organisasi lainnya.

Meski serikat pekerja di berbagai sektor sudah dimulai tahun 1908, tidak demikian halnya dengan serikat pekerja di sektor media. Referensi terjauh yang tersedia soal serikat pekerja media adalah pada tahun 1978 saat munculnya Dewan Karyawan Tempo di Majalah Tempo. Itu pun tak bisa disebut sebagai serikat pekerja atau serikat buruh seperti di sektor lain sezamannya, yang biasanya berwajah “garang” terhadap pengusaha. Sikap ini juga eksplisit tersirat dari salah satu tujuan yang ditulis dari pendirian itu dewan karyawan itu: untuk menjaga “keharmonisan hubungan” karyawan dan perusahaan.

Relatif barunya serikat pekerja di media tentu bukan karena tak ada sengketa perburuhan pada masa-masa sebelum tahun 1998. Menurut David T. Hill⁴, salah satu penjelasan yang cukup rasional melihat minimnya sengketa perburuhan di media massa karena pengelola media itu biasanya dimiliki oleh editor seniornya. Selain itu, nampaknya watak media sebagai sebuah industri belum terlalu menonjol seperti sektor lainnya. Ini pula yang bisa menjelaskan mengapa isu perburuhan tak bergaung keras, setidaknya sampai tahun 1970-an.

Pasca lahirnya Dewan Karyawan Tempo, berselang 14 tahun sesudahnya, muncul organisasi serupa di beberapa media. Antara lain: Kerukunan Warga Karyawan Bisnis Indonesia (1992); Serikat Pekerja PT Bina Media Tenggara-Jakarta Post (1993); Dewan Karyawan Forum (1997); dan Dewan Karyawan PT Abdi Bangsa-Penerbit Republika (1997).

Dengan hanya ada lima serikat pekerja media, dan itu pun hanya ada di media cetak, jumlah itu tergolong sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pers yang terbit saat itu. Pada tahun 1997, saat tercatat ada setidaknya lima serikat pekerja,

4 David T. Hill, *Merenungkan Sejarah, Menghadapi Masa Depan*, dalam Heru Hendratmoko (ed.), 5 tahun AJI: Tetap Independen, AJI, 1999, hal. 13.

jumlah penerbitan (berdasarkan pemilik SIUPP di Departemen Penerangan) ada 289. Itu artinya, jumlah serikat pekerja yang ada hanya sekitar 1,7 % saja dari seluruh media massa di Indonesia.

Saat AJI mulai berkampanye tentang isu serikat pekerja di tahun 1997, jumlah serikat pekerja memang masih kurang dari 10. Itu pun dengan format yang masih bisa dibilang jauh dari ideal untuk ukuran serikat pekerja. Umumnya adalah berupa Dewan Karyawan. Pilihan diksi Dewan Karyawan nampaknya sebagai bentuk “kompromi” atas kehadiran serikat pekerja di media tanpa harus membuat ngeri para pengusaha. Sebab, serikat buruh memiliki image kuat sebagai organisasi yang sering melakukan demo dan protes, dan itu membuat tidak nyaman pemilik media.

Meski tak jadi isu utama di tahun-tahun itu, pelan dan pasti masalah ini akan mencuat ke permukaan, yang memang kemudian ini menjadi kenyataan. Jatuh atau banggunya ekonomi sebuah negara, biasanya berimbas langsung pada kesejahteraan para pekerja. Itu pula yang bisa dilihat dalam kasus Indonesia tahun 1997, saat negara ini disapu krisis ekonomi yang kemudian berujung pada krisis politik tahun 1998. Krisis itu ditandai dengan bermunculannya kasus pemutusan hubungan kerja serta kolapsnya sejumlah perusahaan media. Dua soal ini juga yang nampaknya memberi dampak pada tumbuhnya serikat pekerja di tahun-tahun sesudahnya.

Dalam periode 1978 sampai 1998, baru tercatat ada lima serikat pekerja. Artinya, dalam lima tahun hanya ada satu serikat pekerja yang lahir. Ini berbeda dengan kurun waktu tahun 1998 sampai 2002 yang mencatat lahirnya 19 serikat pekerja baru⁵. Hal baru yang muncul dalam waktu empat tahun itu

5 Data berdasarkan monitoring Divisi Serikat Pekerja AJI Indonesia tahun 2006

adalah munculnya satu serikat pekerja di stasiun teve, satu di radio dan dua di media online.

Ke-19 serikat pekerja itu masing-masing: Perkumpulan Karyawan Kompas, Dewan Karyawan Tabloid KONTAN (1998); Dewan Pekerja ANTV, Serikat Pekerja Surabaya Post, Ikatan Karyawan Solo Pos (1999); Forum Komunikasi Karyawan Pos Kota (2000); Serikat Pekerja Detik.com, Serikat Pekerja KBR 68H, Serikat Pekerja Harian Neraca, Perkumpulan Karyawan Group Surya, Forum Karyawan SWA, Serikat Pekerja SCTV, Perkumpulan Karyawan Warta Kota, Serikat Pekerja Pers Waspada (2001); Serikat Pekerja Berita Kota, Dewan Pekerja Jaknews FM, Serikat Pekerja ANTARA, Serikat Pekerja Kopitime, dan Serikat Pekerja Sinar Harapan (2002).

Serika pekerja yang lahir setelah itu adalah Serikat Karyawan Indosiar (2009), Pontianak Post (2010), dan Harian Jogja. Bahkan, ada juga organisasi serikat pekerja yang khusus menaungi koresponden, seperti Serikat Pekerja Tempo (Sepakat).

Menurut AJI, salah satu kendala pertumbuhan serikat pekerja media adalah kurangnya kesadaran berserikat. Sikap ini sebagian dipicu oleh keengganan jurnalis untuk mengakui bahwa ia pada dasarnya sama dengan buruh di sektor lain dalam relasinya dengan perusahaan. Namun, blessing indiguisse dalam soal ini adalah memburuknya situasi ekonomi, yang kemudian diikuti kolapsnya sejumlah perusahaan media dalam kurun waktu 1999 sampai 2001.

Kolapsnya perusahaan media membuat sejumlah pekerja media menyadari betapa rentannya posisi mereka saat berurusan dengan pihak pemilik. Setelah perusahaan terancam bubar, atau terjadi PHK, umumnya sejumlah pekerja media menyadari pentingnya berserikat. Hanya saja, kesadaran pada saat seperti itu bisa dibilang terlambat. Sebab, perusahaan um-

umnya sudah tak lagi bisa diselamatkan. Serikat pekerja seperti petugas pemadam kebakaran yang datang ketika sebuah rumah sudah terlanjur hangus terbakar.

Sejak tahun 2000, serikat pekerja sebenarnya memasuki babak baru karena memiliki regulasi khusus yang melindunginya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh jelas menyebut soal hak pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja, serta sejumlah fungsinya di dalam sebuah perusahaan. Perlindungan itu juga diikuti oleh ancaman yang cukup jelas kepada pengusaha yang mengabaikan undang-undang ini—meski soal implementasi hukumnya jadi soal lain. Sayangnya jaminan itu tak cukup mendorong lahirnya serikat pekerja media. Selain kurangnya kesadaran di kalangan pekerja, faktor lain yang berperan besar dari kecilnya jumlah serikat pekerja media adalah adanya resistensi dari para pemilik media.

Manfaat dari adanya serikat pekerja sebenarnya cukup jelas. Secara hukum, pekerja akhirnya memiliki wadah yang sah untuk memperjuangkan aspirasinya. Aspirasi itu meliputi apa saja, dari soal suasana kerja sampai urusan kesejahteraan. Dengan adanya serikat, pekerja media memiliki wakil yang bisa bernegosiasi dengan pihak manajemen, sehingga tak lagi melakukannya secara sendiri-sendiri seperti saat belum memiliki organisasi semacam ini.

Dan yang tak kalah penting, dengan adanya serikat pekerja, pekerja media bisa melakukan tawar-menawar kepada perusahaan soal upah, tunjangan dan aturan di dalam perusahaan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perjanjian ini dilakukan melalui proses perundingan antara wakil serikat pekerja dan perusahaan. Melalui PKB inilah semua hal dituangkan. Seperti layaknya kesepakatan, maka PKB itu dibuat dengan mengakomodasi kepentingan dua pihak: pekerja dan pengusaha.

Hingga kini, memang tak semua serikat pekerja memiliki PKB. Dari sekitar 30 media yang memiliki serikat pekerja, baru enam saja yang memiliki PKB, yaitu grup Tempo, LKBN Antara, harian Republika, KBR 68H, Majalah SWA dan harian Pikiran Rakyat. Meskipun standar gaji enam perusahaan ini masih belum memenuhi standar upah layak AJI untuk jurnalis, setidaknya kesejahteraan perusahaan yang memiliki serikat pekerja—apalagi memiliki PKB—lebih baik dari perusahaan lainnya. Atau, setidaknya para pekerja di media itu memiliki wadah yang legal untuk memperjuangkan aspirasinya.

III.2 AJI dan Kampanye Upah Layak

Selain melalui serikat pekerja, isu kesejahteraan jurnalis juga dilakukan AJI melalui kampanye upah layak. Ini memang sesuatu yang baru dan menyempal dari pakem selama ini, di mana rujukan dalam pengupahan seringkali hanya merujuk pada kebutuhan hidup layak (KHL) untuk menentukan upah minimum—entah itu upah minimum provinsi, kota atau kabupaten. Dalam kampanye upah layak, AJI melakukan modifikasi dalam standar pengupahan yang harusnya diberikan kepada jurnalis. Pilot project dalam kampanye upah layak ini mulai dilakukan tahun 2006 lalu di Jakarta.

Metode dari upah layak itu sebenarnya mengadopsi standar penyusunan upah minimum, namun dengan komponen yang disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis. Dengan modifikasi itulah muncul sejumlah komponen seperti bahan bacaan dan kredit perlengkapan kerja. Komponen ini sebagai nilai tambah dari kebutuhan orang yang bergelut di profesi ini karena tanggungjawabnya yang berbeda dari profesi yang lain. Bagi AJI, komponen yang ada dalam upah layak AJI itu setimpal dengan beban dari para pekerja di bidang ini.

Dengan komponen yang berbeda, maka hasil dari temuannya pun otomatis rata-rata berada di atas nilai upah minimum

yang ditetapkan pemerintah—malah ada yang nilainya empat kali lebih besar. Standar seperti ini memang dianggap aneh bagi sebagian pengusaha media karena selama ini mereka terbiasa menjadikan upah minimum sebagai rujukan tunggal. Namun, sejumlah media mainstream terbukti merujuk pada standar upah yang berbeda, dengan nominal kesejahteraan di atas upah minimum kota atau provinsi. Beberapa media malah memiliki standar minimal penggajian untuk jurnalis lebih besar dari upah layak yang disusun AJI.

Meski sudah dimulai tahun 2006, baru pada tahun 2010 AJI menggelar survei upah layak jurnalis secara serentak di 16 kota, yang meliputi: Medan, Batam, Pekanbaru, Lampung, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Kediri, Surabaya, Makassar, Palu, Kendari, Pontianak, Denpasar, Kupang dan Jayapura. Survei dilaksanakan dalam kurun waktu Desember 2010 sampai Januari 2011. Selain merumuskan upah layak di masing-masing kota, AJI juga melakukan pemetaan kondisi upah jurnalis dan kondisi industri media, dengan mengambil sejumlah media mainstream sebagai rujukan.

Menilik survei upah layak yang dilakukan AJI tahun 2011, bisa dipastikan bahwa tak ada upah minimum yang bisa disebut layak dengan standar upah untuk jurnalis. Bahkan di kota yang standar upah layak jurnalisnya paling kecil, seperti Kediri misalnya, besar upah layak versi AJI hampir tiga kali lipat dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Malah, ada standar upah layak yang lebih besar sampai lima kali dari upah minimum provinsi, yaitu standar upah layak untuk jurnalis Kota Jayapura, Papua.

Ide upah layak jurnalis ini bukannya tanpa kritik. Dalam sebuah mailing list, ada yang mempertanyakan rasionalitas dari kampanye AJI ini. Dengan kondisi industri media saat ini yang kesenjangan pendapatannya berbeda luar biasa antara satu media dengan yang lain, membuat standar seperti itu ha-

nya realistis untuk dilaksanakan oleh media yang sudah mapan, tapi tidak untuk media yang keuntungannya secara ekonomi masih tak jelas. Apalagi, standar yang dibuat AJI menggunakan rumus sendiri, yang “menyempal” dari upah minimum yang disahkan pemerintah.

Bagi AJI, rintisan ke arah upah layak jurnalis ini merupakan bagian dari kampanye untuk membangun pers yang lebih baik dan profesional, yang mensyaratkan adanya lingkungan ekonomi yang memadai. Dengan tanggungjawab pers yang tak ringan seperti diamanatkan oleh Undang Undang Pers tahun 1940, adalah hal yang tak berlebihan jika kesejahteraan para pekerja media juga harus memenuhi syarat kelayakan. Para pekerja media harus bisa hidup berkecukupan meski tidak berlebihan. Selain itu, tuntutan untuk memiliki upah layak—yang nominalnya di atas upah minimum—juga bukan hal yang sepenuhnya baru. Sebab, gaji pekerja di sektor yang lain seperti pekerja IT, bank, pertambangan dan telekomunikasi tak selalu mengacu pada upah minimum.

Penyusunan standar semacam ini jamak pula dilakukan untuk menentukan upah layak di sejumlah sektor yang lain. Sebut saja standar yang disusun Kelly Services, Inc. soal standar upah sejumlah profesi di Indonesia. Dalam laporan berjudul *Employment Outlook and Salary Guide 2009/2010*, standar yang dibuat itu rata-rata di atas upah minimum, baik itu di sektor keuangan, bank, teknologi informasi, serta teknik dan mesin. Sebut saja standar gaji untuk staf, yang jenjang pendidikannya Diploma 3 atau Strata-1, untuk masa kerja satu tahun. Mereka rata-rata sudah menerima penghasilan di atas upah minimum provinsi.

Kampanye upah layak ini memang menjadi program jangka panjang AJI dan dipastikan tak bisa dicapai hasilnya secara ideal dalam waktu dekat. Tujuan awalnya adalah mengubah pola pikir pengusaha media untuk tak menggunakan ukuran

upah minimum kota atau provinsi untuk menyusun upah layak untuk jurnalis. Dalam jangka panjang, kampanye ini diharapkan bisa mengingatkan siapa saja yang ingin masuk ke bisnis ini untuk tak semata melihat “peluang emas” di balik bisnis ini, tapi juga menyadari adanya risiko dan tanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan yang pantas kepada para pekerjaannya—termasuk jurnalis.

AJI juga mendorong media yang secara ekonomi lebih mapan untuk mengadopsi upah layak. Ini dilakukan dengan melakukan roadshow kepada Serikat Penerbit Surat kabar dan sejumlah media. Dengan tanggungjawab besar yang dibebankan undang-undang, maka sudah sewajarnya jika jurnalis menuntut upah yang layak. Sebab, dengan akrobat apapun, sulit menjustifikasi bahwa jurnalis bisa hidup layak dengan upah minimum kota atau provinsi yang ditetapkan pemerintah.

Memang tak bisa dikatakan bahwa kualitas jurnalisisme akan dijamin sejalan dengan membaiknya kesejahteraan. Setidaknya, kesejahteraan yang memadai memungkinkan jurnalis untuk bekerja lebih profesional. International Federation of Journalist (IFJ), organisasi yang memiliki lebih dari 600 ribu anggota di 131 negara, mendeskripsikan dengan baik soal ini dalam motto organisasinya: “There can be no press freedom if journalists exist in conditions of corruption, poverty or fear.” Kita tahu pasti bahwa adanya iklim yang memadai bagi kebebasan pers yang memungkinkan jurnalis dan media bisa menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan, selain pendidikan dan hiburan.